

CARA

EDISI DESEMBER 2024

PANDANG

Inspirasi Terkini!



HARAPAN BARU INDONESIA



MAKAN BERGIZI GRATIS
BERPERAN TINGKATKAN
KUALITAS SDM INDONESIA

STOP KRIMINALISASI
GURU DAN PENDIDIK

MEMBANGUN MASA DEPAN
SEPAK BOLA INDONESIA

LOISJEANS.ID



DISCOUNT

UP TO 70%

YEAR

END

Sale



DAFTAR ISI

TAJUK

- MEMBANGUN MASA DEPAN
INDONESIA DENGAN
SEMANGAT KEBANGSAAN** 5

LAPORAN UTAMA

- PRABOWO DALAM
BAYANG-BAYANG
JOKOWI** 15

LAPORAN KHUSUS



- MAKAN BERGIZI GRATIS
BERPERAN TINGKATKAN
KUALITAS SDM INDONESIA** 20

- HARAPAN BARU
PENDIDIKAN INDONESIA** 24

NASIONAL - PENDIDIKAN

- MENGHADIRKAN
KESEJAHTERAAN GURU
INDONESIA** 30

- PENDIDIKAN JADI PRIORITAS
UTAMA** 32

- ZULFAHMI, JUARA 1 KARENA
TAPE RECORDER, KINI
MENJADI JUARA DI HATI
ANAK-ANAK DISABILITAS** 38

- DEDIKASIKAN DIRI UNTUK
MEMAJUKAN ANAK-ANAK DI
TANAH KELAHIRAN** 43

NASIONAL - HUKUM

- STOP KRIMINALISASI
GURU DAN PENDIDIK** 46

- WABAH JUDI ONLINE
GROGOTI NEGERI** 50



LAPORAN UTAMA

- KABINET MERAH PUTIH,
HARAPAN BARU ATAU BEBAN?** 6

Kabinet Merah Putih terdiri dari 48 menteri, 5 kapala badan serta 56 wakil menteri yang mewakili berbagai kalangan dan latar belakang diharapkan mampu bekerja dengan maksimal untuk membawa Indonesia jauh lebih baik.

NASIONAL - POLITIK

- AKHIRNYA TERPILIH,
JELAS TIDAK ADA KATA
PUTUS ASA DI KAMUS
SANG JENDERAL** 56

- PILKADA JAKARTA DAN
ANIES EFFECT** 62

INTERNASIONAL

- DESAKAN DUNIA
HENTIKAN GENOSIDA DI
PALESTINA** 68

- GABUNG BRICS, INDONESIA
MELANGKAH MAJU** 75

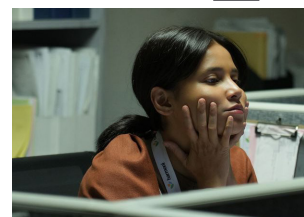
OLAHRAGA

- MEMBANGUN MASA
DEPAN SEPAK BOLA
INDONESIA** 78

OPINI

- MENYAMBUUT INDONESIA
EMAS DENGAN GURU
BERKUALITAS** 82

FILM



- HOME SWEET LOAN,
PERJUANGAN GENERASI
SANDWICH** 84

HUMANIORA

- PERSEPSI GENERASI Z TENTANG
PEKERJAAN:
INOVATIF ATAU
PROBLEMATIC?** 86

Harapan untuk Masa Depan Indonesia dengan Asta Cita Prabowo

Sebagai warga negara yang peduli dengan masa depan Indonesia, saya merasa optimis dengan visi dan misi yang Prabowo-Gibran tawarkan selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Program Asta Cita yang diusung oleh mereka tentu memberikan dampak positif bagi bangsa ini.

Asta Cita, yang terdiri dari delapan misi utama, mencakup berbagai aspek penting untuk kemajuan bangsa. Mulai dari memperkuat ideologi Pancasila, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, hingga mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air². Program ini juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, yang sangat relevan dengan tantangan global saat ini.

Selain itu, Asta Cita juga berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan

gender. Saya sangat mendukung upaya untuk memperkuat pembangunan SDM, karena saya percaya bahwa manusia yang berkualitas adalah kunci utama untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

Tidak kalah pentingnya, program ini juga mencakup reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Saya berharap bahwa dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih adil dan makmur.

Sebagai warga negara, saya mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan Asta Cita ini. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang diusung oleh Prabowo-Gibran.

Nurul Qomariyah

Pengajar, Kabupaten Bekasi



Majalah Cara Pandang

Dewan Pembina: Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., Faozan Amar, S.Ag, M.M., Jalu Dwi Putranto S.IP

Pemimpin Umum: Zulfikar Rachman **Ombudsman:** Mahmud Marhaba (Ahli Pers Dewan Pers) **Direktur:** Michael Malik

Pimpinan Redaksi dan Penanggung Jawab: Habibi **Wakil Pimred:** Amir Fiqi, Mujamin Jassin **Koordinator Daerah:** Nafik Muthohirin (Jawa Timur), Wiwin Alfianti (Riau), Hamid Toliu (Gorontalo), Linda Sari (Sumatera Barat) **Redaktur Pelaksana:** Amir Fiqi, Edo Soeryadi **Redaktur:** Rais Syauqi, Jirga R. Azka, Amira Izzati, Wiwin Alfianti, Zoel Rachman, Haedar Zafran **IT Support:** Zulfikar Iskandar, Dede Hidayatullah **Kreatif:** Robby Firmansyah, Hengki **Media Sosial:** Obie **Sirkulasi:** Syifa Chairul Hidayah

Alamat Redaksi Pusat

Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87 Kota Bekasi 17147 Telp: (021) 82760392 dan (021) 21383521
Email: redaksi@carapandang.com

Majalah Cara Pandang menerima kiriman artikel opini dan rubrik-rubrik lainnya, tak terkecuali rubrik bahasa. Panjang tulisan mencapai 1.000-1.200 kata, spasi satu, times new roman, disertai pas foto terbaru, nama lembaga/institusi, alamat email, kontak person dan nomor rekening. Artikel dapat dikirim melalui alamat redaksi



MEMBANGUN MASA DEPAN INDONESIA DENGAN SEMANGAT KEBANGSAAN

Indonesia, dengan kekayaan budaya dan sumber daya alamnya, memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan semangat kebangsaan yang kuat dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat. Kabinet Merah Putih hadir dengan visi dan misi yang jelas untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik melalui berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat.

Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing. Kabinet Merah Putih berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri. Program beasiswa, peningkatan fasilitas sekolah, dan pelatihan guru adalah beberapa langkah konkret yang diambil untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak.

Ekonomi yang kuat adalah fondasi bagi kemajuan suatu negara. Kabinet Merah Putih berfokus pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi lokal dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Investasi dalam sektor industri kreatif, pertanian modern, dan teknologi adalah beberapa strategi yang diterapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pembangunan infrastruktur yang memadai adalah salah satu prioritas utama Kabinet Merah Putih. Jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang baik akan memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antar daerah. Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan dapat tercipta pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia.

Semangat kebangsaan adalah landasan utama dalam setiap langkah yang diambil oleh Kabinet Merah Putih. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kabinet ini berusaha untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Semangat gotong royong dan kerja sama menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan cita-cita bersama.

Membangun masa depan Indonesia dengan semangat kebangsaan adalah tugas bersama yang memerlukan komitmen dan kerja keras dari seluruh elemen masyarakat. Kabinet Merah Putih, dengan berbagai program dan kebijakannya, bertekad untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera. Mari kita dukung bersama langkah-langkah strategis yang diambil demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.



KABINET MERAH PUTIH, HARAPAN BARU ATAU BEBAN?

Kabinet Merah Putih terdiri dari 48 menteri, 5 kapala badan serta 56 wakil menteri yang mewakili berbagai kalangan dan latar belakang diharapkan mampu bekerja dengan maksimal untuk membawa Indonesia jauh lebih baik.

Minggu, 20 Oktober 2024 menjadi hari penting dan bersejarah bagi perjalanan politik Prabowo Subianto. Setelah melalui proses demokrasi yang panjang dan penuh dinamika, akhirnya dia dinyatakan sah sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia.

Didampingi oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, Prabowo mengucapkan sumpah jabatan kepada seluruh rakyat Indonesia pada sidang Paripurna MPR di gedung Nusantara MPR/DPRI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia, Mantan Danjen Kopassus (1995-1998) ini menempuh perjalanan politik yang panjang dan keras. Sebanyak 4 kali mengikuti pertarungan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, yakni Pilpres 2009 (menjadi Cawapres mendampingi Megawati Soekarnoputri), Pilpres 2014 (menjadi Capres berpasangan dengan Hatta Rajasa), Pilpres 2019 (menjadi Capres berpasangan dengan Sandiogo S Uno) dan Pilpres 2024 (menjadi Capres berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka). Tiga kali kalah berturut-turut, dan pada Pilpres 2024 berhasil menghantar dia sebagai pemenang.

Tentunya, perjuangan panjang yang selama ini Prabowo lakukan tidak hanya sekadar untuk meraih politik kekuasaan, akan tetapi ada tujuan yang lebih besar yakni membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan rakyatnya hidup makmur dan

sejahtera. Mimpi tersebut secara tegas Prabowo ungkapkan saat menyampaikan pidato perdananya sebagai Presiden RI.

Prabowo dalam pidatonya berkomitmen akan berjuang menjadikan Indonesia menjadi negara swasembada pangan dan swasembada energi, memberantas korupsi, penegakan hukum yang tegas dan menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Bangsa yang benar-benar merdeka yang dia maksud yakni bangsa dimana masyarakatnya hidup makmur dan sejahtera, sehingga tidak ada lagi rakyat Indonesia di usia tua masih bekerja keras hanya untuk sekadar mendapatkan sesuap nasi. Dan tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang kelaparan dan kekurangan gizi. Sehingga makan gizi gratis bagi anak-anak Indonesia menjadi program prioritas di masa kepemimpinannya. "Masih ada saudara-saudara kita



usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan dimana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangsa dengan prestasi Indonesia,” kata Presiden Prabowo.

Tentunya untuk mewujudkan visimisinya, Presiden Prabowo tidak bisa bekerja sendiri. Prabowo harus dibantu oleh para menteri untuk mengakselerasi program-program kerja selama lima tahun kedepan dapat berjalan sesuai harapan. Maka itu, dibutuhkan para pembantu presiden yang memiliki integritas

dan kapabilitas dalam menjalankan tugasnya. Sehingga Kabinet Merah Putih benar-benar menjadi harapan untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dalam menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti. Dukungan politik juga sangat penting diperkuat sehingga membangun koalisi yang kuat juga menjadi jalan yang dipilih oleh Prabowo dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden RI.

Memperkuat Kekuatan Koalisi

Setelah resmi dinyatakan sebagai pemenang Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024, Prabowo Subianto bergerak cepat membangun koalisi

dengan semua kekuatan partai politik. Prabowo membuka komunikasi yang baik dan terbuka bagi partai-partai yang berseberangan pada kontestasi Pilpres, yakni berkomunikasi dengan partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan partai politik pengusung pasangan Ganjar Pranowo- Mahfud MD.

Langkah Prabowo membangun koalisi yang kuat di pemerintahannya menjadi kunci untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Sebab, tanpa dukungan yang kuat dari partai politik di parlemen maka upaya membangun Indonesia akan terganggu. Prabowo juga tidak mempermasalahkan jika ada kekuatan partai politik yang tidak mau diajak bekerjasama di pemerintahannya. “Kuncinya perjuangan bersama. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa,” ujarnya dalam acara Bimtek dan Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024).

Namun, Prabowo meminta bagi kekuatan politik yang tidak mau berjalan bersama membantu pemerintahannya, lebih baik menjadi penonton, bukan malah menjadi pengganggu. Menurutnya, yang diperjuangkan menurut Prabowo adalah untuk kemajuan bangsa yakni mengamankan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. “Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Kita mau kerja, kerja mengamankan kekayaan bangsa Indonesia,” tegasnya.

Prabowo secara tegas mengatakan apa yang diperjuangkan adalah bagaimana mewujudkan kemakmuran

rakyat. Sehingga tidak ada lagi rakyat Indonesia yang mengalami kelaparan, dan anak-anak Indonesia menangis karena kelaparan. “Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar, tidak boleh ada anak-anak yang menangis karena tidak makan,” tegasnya.

Meskipun muncul dinamika dalam proses koalisi tersebut, alhasil mayoritas partai politik yang masuk dalam ke dalam gedung parlemen memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo -Gibran untuk lima tahun kedepan. Meskipun dukungan tersebut tidak diwujudkan dengan masuk bergabung dalam susunan Kabinet Merah Putih.

Hal ini seperti dilakukan oleh partai pemenang Pemilu 2024, PDI Perjuangan memberikan kode keras akan memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo dari parlemen meskipun tidak ada kader Banteng yang masuk mengisi jabatan menteri di Kabinet Merah Putih. Dukungan tersebut langsung disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, “PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dalam membangun Indonesia, dan kita akan mendukung melalui parlemen,” ujar Puan Maharani di Gedung DPR, Senin (21/10/2024).

Dukungan PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo bukan berarti tanpa kritis. PDI Perjuangan akan melihat bagaimana rencana kerja Kabinet Merah Putih, termasuk visi dan misi yang mereka tawarkan dalam membangun Indonesia lima tahun kedepan. Jika yang mereka tawarkan membawakemajuandankesejahteraan bagi rakyat Indonesia tidak ada alasan lagi untuk tidak mendukung. “Kita lihat nanti bagaimana kinerja yang dilakukan oleh kabinet yang akan



datang. Ini baru pengumuman, belum melakukan apa yang harus dilakukan, kita lihat apa yang menjadi visi dan misi pemerintahan yang akan datang, kita dukung dulu,” katanya.

Membangun kekuatan koalisi yang kuat oleh Prabowo Subianto di parlemen bisa dikatakan berhasil, dilihat sejumlah ketua umum partai politik masuk dalam Kabinet Merah Putih. Ketua Umum Parpol yang mengisi pos kementerian yaitu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Kemudian Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Politik Akomodatif

Milton Friedman pernah mengatakan “*no free lunch*” atau tidak

ada makan siang yang gratis. Apa yang didalilkan sangat relevan dalam kehidupan keseharian. Terlebih di dunia politik yang semakin berwatak transaksional serta didukung oleh situasi politik yang memaksa kubu pemenang Pemilu yang berhak memerintah harus memperkuat bangunan koalisi pendukung pemerintahannya.

Langkah politik akomodatif tersebut menjadi bagian dari strategi Prabowo yakin mengajak seluruh kekuatan partai politik untuk bergabung dalam koalisi pemerintahannya. Strategi ini juga menjadi prinsip yang dia dipegang kuat, “1.000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak”. Berdasarkan prinsip inilah Presiden Prabowo membuka selebar-lebarnya seluruh partai politik masuk dalam pemerintahannya.

Lantas apakah politik akomodatif yang dilakukan oleh Presiden dengan menambah jumlah kementerian hingga 48 Kementerian di Kabinet Merah Putih menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan bangsa atau berpotensi membebani keuangan

negara?.

Menurut pengamat politik dari Universitas Jember, Hermanto Rahman komposisi Kabinet Merah Putih merupakan skenario politik yang cukup baik yang dimaikan oleh Prabowo. Melihat komposisi menteri di kabinet tersebut merupakan langkah untuk menjaga stabilitas kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan.

Menurutnya, untuk menjaga stabilitas kepemimpinannya dia menempatkan orang-orang kepercayaannya menempati posisi menteri yang berhubungan soal politik, pertahanan, keamanan dan hukum. “Dalam politik pertahanan keamanan dan hukum, saya melihat Prabowo lebih mengoptimalkan pada orang-orang kepercayaannya baik di menteri atau yang melapisi diwakili menteri karena itu penting untuk menjamin keberlangsungan dan stabilisasi kepemimpinan-nya ke depan,” ujar Hermanto dikutip dari Antara.

Menurutnya, jika dibanding dengan kabinet di masa Presiden Jokowi, Kabinet Merah Putih sangat gemuk. Namun, dia berprasangka baik bahwa penambahan jumlah Kementerian merupakan langkah Prabowo untuk mengakselerasi pelaksanaan janji-janji politiknya dimasa kampanye



Hermanto Rahman



Pilpres 2024. “Terlepas dari persoalan akomodasi politi dan pembengkakan anggaran, pandangan positifnya bisa jadi itu adalah bagian dari strategi untuk merinci dan lebih spesifik tanggung jawab dan pembagian kerja dalam pencapaian target pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya.

Namun Dosen FISIP itu mengingatkan, agar lebih berhati-hati dalam mengoptimalkan peran peran koordinasinya, terutama dalam kerja antar menteri dan juga menteri dengan wakil menteri dalam kabinet tersebut. Namun, jika koordinasi dapat dibangun dengan kerja solid dan efektif, maka tidak sia-sia anggaran membengkak.

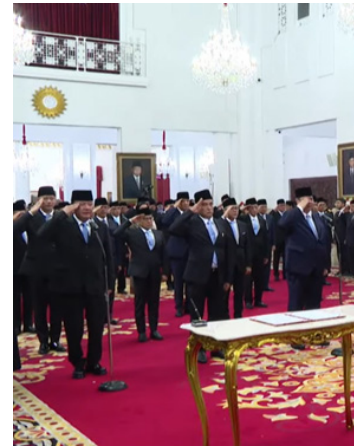
Menurutnya, secara target dan program, Presiden Prabowo seperti berharap pada pencapaian pembangunan bukan hanya pada angka statistik, namun harus dibarengi dengan kondisi riil yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat bawah yang dominan di sektor pertanian.

“Latar belakang menteri sangat nampak seperti Menteri Perencanaan Pembangunan, selain kepercayaan Prabowo, bidang dan aktivitasnya

di pembangunan pertanian dengan harapan wujud serius Prabowo dalam swasembada pangan melalui perencanaan pembangunannya,” jelasnya.

Pakar kebijakan publik Universitas Jember ini juga menilai bahwa Prabowo sepertinya mendorong pada bukan hanya di Industri dan energi fosil, namun diarahkan semua lini dengan spesifik kementerian yang berperan pada isu hilir, misalnya, UMKM, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Koperasi yang juga ditopang kementerian ketenagakerjaan yang bukan dari praktisi, tapi dari akademi profesional dan peneliti. “Dalam pembangunan SDM seperti formula akan dikembalikan lagi pada pentingnya pembunan karakter terutama pada pendidikan dasar dan menengah, serta dengan melepas tentang pembangunan kebudayaan,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menilai arah strategi pembangunan perguruan tinggi seperti akan berubah dari pemerintahan sebelumnya dengan melihat profil menteri dan wakilnya, menurutnya kedepan bahwa perguruan tinggi diarahkan untuk badan hukum dan otonom. “Mungkin skenarionya dana



perguruan tinggi sepertinya akan diarahkan mendukung riset dan hilirisasi bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, bukan industri terutama sektor pangan dan energi,” tambahnya.

Soal skenario pengelolaan keuangan, menurutnya menteri-menteri yang mengisi pos tersebut saling melengkapi, yakni Sri Mulyani yang ahli dalam ekonomi makro yang dibantu oleh wakilnya sebagai representasi penguasa, dan birokrat, serta masuknya Anggito Abimanyu akan mewarnai dalam ekonomi mikro terutama dalam ekonomi kerakyatan.

Selanjutnya dia juga melihat bahwa Presiden Prabowo lebih mengoptimalkan pada orang-orang kepercayaan-nya baik di menteri atau yang melapisi wakil menteri karena itu penting untuk menjamin keberlangsungan dan stabilisasi kepemimpinannya ke depan. “Saya menilai secara komposisi kabinet ini menarik dan sudah diskenario dengan baik oleh Prabowo untuk mencapai dan membuktikan mimpinya yang tertunda. Kita lihat nanti, semoga membahwa perubahan positif,” tutupnya.

Berpotensi Bebani Keuangan Negara

Presiden Prabowo melantik secara resmi 48 menteri, lima pejabat

setingkat menteri dan 56 wakil menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Jumlah total anggota kabinet yang mencapai 109 orang itu berpotensi besar akan membebani keuangan negara.

Presiden Prabowo memecah sembilan kementerian pada pemerintahan sebelumnya, menjadi 21 kementerian baru. Selain itu membentuk tujuh kementerian koordinator, yaitu bidang politik dan keamanan, hukum dan HAM, imigrasi dan pemasyarakatan, perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, dan pemberdayaan masyarakat serta pangan.

Menurut Dosen Ilmu Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio



Hendri Satrio

keputusan Prabowo menambah jumlah kementerian berpotensi membebani keuangan negara. Selain itu, dengan jumlah anggota kabinet lebih dari 100 pemerintah akan sulit memulai pemerintahan yang efektif dalam waktu dekat karena kementerian-kementerian baru membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri.

Hendri mengungkapkan, ada beberapa kementerian bahkan memiliki dua atau tiga wakil menteri sekaligus. Dia mencontohkan misalnya di Kementerian Luar Negeri. Selain itu, perubahan lain terjadi di kementerian tersebut yang setelah 23 tahun dipimpin diplomat karier, kini diduduki kader partai Gerindra, yaitu Sugiono – memiliki tiga wakil menteri, yaitu Anis Matta dari Partai Gelora dan sebelumnya adalah pimpinan Partai Keadilan Sejahtera, dan dua lainnya diplomat karier, Havas Oegroseno dan Arrmanatha Nasir.

“Kabinet ini mungkin baru bisa berjalan normal tahun ketiga. Tahun satu-dua itu biasanya untuk adaptasi dan sosialisasi seperti gedung baru dan nomenklatur baru,” kata Hendri dalam sebuah diskusi di Jakarta baru-baru ini.

“Tahun ketiga baru dilaksanakan program sementara tahun keempat



sudah persiapan pemilu lagi.” imbuhnya.

Maka itu, menurutnya susunan kabinet di pemerintahan Prabowo ini terkesan dipersiapkan untuk dua periode, sehingga dibutuhkan evaluasi ketika dinilai gagal dalam beberapa waktu ke depan. “Apakah mereka bisa menyelamatkan APBN? Saya ragu. Justru mereka ini yang mampu mengakali APBN. Kabinet yang baru dibentuk ini sangat gemuk dan sulit untuk bergerak dari kapasitas juga terkesan kompromistis,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Muhammad Rizal Taufikurrahman, penambahan jumlah kementerian secara langsung menambah beban baru bagi APBN. Maka, gemuknya kabinet Merah Putih memiliki tantangan tersendiri, terlebih di 100 hari pertama mampukah mereka membuktikan bagaimana kementerian dimonitoring, berkaitan dengan kinerja yang dicapai.

Sementara itu, Sapta Dinata peneliti dari Paramadina Public Policy Institute susunan kabinet yang dibentuk oleh Prabowo Subianto sangat gemuk. Menurutnya inilah kabinet terbesar yang ada di dunia. Dan dia marasa

pesimis apakah pemerintahan Prabowo mampu mengawasi jalannya para pembantu agar tetap bekerja secara maksimal. “Ini menjadi tantangan tersendiri bagi presiden baru bagaimana mengawasi dan memastikan, bekerja sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Belum lagi masalah overlapping antar lembaga,” kata dia.

Dia membandingkan dengan negara Amerika Serikat, dengan jumlah penduduk yang lebih besar dari Indonesia, yakni 346 juta jiwa saja hanya memiliki 15 eksekutif departemen setingkat kementerian. Semantaa China hanya memiliki 21 kementerian, padahal jika dilihat jumlah penduduknya mencapai 1,4 miliar jiwa.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Pakar Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor seperti dikutip dari BenarNews menguatkan bahwa pembentukan kabinet semacam ini merupakan pemborosan anggaran belanja. Dia memperkirakan dengan jumlah kementerian seperti ini maka akan ada kenaikan sekitar Rp 390 miliar per tahunnya untuk menopang pengeluaran seperti pengadaan gedung, fasilitas, gaji dan tunjangan pegawai yang mengisi kementerian baru tersebut. “Keberhasilan kabinet ini sangat bergantung pada kepemimpinan Prabowo. Jika tidak efektif, kabinet berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik,” ujar.

Menurut Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Galau D. Muhammad, bahwa penambahan jumlah kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran hanya ajang politik transaksional dan balas budi. Sehingga, tidak hanya menjadi beban negara, kabinet tersebut juga jauh dikatan sebagai kabinet zaken, yang



Firman Noor

diisi oleh menteri-menteri yang ahli dibidangnya.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh pihaknya menunjukkan mayoritas nama yang mengisi jabatan kabinet berasal dari politisi partai pengusung atau pendukung Prabowo-Gibran. Menurutnya sekitar 72 persen menteri-menteri di Kabinet Merah Putih adalah pendukung Prabowo-Gibran. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh CELIOS, potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama lima tahun ke depan akibat koalisi gemuk atau Rp 777 miliar per tahunnya untuk gaji, anggaran dan biaya operasional. Angka ini, ujarnya, belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor lembaga baru. Selanjutnya, kerugian yang dihadapi negara akibat koalisi gemuk tak hanya sebatas pada pemborosan fiskal, tapi juga memperlebar angka ketimpangan.

Dia mengatakan bahwa meskipun angka Rp1,95 triliun kecil dibanding total anggaran APBN Rp 3.000 triliun, tapi jika dilihat lagi nama menteri ada yang memiliki perusahaan, dan ada yang berafiliasi dengan BUMN. “Ini bisa menciptakan ketimpangan baru di masyarakat karena pejabat itu mendapatkan keuntungan ganda dari posisi kekuasaannya,” katanya.

Susunan Menteri di Kabinet Merah Putih

Kementerian koordinator

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan: Yusril Ihza Mahendra

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono

Kementerian Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar

Kementerian Teknis

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Erick Thohir

Kementerian Keuangan: Sri Mulyani Indrawati

Kementerian Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin

Kementerian Pertanian: Andi Amran Sulaiman

Kementerian Agama: Nasaruddin Umar

Kementerian Dalam Negeri: Tito Karnavian

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti

Kementerian Pendidikan Tinggi, Science dan Teknologi: Satryo Soemantri Brodjonegoro

Kementerian Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana

Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

Kementerian Perdagangan: Budi Santoso

Kementerian Perhubungan: Dudy Purwagandhi

Kementerian Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani

Kementerian Hukum: Supratman Andi Agtas

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM): Natalius Pigai

Kementerian Kehutanan: Raja Juli Antoni

Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Perkeja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding

Kementerian Ketenagakerjaan: Yassierli

Kementerian Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Bahlil Lahadalia

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Wihaji

Kementerian Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Nusron Wahid

Kementerian Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

Kementerian Sekretariat Negara: Prasetyo Hadi

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan: Agus Andrianto

Kementerian Luar Negeri: Sugiono

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Maruarar Sirait

Kementerian Kebudayaan: Fadli Zon

Kementerian Transmigrasi: M. Iftitah Suryanegara

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto

Kementerian Sosial: Saifullah Yusuf

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Rachmat Pambudy

Kementerian Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

Kementerian Koperasi: Budi Arie Setiadi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widyantini

Lembaga Setingkat Menteri/ Tidak di Bawah Koordinasi Menteri Koordinator

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN): Muhammad Herindra

Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin

Kantor Staf Presiden: HM Putranto

Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi

Sekretariat Kabinet: Teddy Indra Wijaya

Daftar 56 Wakil Menteri

1. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suhariyanto
2. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi
3. Wakil Menteri Luar Negeri: Anis Matta
4. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar A. Tawalla
5. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Isyana Bagoes Oka
6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto
7. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani
8. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma'ruf
9. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo
10. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria
11. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Nasir
12. Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Immanuel Ebenezer Gerungan
13. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo
14. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah
15. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM: Todotua Pasaribu
16. Wakil Menteri ESDM: Yuliot Tanjung
17. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional: Ossy Dermawan
18. Wakil Menteri Agama: Romo Muhammad Syafii
19. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria
20. Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti
21. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni Moraza
22. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi: Komjen Purwadi Arianto
23. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha
24. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro
25. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan
26. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Diaz Hendropriyono
27. Wakil Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
28. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono
29. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim
30. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat
31. Wakil Menteri Pendidikan: Atip Latipulhayat
32. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Ahmad Riza Patria
33. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti
34. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan: Lodewijk F Paulus
35. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil
36. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza
37. Wakil Menteri Keuangan: Thomas Djiwandono
38. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu
39. Wakil Menteri Pendidikan: Fajar Riza Ulhaq
40. Wakil Menteri Perhubungan: Komjen Suntana Wakil
41. Menteri Pendidikan Tinggi Science dan Teknologi: Stella Christie
42. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej
43. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: Didit Herdiawan
44. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto Sipin
45. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar
46. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sience dan Teknologi: Fauzan
47. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk
48. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas Oegroseno
49. Wakil Menteri Pertahanan: Donny Ermawan Taufanto
50. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono
51. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono
52. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bapenas: Febrian Alfianto
53. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik
54. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Irene Umar
55. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Veronica Tan
56. Wakil Kepala Staf Kepresidenan: M Qodari

10 POIN ARAHAN PRABOWO

di Rapat Kabinet Paripurna Pertama

Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat kabinet paripurna pertama kemarin, Rabu (24/10/2024). Rapat Prabowo dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih berlangsung selama 2,5 jam dan dimulai sekitar pukul 15.00 WIB.

Arti Kabinet Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kabinet 'Merah Putih' menjadi simbol kebersatuan dan kebersamaan bangsa. Kabinet ini merupakan cerminan dari upayanya dia menekankan pentingnya pada persatuan.

Kabinet Gemuk Penting Buat RI

"Jumlah anggota kabinet kita 48 menteri juga ada badan strategis, ini memang lebih banyak dari pemerintah sebelumnya jumlah ini saya sadari memang dianggap tergolong besar tapi karena memang kita bangsa besar jumlah penduduk ke empat terbesar, luas wilayah sama seperti Eropa barat terdiri 27 negara Eropa. Mengelola Eropa butuh 27 Menkeu dan Mendagri," kata Prabowo.

Arahan Langsung ke Sri Mulyani

Arahan awal untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah untuk menelusuri alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prabowo menjelaskan anggaran pemerintah yang terbatas harus diarahkan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kapolri-BIN Harus Berantas Judi

Pemberantasan judi online adalah salah satu tantangan berat pemerintah Indonesia yang membutuhkan dukungan penuh para penegak hukum. Fokus ancaman berat yaitu judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi.

Ancaman Perang Besar, RI Harus Swasembada Pangan

"Perang besar bisa pecah setiap saat kita harus jamin beri makan sendiri, swasembada energi mutlak," ungkap Prabowo.

Hilirisasi 26 Komoditas

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kabinet perdananya di Istana Negara, Jakarta, kembali menyinggung hilirisasi. Ia meminta untuk 26 komoditas harus dihilirisasi.

Kurangi Seminar dan Keluar Negeri

Presiden Prabowo Subianto meminta menteri-nya untuk mengurangi kegiatan yang tidak perlu dan menguras anggaran belanja negara. Presiden meminta anggaran negara dimaksimalkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Minta Menteri Mati-Matian Untuk MBG

Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya akan mempertaruhkan kepemimpinannya untuk menyukseskan makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil.

Minta Menteri Malu Jika Ada Rakyat Kelaparan

"Saya katakan berkali-kali negara merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Jangan kita bangga jadi anggota G20, kalau banyak rakyat masih lapar," tegas Prabowo.

Menteri Boleh Pecat Pejabat Bikin Ribet Birokrasi

Prabowo meminta jajaran menteri-nya mengakui kondisi birokrasi di Indonesia yang masih ribet atau menyusahakan masyarakat. Ia juga berpesan kepada menteri-nya untuk lebih berani dan tidak ragu untuk melaporkan pejabat yang tidak memberikan pelayanan baik kepada masyarakat.

LAPORAN UTAMA

PRABOWO DALAM BAYANG-BAYANG JOKOWI

Setelah purna tugas sebagai presiden, Jokowi terlihat masih ambisi untuk membangun kekuasaan. Ambisi tersebut sudah nampak saat memutuskan anaknya Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden. Dan menempatkan orang-orang dekatnya di Kabinet Merah Putih. Pada Pilkada juga Jokowi turun gunung untuk memenangkan calon-calon kepala daerah yang dia jagokan.



Kemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu tidak bisa terlepas dari jasa Joko Widodo (Jokowi). Jokowi yang saat itu masih menjabat Presiden RI memiliki kekuasaan yang besar untuk menggerakkan mesin birokrasi dan kekuatan lainnya dalam rangka untuk menghantarkan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

Hal itu sangat mudah dibaca, tidak perlu analisis yang rumit. Sebab, dalam

Pilpres 2024 anak sulung dari Presiden ke-7 RI, Gibran Rakabuming Raka turut ikut dalam gelanggang pertarungan Pilpres mendampingi Prabowo Subianto. Masuknya Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024 mempertegas dugaan publik bahwa akan ada konflik kepentingan yang dimainkan oleh Presiden Jokowi.

Konflik kepentingan tersebut dapat dibaca dari sikap dan pernyataan Jokowi yang secara terbuka mengatakan akan turut cawe-cawe

pada Pilpres 2024. Meskipun alasannya untuk kepentingan bangsa dan negara, publik membaca bahwa cawe-cawe yang dilakukan Presiden adalah untuk memuluskan jalan anaknya sehingga bisa menduduki kursi wakil presiden.

Melalui proses demokrasi yang diwarnai dengan “kontroversi” akhirnya pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang yang secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 24 April 2024. Berdasarkan keputusan KPU Prabowo-Gibran menjadi pemenang dengan memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional. Sementara pasangan Anies-Muhaimin mendapatkan 40.971.906 suara atau 24,95 persen. Dan pasangan Ganjar-Mahfud MD menempati urutan terakhir dengan perolehan suara 16,47 persen atau 27.040.878 suara. Hasil Pilpres ini dituangkan KPU RI dalam Keputusan Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilu 2024.

Rasa Kabinet Jokowi

Jasa “baik” Jokowi menghantarkan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024 ternyata tidak cukup hanya memberikan kursi kepada anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Tapi ternyata lebih dari itu, Jokowi menempatkan orang-orang dekatnya untuk menempati sejumlah pos kementerian di Kabinet Merah Putih. Sehingga publik memandang

bahwa Kabinet Prabowo merupakan hasil kompromi politik antara Jokowi dan Prabowo Subianto.

Penilaian publik sangat wajar sebab tidak tanggung-tanggung sebanyak 16 menteri di era Jokowi masuk mengisi jajaran menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo. ke-16 menteri tersebut yaitu Eks Menteri Sekretaris Negara Pratikno diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Eks Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budia Arie Setiadi mengisi jabatan baru sebagai Menteri Koperasi. Eks Menteri Perdagangan Zulfikri Hasan kini diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan. Eks Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Selanjutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Laut dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono. Menteri Sosial Saefullah Yusuf, Menteri Investasi Roesan Roslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Masuknya sejumlah menteri di era Jokowi di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo mempertegas bahwa Presiden Jokowi akan dengan mudah melakukan intervensi kepada pemerintahan Prabowo ke depan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah.

Bahkan menurutnya menteri yang kembali terpilih adalah sosok

yang tidak memiliki kecakapan dalam mengemban amanah sebagai menteri. Dia mencontohkan masuknya Sakti Wahyu Trenggono justru akan menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo. Sebab, Wahyu menurutnya tidak memiliki performa yang baik saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya memilih para pembantu yang tidak memiliki performa yang baik justru akan merugikan Prabowo di pemerintahan mendatang. “Kepercayaan publik sulit terbangun dengan kabinet di isi oleh tokoh yang terbukti tidak memiliki kapasitas dengan baik,” ujarnya dikutip dari Liputan6.com

Dedi menilai banyaknya menteri Jokowi yang terpilih kembali di Kabinet Prabowo menandakan kentalnya politik hutang budi. Sehingga Prabowo harus mengakomodir kepentingan-kepentingan Jokowi. “Tidak dapat dipungkiri Jokowi banyak ambil kebijakan di masa Pilpres yang menguntungkan Prabowo, termasuk mengupayakan Gibran sebagai wakilnya. Jadi ini murni soal balas jasa,” tegasnya.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Pengamat Politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menurutnya banyaknya menteri-



Dedi Kurnia Syah

menteri di era Jokowi masuk ke kabinet Prabowo Subianto bisa memberikan dampak negatif dan positif.

Menurutnya dampak positif menteri-menteri yang ditunjuk tidak lagi memulai dari awal, tapi tinggal melanjutkan apa yang sudah dikerjakan. Sehingga ini membantu jalannya kementerian lebih efektif dalam bekerja. “Untungnya tentu mereka sudah terbiasa melaksanakan fungsi dan tugas kementerian tertentu. Sehingga mereka ketika nanti menjaga kembali, mereka tidak perlu lagi menyesuaikan diri karena biasanya penyesuaian diri itu perlu proses minimal 3-6 bulan. Jadi kalau mereka itu sudah pernah menjadi menteri diharapkan bisa lantas terbang bekerja sesuai fungsi dan tugasnya,” jelasnya.

Menurutnya eks menteri Jokowi yang ditunjuk Presiden Prabowo juga memiliki kompetensi yang baik. Dia mencontohkan beberapa menteri yang memiliki kompetensi serta pengamalan yang baik yaitu Sri Mulyani, dan AHY.

Sementara dampak negatifnya adalah ada beberapa menteri yang memiliki kinerja kurang baik yang ikut terpilih kembali karena kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Sehingga dia khawatir justru akan membawa kerugian bagi pemerintahan Prabowo. Selain itu, katanya dengan banyaknya orang Jokowi masuk dalam Kabinet Merah Putih memungkinkan akan ada dua nahkoda dalam kepemimpinan. Hal ini juga akan kurang baik, sebab bisa mengganggu pemerintahan Prabowo ke depan. Karena loyalitas meraka bukan kepada Prabowo saja, tapi juga loyal kepada Jokowi.

“Kalau ada dua nahkoda di mata menteri, tentu mereka bisa saja berkonsultasi selain kepada Prabowo tapi juga kepada Jokowi. Kalau

paradigmanya itu mereka sama tentu tidak ada masalah tapi kalau ini konteksnya pada loyalitas ini akan mengganggu pemerintahan Prabowo,” ujarnya.

Jokowi Turun Gunung

Presiden ke-7 RI Jokowi pernah mengungkapkan keinginannya akan beristirahat setelah menyelesaikan tugasnya sebagai presiden selama 10 tahun. Jokowi kembali ke rumahnya di Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (20/10/2024) setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik.

Tapi, seperti biasa apa yang disampaikan oleh Jokowi terjadi sebaliknya, bukan istirahat malah Jokowi terlihat sibuk dalam urusan politik untuk memenangkan calon-calon yang dia jagokan pada Pilkada 2024. Bahkan, tidak tanggung-tanggung Jokowi langsung turun gunung dengan ikut berkampanye dan blusukan ke warga-warga dalam rangka untuk memenangkan jagoannya.

Keputusan Jokowi untuk turun gunung di pekan-pekan terakhir masa kampanye Pilkada 2024 bisa jadi karena melihat tingkat elektabilitas jagoan yang didukungnya tidak mengalami peningkatan, bahkan sebaliknya mengalami trend



Saiful Mujani



penurunan. Hal ini seperti yang terjadi pada calon Gubernur Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

Seperti hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan bahwa elektabilitas paslon Ridwan Kamil-Suswono hanya ada diangka 39,1 persen, tertinggal jauh dengan paslon Pramono-Rano yang tingkat elektabilitas mencapai 46 persen. Hal yang sama juga dialami paslon Lutfi-Yasin tingkat elektabilitasnya sebagai Cagub Jawa Tengah dalam dua bulan terakhir ini tersusul oleh paslon yang diusung PDI Perjuangan Andika-Hendi yang mengalami peningkatan elektabilitas hingga 14 persen, sementara Lutfi-Yasin mengalami penurunan 10,9 persen.

Berdasarkan survei SMRC ini tingkat elektabilitas Andika-Hendi sebesar 50,4 persen dan Lutfi-Yasin 47 persen. Dalam survei ini masih ada sekitar 2,6 persen suara yang belum menentukan pilihan.

Jokowi adalah termasuk sosok yang percaya dengan hasil survei, melihat trend penurunan elektabilitas tersebut bisa menjadi ancaman, turun gunung pun harus dilakukan yakni dengan menghadiri langsung kampanye terbuka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah,

Lutfi-Yasin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada Sabtu, 16 November 2024. Di tengah masa pendukungnya dia secara tegas menyampaikan bahwa kehadiriannya merupakan bentuk dukungan kepada Paslon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). “Saya datang karena saya mendukung,” tegas Jokowi.

Jokowi sendiri memang tidak mengikuti kampanye akbar di Benteng Veastenburg, Solo. Meskipun begitu, selebritas Raffi Ahmad yang ikut dalam agenda kampanye akbar itu menyebutkan, paslon Luthfi-Yasin telah mendapatkan dukungan dari Jokowi dan juga dari Prabowo.

Dukungan Prabowo Subianto terhadap pasangan Lutfi-Yasin juga disampaikan secara tegas melalui video. Dalam video tersebut Ketua Umum Partai Gerindra menyakan dukungannya agar masyarakat Jawa Tengah untuk memilih pasangan Lutfi-Yasin pada hari pemungutan suara. Alasan Pranowo mendukung pasangan ini karena telah mengabdikan cukup lama di Jawa Tengah. Taj Yasin pernah menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023. Sedangkan Lutfi pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. “Saya percaya mereka tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita

akan menjadi suatu tim yang baik, tim di daerah dan tim yang ada di pusat,” jelas Prabowo.

Video dukungan tersebut menuai polemik karena sebagai presiden seharusnya Prabowo bersikap netral. Dan apa yang dilakukan Prabowo diduga melanggar undang-undang. Merujuk pada pasal 71 dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, diatur bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lainnya/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kemudian pada pasal 188 UU Pilkada diatur bahwa setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lainnya/lurah yang sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan /atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000.

Namun polemik tersebut berakhir setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan bahwa video dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada Lutfi-Yasin tidak melakukan pelanggaran. Berdasarkan rilis media Bawaslu menyebutkan bahwa pembuatan video tersebut dilakukan di rumah Presiden ke-7 RI Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah. Video tersebut dibuat di sela-sela kunjungan Prabowo ke Kota Surakarta.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pun memastikan bahwa Presiden Prabowo tidak melakukan tindak pidana melalui video dukungan tersebut. “Tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun

tidak pidana pemilihan,” ujarnya di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Dia membenarkan bahwa video tersebut memiliki muatan kampanye pemilihan, tapi jadwal pengunggahan dilakukan pada hari libur. Maka dia memastikan Prabowo terbebas dari ketentuan mengenai cuti kampanye sebagai syarat untuk ikut serta dalam kampanye, karena membuat video saat hari libur atau pada hari minggu (3/11/2024). “Berdasarkan waktu tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Video juga dibuat pada hari libur,” ujarnya.

Jokowi juga turun gunung untuk memenangkan Ridwan Kamil pada Pilgub DKI Jakarta. Presiden ke-7 RI ini bahkan meminta relawan untuk segera bergerak untuk misi pemanangan. Hal itu Jokowi sampaikan dalam acara bersama RK dan para relawan di Jakarta Pusat, Senin (18/11). Di hadapan para relawan memastikan mendukung mantan Gubernur Jawa Barat karena memiliki rekam jejak yang jelas. Dan memiliki kapasitas sebagai pemimpin yang tepat untuk Jakarta, karena RK memiliki pengalaman sebagai Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat. “Secara rekam jejak punya, secara ilmu punya, kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi?,” kata Jokowi.

Maka itu, dia meminta kepada relawan RIDO berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan RK di Pilkada Jakarta 2024. Gerakan yang masif dari para relawan inilah menurut Jokowi akan membawa kemenangan. Dia mencontohkan bahwa kemenangan di Pilpres 2024 berkat kerja masif dari relawan.

“Ancaman” bagi Prabowo

Tidak ada musuh dan kawan yang abadi dalam politik, yang ada adalah

pertemuan kepentingan yang sama. Saat ini, antara Prabowo dan Jokowi masih memiliki kepentingan yang sama, namun ke depan bisa jadi menjadi lawan yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda.

Bila membaca langkah politik Jokowi yang selalu membayangkan-bayangi Prabowo, bisa jadi terdapat tujuan politik yang besar – publik membaca tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana menghantarkan putranya sebagai Presiden RI ke-9. Tidak mungkin, Jokowi berani berseberangan dengan PDI Perjuangan sebagai partai yang telah membesarkan karir politiknya dari Wali Kota hingga Presiden tanpa tujuan yang hendak dia capai. Tujuannya jelas membangun dinasti.

Gelagat Gibran Rakabuming Raka mempersiapkan menuju ke Pilpres 2029 sudah terbaca. Posisinya sebagai Wakil Presiden dimanfaatkan semaksimal mungkin menjadi panggung pencitraan untuk memoles diri sebagai pemimpin masa depan Indonesia, dari bagi-bagi susu dan makan siang gratis hingga program ‘Lapor Mas Wapres’. Program tersebut langsung diumumkan oleh Gibran melalui akan Instagram personalnya pada Minggu (10/11/2024). Dalam program ini masyarakat bisa langsung



Rahmat Bagja

mengadukan keluhan secara online melalui WhatsApp. Masyarakat juga bisa langsung datang ke Istana Wapres. Pengaduan Laporan Mas Wapres ini dibuka setiap Senin-Jumat pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Program Lapor Mas Wapres ini dinilai menjadi panggung bagi Gibran agar dianggap pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyat. Sehingga program ini dibaca sebatas pencitraan dan politisasi.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Koordinator Urban Poor Consortium (UPC), Gun Gun Muhammad dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Selasa (12/11/2024). Menurutnya jika Gibran ingin menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat seharusnya bekerja secara sistem.

Menurutnya, Gibran adalah pemimpin level nasional, sehingga bisa menggunakan birokrasi pemerintah daerah, birokrasi kementerian dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Terlebih program Lapor Mas Wapres dibuka di kantor Wapres, sehingga manfaatnya tidak bisa secara luas dinikmati oleh semua rakyat Indonesia. Sebab, Indonesia tidak hanya di Jakarta, rakyat yang berada di luar Jakarta tidak akan cukup terbantu dengan program tersebut meskipun bisa melaporkan lewat telepon.

“Kalau secara fisik kemudian di



Ujang Komarudin



kantor wapres, bagaimana warga yang di Papua, bagaimana warga yang di Maluku segala macam gitu. Ya betul ada WA, tapi itu juga terbatas sehingga menurut saya ini hanya pencitraan ya dan tidak menyelesaikan karena ini tidak bekerja secara sistem,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Dosen Ilmu Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, bahwa Gibran mengikuti jejak pencitraan sang ayah, Presiden ke-7 Joko Widodo. Blusukan menjadi jurus jitu, sebab Gibran tidak siap berada di kalangan akademisi seperti ceramah publik maupun forum-forum internasional. “Gibran gayanya ya seperti ayahnya blusukan. Memang kelebihan-nya di situ, Gibran mengkapitalisasinya dalam konteks menjalankan pemerintahan maupun membuat pencitraan.” kata Ujang dikutip dari Tempo.co

Satu hari setelah mengucapkan sumpah sebagai wakil presiden, Gibran tancap gas mengecek Proyek MRT Fase 2 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Keesokan harinya, Mantan Wali Kota Solo ini meninjau simulasi program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Jakarta Pusat. Pada 22 Oktober 2024, Gibran meninjau

perkembangan pengerjaan jalur Lintas Raya Terpatu (LRT) fase 1 B Velodrome-Manggarai dena mengecek langsung progres pembangunan Cibubur Youth Elite Sport Center di Jakarta Timur.

Pencitraan yang dilakukan Gibran merupakan modal penting untuk pertarungan Pilpres 2029 mendatang. Membangun citra dekat dan peduli dengan rakyat menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Langkah ini sukses menghantarkan Jokowi selalu menjadi pemenang dalam setiap proses pemilu yang menghantarkannya menjadi wali kota, gubernur hingga presiden selama dua periode. Gibran ingin mengulang kesuksesan sang ayah, Pencitraan sebagai kekuatan untuk menggalang dukungan dari rakyat.

Jika Prabowo Subianto berniat untuk melanjutkan masa jabatan selama dua periode, maka langkah-langkah yang sedang dimainkan oleh Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi ancaman bagi Prabowo sendiri. Bisa jadi Gibran akan menjadi penantang kuat pada Pilpres 2029 mendatang. Jangan anggap remeh Gibran, dengan kekuatan relawan yang masih setia di belakang Jokowi bisa menjadi pesaing yang kuat bagi Prabowo.



MAKAN BERGIZI GRATIS BERPERAN TINGKATKAN KUALITAS SDM INDONESIA

Indonesia memiliki cita-cita besar untuk menjadi negara maju. Oleh karenanya, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pilar penting yang harus diperbaiki sejak hulu. Terutama dalam hal peningkatan kualitas kesehatan, pemenuhan gizi dan pencegahan stunting.

Program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan SDM Indonesia.

Pemerintah Indonesia sendiri mengalokasikan sebesar Rp71 triliun untuk program MBG pada APBN 2025. Hal tersebut disampaikan oleh

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan, setelah rapat bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta.

"Anggaran untuk program makanan bergizi ini mencapai Rp71 triliun. Rinciannya adalah Rp63,356 triliun



untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,433 triliun untuk program dukungan manajemen,” ujar Menko Pangan seperti dilansir dari Infopublik, Rabu (30/10/2024).

Anggaran sebesar itu menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pelaksanaan program MBG ini dilaksanakan dengan baik. Mengingat mata rantai program ini melibatkan banyak pihak mulai dari sekolah, petani, peternak, transportir, ahli gizi, dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan koordinator pelaksana dari program MBG ini. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya sudah membangun 85 satuan pelayanan untuk menjalankan program MBG.

Satuan pelayanan akan melayani 3.000 anak sekolah penerima makan gratis. Ini lebih lengkap dari dapur umum, yakni menjadi tempat memasak makanan sekaligus offtaker produk pertanian lokal.

“Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 (miliar) sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta),” ungkap Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pihaknya juga siap melakukan uji coba MBG di 100 titik sampai akhir 2024. Kendati demikian, menurut Kepala Badan Gizi Nasional lokasi uji coba masih paling banyak akan berada di Pulau Jawa. Sebab, menurut Dadan,



Dadan Hindayana

mayoritas anak sekolah ada di Pulau Jawa.

Terkait metode penyaluran yang akan digunakan. Badan Gizi Nasional akan melakukan tiga skema. Pertama, Badan Gizi Nasional akan membangun dapur pusat. Kedua, membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang.

Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Sedangkan wilayah yang harus dijangkau dalam satu hari, nanti akan dikirimkan dengan menggunakan paket vacuum. Pengiriman untuk daerah terpencil akan dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu, dengan menu makanan yang bervariasi.

Mendongkrak PDB

Dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (17/10/2024) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, program MBG bakal mendongkrak produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp4.510 triliun pada 2025. Hitungan ini berdasarkan alokasi anggaran program MBG tahun 2025 yang sebesar Rp71 triliun dan menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui.

Tidak hanya itu, menurut Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti juga menemukan, efek program MBG ke PDB akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah peserta dan anggaran yang dialokasikan pemerintah. Misalnya pada 2026, dengan anggaran Rp109,7 triliun dan jumlah penerima sebanyak 30,46 juta orang, maka efek berganda ke PDB meningkat jadi Rp6,967.2 triliun.

Lantas meningkat lagi pada 2027 dan 2028 yakni menjadi masing-

masing Rp9.479,4 triliun dan Rp14.219,1 triliun dimana pada 2027 estimasi alokasi anggarannya sebesar Rp149,2 triliun dengan 41,45 juta penerima lalu pada 2028 bertambah anggarannya menjadi Rp223,8 triliun dan 62,17 juta penerima. Selanjutnya pada 2029, estimasi alokasi anggaran program MBG sekitar Rp298,4 triliun untuk 82,9 juta penerima, dapat mendongkrak PDB sebesar Rp18.958,8 triliun.

Mulai 2 Januari 2025

Badan Gizi Nasional akan mulai mengeksekusi program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yang program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada 2 Januari 2025. Masyarakat yang menjadi target penerima program itu pun telah disiapkan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, dari sisi jumlah penerima akan mencapai lebih dari 15 juta orang. Data penerima itu merupakan hasil pemetaan langsung Badan Gizi Nasional, bukan berasal dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Sosial.

“Minimal 15 juta, minimal ya. Datanya ada nanti. Kita punya data sendiri,” kata Dadan saat ditemui di kawasan Gedung Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (11/9/2024).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas juga telah mengungkap data total penerima program Makan Bergizi Gratis sebanyak 15,42 juta jiwa. Bahkan target penerimanya pun juga telah disebutkan yang terdiri dari anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 514 kabupaten atau kota.

“Makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil dengan

sasaran 15,42 juta jiwa termasuk anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita di 514 kabupaten atau kota, ini juga merupakan program quick win,” ucap Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan.

Sebagai informasi tambahan, pelaksanaan program MBG sepenuhnya berasal dari anggaran Badan Gizi Nasional yang senilai Rp 71 triliun. Namun, anggaran Rp 71 triliun itu juga sebetulnya bagian dari anggaran operasional Badan Gizi Nasional.

Namun, untuk detail anggaran khusus program MBG sendiri masih dalam proses penyusunan, karena Badan Gizi Nasional tengah merampungkan Struktural Organisasi dan Tata Kelola (SOTK), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Rencana Strategis (Renstra).

Khusus untuk SOTK, Badan Gizi Nasional menargetkan selesai pada pekan ini, sebab sudah masuk dalam tahap analisis di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian PANRB.

Sasaran Program

Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming akan menyasar 82,9 juta penerima selama lima tahun ke depan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, Makan Bergizi Gratis disebut sebagai salah satu investasi terhadap sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dalam Perpres 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional tertuang empat target utama penerima program



Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan

makan bergizi gratis, diantaranya

1. Peserta Didik atau Pelajar dari PAUD hingga SMA, Negeri dan Swasta Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.
2. Balita atau anak usia di bawah lima tahun.
3. Ibu hamil,
4. Ibu menyusui.

Sasaran Program Makan Siang Gratis dilakukan Bertahap, pada 2025 sekitar 40% kemudian tahun berikutnya naik menjadi sekitar 80% dan target pada 2029 mencapai 100%. Jika program Makan Bergizi Gratis sudah berjalan menyeluruh, akan ada 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia dengan target maksimal sampai 2027. Untuk 2025, minimal ada 5.000 satuan pelayanan yang sudah jalan dengan anggaran Rp 71 triliun.

Untuk fokus awal program makan bergizi gratis yakni anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Makan bergizi gratis akan diberikan dua kali, yakni pagi dan siang. Uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilakukan sejak Agustus 2024.

JADWAL PEMBERIAN MAKAN BERGIZI GRATIS DI SATUAN PENDIDIKAN

Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan. Dengan jadwal tersebut, semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah.



Mulai
2 Januari 2025



Diberikan
1 kali sehari



Pukul 08.00
Bagi anak PAUD, TK,
hingga kelas 2 SD



Pukul 09.30
Bagi anak kelas 3-6 SD



Pukul 12.00
Bagi anak SMP
hingga SMA

Anggaran untuk program MBG sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis, diharapkan bisa mendorong peningkatan kualitas belajar siswa, sekaligus pemenuhan gizi bagi anak.





HARAPAN BARU PENDIDIKAN INDONESIA

Pendidikan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi prioritas utama. Pembangunan manusia Indonesia kunci mengubah Indonesia semakin cerah dan berkembang

Setelah Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia (RI) pada 20 Oktober 2024, selanjutnya Presiden mengumumkan susunan kabinet yang dinamakan Kabinet Merah Putih. Melihat susunan kabinet tersebut, ada harapan baru khususnya dalam dunia

pendidikan di Indonesia.

Sebelumnya, kementerian yang mengurus soal pendidikan di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dipegang oleh satu kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud–Ristek). Namun, di masa Presiden Prabowo kementerian tersebut dipecah menjadi tiga kementerian yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Kementerian Kebudayaan.

Sekretaris Umum P P Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu'ti menjabat sebagai Menteri Pendidikan

Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi diamankan kepada Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro, sementara Menteri Kebudayaan dipegang oleh politisi Partai Gerindra, Dr. Fadli Zon, Msc.

Pemecahan satu kementerian menjadi tiga kementerian bukan sekadar bagian dari politik akomodatif Prabowo, tapi ada tujuan yang lebih besar dan penting yang hendak dicapai oleh Presiden Prabowo Subianto dimasa lima tahun kepemimpinannya kedepan. Di lima tahun masa pemerintahannya Prabowo berkomitmen meningkatkan kualitas

sumber daya manusia Indonesia.

Keputusan Presiden Prabowo memecah Kemendikbud—Ristek menjadi tiga kementerian baru mendapatkan respon positif. Respon positif tersebut diungkapkan oleh pengamat pendidikan dari Universitas Lampung, M. Thoha B Sampurna Jaya. Menurutnya dengan pemecahan tersebut masing-masing kementerian akan lebih fokus dengan bidangnya masing-masing.

“Positifnya adalah para menteri lebih fokus dengan bidangnya masing-masing. Jadi menteri pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi lebih fokus pendidikan tinggi dan riset. Lalu Kementerian Dasar dan Menengah fokus terhadap bidang dasar dan menengah. Dan Kementerian Kebudayaan pun hanya fokus terhadap kebudayaan,” katanya dikutip Lampost.co. (22/10).

Menurutnya, perubahan nomenklatur Kemendikbud-Ristek ini membuat tiga menteri baru dapat lebih fokus menangani bidang pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan kebudayaan secara terpisah. Sebelumnya ketiga bidang tersebut hanya dipegang oleh satu menteri. Selain itu, soal anggaran juga akan sangat baik, karena masing-masing kementerian akan mendapatkan alokasi sesuai dengan kebutuhannya.

“Anggaran tidak lagi membengkak pada satu kementerian. Kalau membengkak bisa menimbulkan hal-hal koruptif,” katanya.

Pendidikan Prioritas Utama

Kualitas sumber daya Indonesia menjadi kunci untuk membawa Indonesia semakin cerah. Pendidikan merupakan faktor utama dalam menciptakan kemajuan suatu bangsa, yang menjadi kunci untuk mengatasi



M. Thoha B Sampurna Jaya

tantangan besar seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial.

Menyadari hal tersebut, maka Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas di masa pemerinthannya lima tahun kedepan. Komintmen tersebut, dia sampaikan dalam pidato pada acara puncak Hari Guru Nasional (HGN) 2024 di Jakarta Internasional Velodrome, Kamis (28/11).

“Tanpa pendidikan yang baik, negara tidak akan mampu berkembang. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa. Kami percaya bahwa hanya melalui pendidikan yang berkualitas kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Dia mengatakan komitmen pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia lebih berkualitas diwujudkan dalam bentuk nyata yakni memberikan alokasi anggaran yang lebih besar dibanding dengan pemerintah sebelumnya. Bahkan dia mengklaim anggaran pendidikan untuk 2025 angka yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Dia mengatakan anggaran untuk pendidikan dalam APBN 2025 bahkan

akan lebih besar dibandingkan dengan anggaran pertahanan yang biasanya menjadi prioritas di banyak negara. “Pendidikan dipastikan akan menjadi anggaran terbesar dalam APBN 2025,” tegasnya.

Presiden Prabowo berharap kebijakan pemerintahannya ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Selanjutnya dia menegaskan tidak ada lagi anak Indonesia tidak bersekolah. Setiap Indonesia harus mendapatkan kesempatan yang sama mendapatkan kualitas pendidikan yang baik.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia tidak bisa lepas dari jasa para guru. Oleh karena itu, Presiden Prabowo akan memberikan perhatian lebih dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Sehingga kesejahteraan guru juga menjadi prioritas utama.

Presiden menjelaskan untuk tahun 2025, pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan bagi sekitar 250 ribu guru yang belum memiliki gelar D4 atau S1, agar mereka dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka. Selain itu, pemerintah akan memberikan bantuan tunai atau cash transfer kepada guru-guru non-ASN yang belum mendapatkan sertifikasi pendidik.

Prabowo juga menekankan bahwa pemerintahannya akan memperhatikan infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia. Maka itu, pemerintah memiliki rencana untuk mengalokasikan dana sebesar Rp17,15 triliun untuk renovasi dan rehabilitasi lebih dari 10.440 sekolah di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun daerah terpencil. Dana tersebut langsung disalurkan ke sekolah-sekolah dan dikelola melalui

mekanisme swakelola.

Prabowo berharap dengan adanya perbaikan infrastruktur pendidikan ini anak-anak akan lebih nyaman dalam belajar. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman bagi siswa. Sehingga mereka akan lebih fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. “Sekolah harus bersih, harus baik, tidak boleh ada sekolah yang atapnya rusak atau tidak ada WC untuk anak-anak. Ini adalah pusat pembangunan nasional,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan agar seluruh anak mendapatkan pembelajaran yang berkualitas maka dia menyampaikan rencananya akan memasang televisi canggih di seluruh sekolah di Indonesia. Hal ini penting dalam rangka mendukung pemerataan akses pendidikan. Menurutnya melalui teknologi ini, siswa di daerah terpencilpun bisa mendapat pelajaran berkualitas tinggi. “Sabar, tungguilah sekitar 3-4 bulan lagi semua sekolah akan terhubung dengan teknologi ini,” imbuhnya.

Prasiden berharap dengan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru, serta upaya perbaikan infrastruktur pendidikan ini dapat menjadi jalan keluar dari masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pendidikan yang berkualitas yang hadir di Indonesia ini akan menciptakan bangsa ini di masa depan akan lebih cerah dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemendikdasmen di Tangan Putra Kudus

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Prof. Abdul Mu'ti menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan



Menengah (Mendikdasmen) di kabinet Merah Putih. Abdul Mu'ti diketahui lahir di Kudus pada 2 September 1968. Pendidikan dasarnya ditamatkan di Kudus pada tahun 1986. Kemudian Abdul Mu'ti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan berhasil meraih gelar sarjana dari Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 1991 silam. Selanjutnya, Abdul Mu'ti mengenyam dan menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Flinders, Australia Selatan pada tahun 1996.

Kemudian, dia melanjutkan pendidikan doktoral atau S3 di UIN Syarif Hidayatullah pada 2008 dan merupakan Guru Besar di kampus

tersebut. Abdul Mu'ti telah aktif di Muhammadiyah sejak 1994, dan pada periode 2000-2002, ia diamanahkan sebagai Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2002-2006.

Selanjutnya ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dari 2005 hingga 2010. Abdul saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Jabatan ini diemban Abdul Mu'ti dalam dua periode sebelumnya yakni 2010-2015 dan 2015-2022.

Keputusan Presiden Prabowo

menunjuk Prof. Abdul Mu'ti mengemban amanah sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sudah tepat. Pasalnya, Abdul Mu'ti adalah seorang akademisi dan ulama yang telah lama berkecimpung dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Dia juga aktif memperjuangkan pendidikan yang berbasis moral, spiritual dan intelektual.

Sebagai seorang cendekiawan, Sekum PP Muhammadiyah ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengkomunikasikan ide-ide kompleks dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Hal ini membuatnya begitu dekat dengan berbagai kalangan dari orang dewasa hingga anak kecil. Menurutnya, pendidikan adalah kunci membangun bangsa, terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945.

Publik berharap kebijakan yang dibuat oleh Mendikdasmen membawa

arah perubahan pendidikan Indonesia semakin lebih baik. Merespon harapan publik tersebut Abdul Mu'ti akan melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan di kementerian yang dipimpinnya.

"Buat apa kalau ganti menteri, tapi kebijakannya masih sama," ujar Mu'ti di hadapan sejumlah pemimpin media di Jakarta pada Selasa, 5 November 2024.

Menurut Mu'ti, amanah yang diembannya sekarang harus menghadirkan kemajuan bagi pendidikan di Indonesia. Maka itu, dia akan melakukan inovasi dan terobosan untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah pendidikan di Indonesia. Namun, dia menyebut sejumlah hal baik yang sebelumnya sudah ada bisa dilanjutkan.

Menurutnya, akan melakukan evaluasi terhadap tiga kebijakan utama yang selama ini menuai pro dan kontra. Tiga kebijakan yang akan dikaji

ulang meliputi penerapan Kurikulum Merdeka Belajar, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi dan kebijakan peniadaan Ujian Nasional.

"Kami akan melihat semuanya secara sangat seksama dan berhati-hati," ujarnya dikutip Antara.

Kehati-hatian dalam melakukan evaluasi yang dimaksud Menteri Mu'ti adalah melalui pendekatan inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni dengan meminta masukan misalnya pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, penggunaan layanan pendidikan, pakar pendidikan, hingga jurnalis. Ini sangat penting dilakukan agar pihaknya bisa memperoleh gambaran komprehensif mengenai kelebihan dan kekurangan implementasi ketiga kebijakan tersebut.

Menteri Mu'ti mengatakan bahwa setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra, namun dalam melakukan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh tapi juga tidak tergesa-gesa. Dia menegaskan meskipun tidak tergesa-gesa kementerian yang dipimpinnya juga tetap berkomitmen untuk bergerak cepat sehingga target-target yang telah ditetapkan dalam program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai. Baik program jangka menengah maupun program jangka panjang.

Langkah evaluasi ini menandai awal kepemimpinan baru di sektor pendidikan dasar dan menengah dengan fokus pada peningkatan kualitas kebijakan pendidikan melalui pendekatan yang lebih hati-hati dan inklusif. Sehingga hasil dari evaluasi bisa menjadi landasan dalam penyempurnaan kebijakan pendidikan yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua pihak.



ABDUL MU'TI

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KABINET MERAH PUTIH

Lahir:

Kudus, 2 September 1986

Pendidikan

- Madrasah Ibtidaiyah Manafiul Ulum Kudus
- Madrasah Tsanawiyah Negeri Kudus
- Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi Filial Kudus
- Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang
- School of Education, Flinders University, Adelaide, Australia
- Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Organisasi

- Anggota Muhammadiyah sejak 1994
- Sekretaris PWM Jateng (2000-2002)
- Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (2002-2006)
- Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah (2005-2010)
- Ketua Umum Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) (2023-2028)
- Anggota British Council Advisory Board (2006-2008)
- Anggota Indonesia-United Kingdom Advisory Board (2007-2009)
- Executive Committee of Asian Conference of Religion for Peace (2010-2015)
- Anggota Indonesia-United States Council on Religion and Pluralism (2016-sekarang)

Karya

- Konvergensi Muslim dan Kristen Dalam Pendidikan (bersama Fajar Riza Ulhaq, al-Wasath Publishing House, 2009)
- Inkulturasi Islam (al-Wasath Publishing House, 2009)
- Beragama yang Mencerahkan (Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, 2019)
- Beragama dan Pendidikan yang Mencerahkan (Uhamka Press, 2019)
- Pluralisme Positif: Konsep dan Implementasi dalam Pendidikan Muhammadiyah (UMJ-MPI PPM, 2019)
- Toleransi yang Otentik: Menghadirkan Nilai kemanusiaan dan keterbukaan dalam Beragama, Berpolitik, dan Peradaban Global (Jakarta: al-Wasath, 2019)

Abdul Mu'ti berkomitmen untuk mendengarkan masukan dari internal, pakar, dan masyarakat sebelum membuat keputusan, serta memastikan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Dikdasmen sesuai dengan aspirasi publik dan mendukung program Presiden Prabowo.

Enam Prioritas Kemendikdasmen

1

Penguatan Pendidikan Karakter, meliputi pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru, peningkatan kompetensi guru BK dan agama, pengangkatan guru BK, penanaman tujuh kebiasaan anak Indonesia, dan penyediaan makan siang bergizi.

2

Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan, termasuk afirmasi pendidikan oleh masyarakat, seperti rumah belajar, pendidikan jarak jauh, dan PAUD, serta fasilitasi relawan mengajar.

3

Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru, termasuk peningkatan kualifikasi minimal D-IV/S-1, pelatihan kompetensi, dan kesejahteraan melalui sertifikasi.

4

Penguatan Pendidikan Unggul, Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi, mencakup pendidikan matematika, sains, teknologi sejak dini, pendirian dan pengembangan sekolah unggul, serta penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan.

5

Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana yang mencakup renovasi sekolah.

6

Pembangunan Bahasa dan Sastra, yang meliputi pemertabatan bahasa nasional, perlindungan bahasa daerah, penginternasionalan bahasa Indonesia, serta peningkatan literasi.



MENGHADIRKAN KESEJAHTERAAN GURU INDONESIA

Hari Guru Nasional (HGN) menjadi momentum bagi pemerintah untuk kembali memperhatikan kesejahteraan bagi guru-guru Indonesia. Guru sejahtera akan membawa pendidikan Indonesia semakin cerah

Peran guru dalam membangun peradaban suatu bangsa menjadi kunci. Sebab, peradaban bisa terbangun karena adanya aktivitas intelektual di masyarakat tersebut yang menghasilkan pemikiran dan karya-karya sebagai bukti lahirnya peradaban. Aktivitas intelektual itu tidak lain bisa berjalan dengan baik karena peran guru.

Pentingnya peran guru dalam membangun peradaban suatu bangsa tentunya harus dibarengi dengan perhatian-perhatian yang cukup, salah satunya adalah bagaimana menghadirkan hidup yang sejahtera bagi mereka. Masalah kesejahteraan guru-guru di Indonesia masih menjadi tantangan besar, sebab banyak guru baik di kota maupun pedesaan masih disibukan untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka.

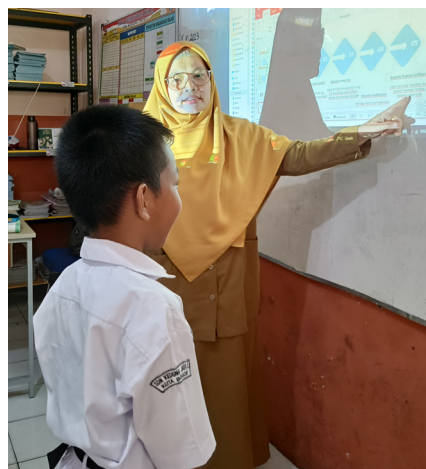
Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi dalam upaya menghadirkan kesejahteraan bagi guru-guru di seluruh Indonesia.

Tema yang diusung pada HGN tahun 2024 “Guru Hebat Indonesia Kuat” mempertegas peran guru dalam membawa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Tingkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti pada upacara peringatan HGN 2024, Senin (25/11) menegaskan guru memiliki kedudukan penting, yakni sebagai agen pembelajar dan peradaban.

“Tema HGN tahun ini adalah Guru Hebat Indonesia Kuat, yang memiliki tiga makna. Pertama penegasan tentang arti dan kedudukan penting para guru. Kedua, guru sebagai agen pembelajaran dan agen peradaban. Ketiga guru menentukan kualitas



Sumber Daya Manusia (SDM), generasi bangsa yang melanjutkan perjuangan serta memajukan bangsa dan negara,” jelas Mu’ti.

Pentingnya peran guru dalam memajukan bangsa Indonesia harus didasari dengan adanya pembuktian keberpihakan kepada mereka. Maka itu, pemerintah berkomitmen tidak hanya meningkatkan kompetensi guru-guru Indonesia, tapi juga memperhatikan kesejahteraan hidup bagi mereka.

Menteri Mu’ti menjelaskan langkah yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru yang pertama melalui sertifikasi guru. Strateginya, Kemendikdasmen akan memberikan bantuan kepada guru-guru yang belum memiliki ijazah Strata 1 (S-1) atau Diplomat IV (D.IV).

“Insyaallah akan memberikan beasiswa atau bantuan pendidikan untuk guru sehingga dapat melanjutkan studi ke jenjang D4 atau S1,” ujarnya.

Langkah kedua, peningkatan kompetensi guru yang berkelanjutan. Mu’ti menjelaskan bahwa ada empat kompetensi guru yang harus dibangun bersama-sama, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Guna meningkatkan keempat kompetensi tersebut maka pelatihan-pelatihan harus ditingkatkan.

“Yang ikut PPG jangan kaget kalau akan ada dua materi tambahan, yaitu bimbingan konseling dan pendidikan nilai,” ujarnya.

Langkah ketiga, kesejahteraan guru akan terus ditingkatkan. Menurut Abdul Mu’ti guru bermutu, berkualitas dan guru hebat salah satunya ditentukan dari kesejahteraan guru itu sendiri.

GURU HEBAT INDONESIA KUAT

Perayaan Hari Guru Nasional
Tahun 2024 ini mengusung tema
“Guru Hebat Indonesia Kuat”.

Makna Guru Hebat Indonesia Kuat

1. Guru adalah pendidik profesional yang bertugas mengajar, mendidik, membimbing, dan menilai hasil belajar para murid.
2. Guru tidak hanya berperan sebagai agen pembelajaran, tetapi juga agen peradaban
3. Guru yang hebat menentukan kualitas pembelajaran, kualitas lulusan, dan kualitas sumber daya manusia.



Program Prioritas Kemendikdasmen Tingkatkan Kualitas Guru



Pemenuhan kualifikasi guru.



Meningkatkan kompetensi guru tidak terbatas pada kompetensi akademik, pedagogik, moral, dan sosial tetapi juga kewirausahaan, dan kepemimpinan melalui berbagai pelatihan.

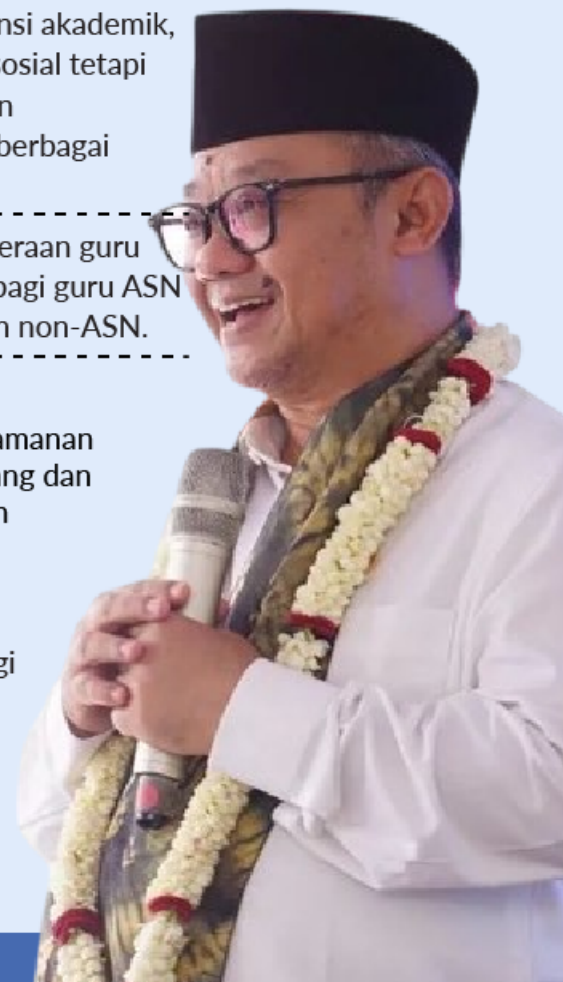


Meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi baik bagi guru ASN PNS dan PPPK, maupun non-ASN.

Kementerian juga berusaha menjamin keamanan para guru agar dapat bekerja dengan tenang dan terbebas dari segala bentuk intimidasi dan tindakan kekerasan oleh siapapun.

Perlindungan Guru

Kemendikdasmen dengan Polri akan menandatangani perjanjian kerja sama tentang kesepakatan agar masalah kekerasan dalam pendidikan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan atau *restorative justice* sehingga guru tidak menjadi terpidana.



PENDIDIKAN JADI PRIORITAS UTAMA

Pendidikan merupakan kunci dari kebangkitan suatu bangsa. Maka, jika Indonesia ingin bangkit langkah yang paling utama adalah bagaimana memajukan pendidikan, sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

Demikian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome Rawamangun, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Presiden mengatakan bangsa Indonesia harus segera bangkit dari kemiskinan. Untuk bangkit dari kemiskinan tidak cukup mengandalkan kekayaan alam yang dimiliki. Namun, untuk bangkit dari kemiskinan jalan yang harus ditempuh melalui jalan pendidikan.

“Kita harus bangkit atau kita terus menjadi negara yang begitu-begitu saja, negara yang rakyatnya masih banyak yang miskin. Kita akan menghilangkan kemiskinan melalui pendidikan,” ujar Presiden.

Maka itu, saat dirinya dipercaya oleh rakyat Indonesia menjadi Presiden RI fokus utama yang akan dilakukan oleh kabinetnya adalah bagaimana memajukan pendidikan Indonesia yang semakin berkualitas.

“Sewaktu saya menerima mandat dari rakyat, fokus saya dan tim saya yang akhirnya menjadi kabinet yang saya pimpin, fokus kita yang utama adalah pendidikan,” tegasnya.

Presiden Prabowo mengatakan



meskipun sebagian besar negara-negara besar di dunia memberikan fokus pada sektor pertahanan, baginya yang paling utama diperhatikan di Indonesia adalah sektor pendidikan. Karena ini menjadi prioritas utama di masa pemerintahannya maka alokasi anggaran terbesar dalam APBN untuk sektor pendidikan.

Menurutnya, sepanjang sejarah Republik Indonesia baru pertama kalinya anggaran APBN terbesar dialokasikan ke sektor pendidikan. Baginya, membangun manusia yang unggul harus segera dilakukan sekarang, sehingga Indonesia

bisa bangkit menjadi bangsa pemenang di masa yang akan datang. Kunci kebangkitan itu adalah mempersiapkan pendidikan bagi rakyatnya dengan sebaik-baiknya.

“Kami sekarang yang memegang tanggung jawab pemerintahan, kami menempatkan pendidikan nomor satu dalam APBN kita. Dan tidak tanggung-tanggung. Saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah tertinggi sepanjang sejarah Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, guru memiliki peran penting. Maka itu, kesejahteraan guru harus terpenuhi.

Menyadari peran penting guru dalam pembangunan SDM Indonesia Unggul, maka pada kesempatan ini Presiden Prabowo berkomitmen akan meningkatkan kesejahteraan guru, baik yang berstatus ASN maupun non ASN.

Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah akan memberikan tambahan kesejahteraan bagi guru ASN sebesar satu kali gaji pokok dan peningkatan tunjangan profesi guru non ASN menjadi Rp2 juta per bulan.

“Tahun 2025 terdapat 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik, yaitu 64,4 persen terdapat peningkatan sebanyak 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024. Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non ASN naik pada tahun 2025 menjadi Rp81,6 triliun. Naik Rp16,7 triliun untuk kesejahteraan guru,” jelasnya.

Selanjutnya, presiden mengatakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru, pemerintah juga akan melaksanakan pendidikan profesi guru (PPG) pada tahun 2025 untuk 806.486 guru ASN dan non ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1. Prabowo mengatakan bahwa sebanyak 249.623 guru yang belum berpendidikan D4 dan S1 akan diberikan bantuan pendidikan secara bertahap pada tahun 2025 untuk melanjutkan pendidikan.

“Pemerintah juga sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN yang belum mendapat sertifikasi melalui bantuan cash transfer yang besaran dan jumlah penerimaannya akan disampaikan pada tahun 2025,” ungkapnya.

Selain itu, Presiden menambahkan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan pada tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana penilai Rp17,15 triliun untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan, dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta. Dana tersebut, ungkapnya, akan dikirimkan langsung ke sekolah secara cash transfer.

“Nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat oleh daerah itu, oleh desa itu, oleh kecamatan itu bisa membeli bahan-bahan dari daerah tersebut, pekerja-pekerjanya dari daerah tersebut, bisa gotong-royong, nilai itu bisa lebih bermanfaat dan lebih berhasil untuk dirasakan oleh siswa, guru, dan rakyat setempat,” jelas Presiden.

DPR: Guru Indonesia harus Sejahtera

Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan pembangunan SDM Indonesia yang berkualitas tidak

bisa dipisahkan dari peran para guru. Maka, melihat jasanya yang sangat besar itu maka guru-guru di Indonesia harus hidup sejahtera.

Fikri meminta kepada pemerintah agar terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh guru di Indonesia. Tentunya tidak hanya guru yang bernaung di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), tapi juga para guru yang bernaung di Kementerian Agama (Kemenag).

“Saya berharap pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru, baik yang berstatus PNS, PPPK, maupun guru non-ASN yang ada di bawah Kemendikbud maupun Kemenag,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (26/11).

Menurutnya dengan tugas yang berat itu, sudah sepantasnya guru menikmati kehidupan yang sejahtera. Jangan sampai masih ada guru di Indonesia yang harus mencari pekerjaan tambahan karena memang gaji yang diperoleh sangat kecil. Untuk mencukupi kebutuhan dasar saja tidak cukup.

Berbicara peran guru untuk bangsa sangat mulia. Sebab peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tapi mereka adalah manusia-manusia pilihan yang menciptakan peradaban sebuah bangsa. Bangsa yang kuat di dunia adalah bangsa yang dibangun oleh SDM-SDM unggul. Dan SDM unggul itulah lahir karena jasa para guru yang sabar mendidik para siswanya.

“Negara yang kuat itu dibangun oleh SDM yang hebat di segala bidang, dan para ahli ini, termasuk dokter, insinyur dan lainnya itu lahir karena adanya proses pendidikan panjang yang dilakukan oleh guru,” ujarnya.

Anggota DPR Fraksi PKS yang pernah menjadi guru ini sangat



memahami tantangan yang dihadapi oleh guru saat mengajar dan mendidik murid-muridnya.

Menurutnya guru menjadi peran sentral dalam melahirkan generasi yang memiliki budi pekerti luhur serta generasi yang cerdas dan terampil. Jika ini dapat dibentuk maka dia guru yang hebat yang bisa membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat.

Politisi PKS ini pernah merasakan bagaimana beratnya perjuangan sebagai guru, yang rela berkorban untuk mendidik murid-muridnya agar menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak. Sehingga tidak ada alasan lagi jika kehidupan guru tidak sejahtera. Sungguh dia memiliki jasa yang tidak ternilai bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Maka itu, dia sangat berharap kepada pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk terus memberikan perhatian lebih terhadap guru, yang dinilai sebagai pilar utama dalam mencetak generasi penerus.

“Semoga kesejahteraan guru semakin meningkat, baik di sekolah maupun di madrasah. Kami di DPR akan terus memperjuangkan hal ini,” pungkasnya.

Komitmen Hadirkan Pendidikan Merata Hingga Kesejahteraan Guru

Komisi X DPR RI Periode 2024–2029 menyatakan berkomitmen untuk mengupayakan hadirnya pendidikan yang merata hingga menyejahterakan guru-guru di Indonesia.

Pekerjaan Rumah Komisi X DPR RI

- ✓ **Para pendidik dan tenaga kependidikan** masih memiliki berbagai keluhan, baik itu menyangkut kesejahteraan, pengakuan status, termasuk juga perlindungan.
- ✓ **Pemerataan pendidikan**, daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) memiliki permasalahan kondisi di aspek pendidikan.
- ✓ **Politik anggaran**, Komisi X DPR RI berharap agar anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran, seperti diamanatkan undang-undang.

Komisi X akan meminta setiap menteri mitra kerja mereka untuk menjabarkan programnya.

“Tentu saja kita nanti akan meminta setiap menteri untuk menjabarkan, mungkin ada kesamaan dari (menteri) yang lalu. Kalau memang sudah bagus, misalnya soal beasiswa, tentu harus dilanjutkan. bahkan kalau perlu, ditambah lagi,” ucap Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.



Filosofi Logo HGN 2024



Sosok manusia dengan tangan terangkat, melambangkan guru sebagai sosok yang memberi ilmu dan inspirasi bagi para muridnya. Tangan terangkat menyimbolkan semangat dan dedikasi guru dalam mendidik.



Buku terbuka, berarti sumber ilmu pengetahuan selalu terbuka dan siap untuk dibagikan. Buku menggambarkan pendidikan dan pembelajaran yang menjadi inti dari profesi guru.



Warna putih, menyimpan makna kemurnian, kesederhanaan, dan kebenaran. Warna putih juga mewakili kebersihan, ketenangan, dan netralitas. Dalam konteks pendidikan, warna putih digambarkan sebagai lingkungan belajar yang bersih dan terbuka bagi semua orang.



Latar warna merah, melambangkan semangat memberi pelayanan pendidikan terbaik dan kecintaan sebagai pendidik.







ZULFAHMI, JUARA 1 KARENA TAPE RECORDER, KINI MENJADI JUARA DI HATI ANAK-ANAK DISABILITAS

Guru adalah profesi yang mulia. Menjadi guru adalah panggilan jiwa. Gelap menjadi terang, tak bisa menjadi bisa, itulah cita-cita Zulfahmi, guru tunanetra yang sudah 13 tahun mengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB)

Negeri 1 Tanjungpinang. Tanpa indera penglihatan, dunia seolah menjadi curam dan gamang, namun Zulfahmi malah mampu menjadi penerang bagi anak-anak yang senasib dengannya.

Sekolah SLB Negeri 1 Tanjungpinang yang terletak di Jalan Martadinata Km

6 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu sekolah yang mendidik anak-anak luar biasa.

Harapan anak-anak penyandang disabilitas pada umumnya mengandalkan kualitas. Tak sedikit orang menganggap anak-anak

penyandang disabilitas miskin akan kreativitas. Namun, di lapangan mereka telah membuktikan bahwa kata “tidak bisa” itu hanyalah kiasan. Di tangan Zulfahmi, anak-anak tunanetra disekolah tersebut dapat membuktikan bahwa mereka kaya akan semangat untuk hidup menjadi orang yang berguna, bagi teman, saudara, agama, masyarakat dan bangsa.

Zulfahmi bertekad untuk mendidik muridnya agar menjadi generasi yang cemerlang dikemudian harinya. Sosok pria penyandang tunanetra tersebut adalah penyandang disabilitas pertama di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi guru.

Dia juga merupakan guru di SLBN 1 Tanjungpinang sekaligus menjadi wali kelas. Tanpa melihat, ia juga malah seperti orang yang normal pada umumnya. Hanya berjalan menggunakan tongkat, berangkat sekolah diantar kerabat, namun ia diacungkan jempol sebagai guru terhebat, karena ia adalah guru tunanetra pertama yang mengajar bidang studi komputer.

Pria yang lahir 15 November 1975 silam tersebut merupakan warga RT05/RW03 Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Pria yang akrab disapa Fahmi ini berbeda dengan orang yang mengalami gangguan penglihatan yang berada di jalanan atau pusat keramaian. Ia tak pernah perlihatkan kesusahan dan kelemahannya kepada orang lain. Ia adalah sosok pembelajar dan merupakan guru penggerak yang bercita-cita melahirkan guru-guru dari kalangan anak didiknya yang notabene penyandang disabilitas.

Sejak kecil, Fahmi memang bercita-cita untuk menjadi guru. Sebelum

usianya 11 tahun, kedua matanya masih normal. Namun, setelah usianya naik 11 tahun, Fahmi mulai terkena penyakit campak yang mengakibatkan mata kirinya rusak. Dimasa kecilnya, ia dikenal sosok anak yang nakal. Kenakalanya itu kembali menjadi musibah baginya.

“Mata kanan saya ini kena ketapel batu, jadi sekarang, kedua mata saya tak bisa melihat, maklum lah, kecil dulu bandel,” kata Fahmi saat diwawancarai, Rabu (27/11/2024).

Gangguan pada mata itu, kata Fahmi membuatnya sempat putus asa. Segala cita-citanya masa kecil seolah sirna. Namun, Tuhan Maha Adil, ia pun dipertemukan dengan seorang tunanetra yang bertandang ke kampung halamannya. Saat bertemu ia pun mendapat pencerahan, seolah ia terlahir kembali didunia ini dengan berjuta harapan.

“Saya dikasih tahu sama orang, dia juga tunanetra, katanya orang tunanetra itu bisa jadi guru dan dosen, disitulah saya mulai semangat lagi,” ungkapnya.

Kala itu, ia melanjutkan sekolah di MTs Negeri di Pariaman dimana menggunakan sistem belajar sekolah umum, dan belum mengedepankan sistem sekolah inklusi seperti yang telah diterapkan beberapa sekolah di Indonesia seperti sekarang ini. Disekolah itu, ia kembali ditantang dengan adanya perbedaan sistem mengajar. Ia juga pernah diragukan oleh pihak sekolah karena kekurangannya tersebut.

“Di MTsN, saya diberikan kesempatan, jika nilainya jelek, maka saya tidak bisa sekolah disitu, berkat perjuangan, belajar menggunakan tape recorder, akhirnya saya juara 1, sampai saya masuk ke Sekolah MAN, lulus pun masuk 10 besar,” tuturnya.

Setelah selesai sekolah, Fahmi kembali melanjutkan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Di bangku kuliah, ia juga bergabung dengan mahasiswa umum. Saat itu, ia mengambil jurusan Pendidikan Luar Biasa, spesialis Ketunanetraan. Ia pun memperdalam ilmu tentang ketunanetraan.

“Alhamdulillah, saya lulus tahun 2005, 5 tahun saya kuliah, tapi selesai kuliah, saya sempat nganggur, selama 2 tahun saya ngamen di kereta tujuan Bandung-Jakarta dan di Jakarta, saya sempat jadi tukang pijat,” tuturnya.

Masa-masa kelam itu menambah catatan sedih dalam kehidupan Fahmi. Namun, meskipun dalam keadaan susah, ia tetap berusaha mencari informasi lowongan kerja sebagai guru.

Fahmi mengaku sempat menjadi guru honor di Sukabumi, lebih kurang 1 tahun lamanya. Tak lama, kabar baik pun terdengar ke kuping Fahmi lewat saudaranya yang ada di Kota Batam. Pada tahun 2008, ia pun mengadu nasib di Kepulauan Riau. Ia sempat mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai guru SLB. Pada saat itu, ada lebih kurang 700 orang yang melamar.

“Alhamdulillah, saya lulus, dan mengajar di SLB di Tanjungpinang,” ujarnya.

Sejak ditetapkan menjadi guru di SLB, Fahmi kerap menyalurkan ilmunya ke peserta didik yang senasib dengannya dengan gigih. Berbekal kemampuan ilmu komputer yang didapati di bangku kuliah, ia akhirnya mengajar studi Komputer disekolah tersebut.

Fahmi sempat memperlihatkan teknis dalam mendidik dan mengajar Anak Berkebutuhan Khusus, khususnya pada pelajaran pendidikan komputer. Meski berjalan dengan

tongkat, tetapi jari jemari Fahmi tak ragu lagi menyentuh keyboard sebuah Laptop. Ia terlihat sangat fasih dalam mengoperasikan komputer.

“Saya dikelas, ada empat siswa, dan mereka saya minta orangtuanya belikan Laptop dan speaker, karena dengan cara mendengarnya kita bisa belajar,” tuturnya.

Laptop, Pengeras Suara dan Aplikasi Khusus

Zulfahmi mengaku bahwa setiap siswanya memang diminta untuk memiliki laptop. Hal ini untuk mempermudah anak belajar dan cepat memahami pembelajaran jika ada alat yang dipergunakan di rumah atau di sekolah.

Beruntung, orang tua siswa menyanggupi hal itu. Menurut Fahmi orang tua sangat mendukung sistem pendidikan yang dia terapkan. Pasalnya memang Fahmi telah menerangkan bahwa laptop sangat penting bagi mereka, termasuk sebagai motivasi untuk mereka belajar dan menatap masa depan.

“Selain itu ada juga pengeras suara yang memang saya wajib kan juga. Karena kami tunanetra dapat dengan cepat menangkap semua hal dengan pendengaran. Oleh karena itu setiap laptop harus memiliki pengeras suara yang mumpuni,” kata Fahmi.

Menurut Fahmi, laptop dan pengeras suara adalah alat bantu yang membawa anak murid ke tahap menjadi orang yang berguna. Metode seperti itu adalah metode yang tepat dilakukan anak-anak penyandang tunanetra.

Kemudian langkah terakhir yang dipergunakan Fahmi dalam mengajar siswanya adalah aplikasi khusus untuk pembelajaran siswa. Di laptop para murid, Fahmi memasang aplikasi

untuk membaca semua huruf yang tampil dilayar laptop tersebut.

“Kami ada aplikasi khusus, jadi untuk mengoperasikan komputer itu, mereka harus hapal semua fungsi keyboard, dan itu yang saya tekankan kepada murid saya, alhamdulillah, mereka sekarang sudah lancar mengetik,” katanya.

Dedikasi Dan Tanamkan Motivasi

Fahmi mendedikasikan diri sebagai pendidik bukanlah tanpa alasan. Salah satu yang mulia adalah, dia ingin anak-anak tunanetra lainnya pun bisa mandiri dan sukses dalam melewati kehidupan.

“Bukan malah sebaliknya, mereka pesimis, seperti dunia ini telah berhenti berputar, seperti saya dulu. Beruntung Allah mengirimkan saya satu orang tunanetra yang memotivasi saya untuk terus maju, sehingga saya bisa jadi seperti sekarang ini,” tutur Fahmi.

Fahmi mengatakan bahwa ia telah mendidik puluhan murid. Bahkan, mantan muridnya ada yang melanjutkan kuliah di Pulau Jawa dan meraih nilai yang diatas rata-rata. Itu dikarenakan semangat serta motivasi yang terus diberikan fahmi kepada para muridnya. Menurut Fahmi, dengan ada orang yang “senasib” dapat sukses, maka akan lahir semangat baru dari diri anak-anak dan mereka akan termotivasi untuk terus menjalani kehidupan.

Dan motivasi dan segala harapan itu terus disampaikan Fahmi kepada para muridnya di SLBN 1 Tanjungpinang tersebut dari generasi ke generasi.

“Saya ingin mereka terus melangkah, sukses dan terus menjalani hidup ini dengan semangat,” tuturnya.

Menurut Fahmi, saat ini masih ada diskriminasi terhadap anak-anak

penyandang tunanetra tersebut. Untuk mengangkat harkat dan martabat seorang penyandang disabilitas yang senasib, guru adalah salah satu faktor penting untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak generasi muda di negeri ini.

“Saya ingin memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa kami yang tunanetra sanggup untuk mandiri, untuk tidak menjadi beban masyarakat semuanya,” ujarnya.

Fahmi juga miris ketika mendengar para penyandang disabilitas terutama tunanetra yang meminta sedekah dijalanan. Menurutnya, meminta-minta mengharap iba dari orang lain merupakan cara yang tidak tetap. Untuk itu, ia bertekad mengajarkan semua metode belajar, teknik belajar cepat kepada murid di SLB tersebut.

“Disini, saya juga berpesan kepada orang tua, jangan minder punya anak disabilitas, karena dibalik kekurangannya pasti ada kelebihan, kelebihannya itu yang harus dibekali dengan berbagai ilmu,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga berharap kepada pemerintah agar memperhatikan para penyandang disabilitas dan mempermudah murid dalam mencari ilmu. Pemerintah juga diminta untuk menyalurkan bantuan berupa alat penunjang pendidikan SLB di Kepri.

“Berikan peluang kepada kami, berikan pekerjaan yang sama dengan orang-orang pada umumnya, jangan sampai ada diskriminasi,” ucapnya.

Berdakwah dan Guru Penggerak

Zulfahmi merupakan guru penggerak yang penuh semangat dan gigih dalam mempraktikkan hal baik. Zulfahmi terus bergerak menyebarkan kebaikan, ilmu dan motivasi kepada rekan-rekan guru dan masyarakat.

Selain menjadi guru, kesibukan

Zulfahmi yang lain adalah berdakwah, memberikan penyegaran agama islam untuk masyarakat. Menurut Fahmi, menyebarkan kebaikan dan ilmu yang dia miliki merupakan kewajiban dirinya sebagai manusia ciptaan tuhan.

“Ilmu itu harus dibagikan, makanya saya sangat mendukung program guru penggerak. Kita sesama guru saling berbagi ilmu, bergerak menyebarkan kebaikan dan terus belajar dan belajar. Setelah belajar kita ajarkan orang lain, sehingga ilmu itu tidak habis di satu titik saja,” kata Fahmi.

Dia yang juga berprofesi sebagai Qori tersebut memilih untuk mendedikasikan diri kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan kepadanya.

“Tapi saya tidak bisa membantu banyak, selain ilmu yang saya miliki, nasihat yang saya fahami dari Rasulullah, serta motivasi seperti yang telah saya dapatkan hingga saya bisa jadi seperti ini,” ujar ayah empat anak tersebut.

Kegigihan, keuletan, serta harapan yang tinggi akan membuat manusia itu memiliki nilai dalam kehidupannya, walaupun dalam keadaan kekurangan (Disabilitas). Fahmi sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur, dan Tuhan akan selalu menolong orang-orang yang berdoa kepada-Nya.

Berbicara tentang guru penggerak, Fahmi mengaku sangat menantikan program itu sampai ke Tanjungpinang atau Provinsi Kepulauan Riau. Pasalnya dia sangat antusias untuk mengikuti program yang ditaja oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tersebut.

“Cita-cita saya, siswa saya bisa menjadi SDM unggul dan setara dengan teman-teman mereka yang bersekolah di sekolah umum. Mimpi saya, mereka menjadi pakar komputer, pakar apa



saja yang berguna bagi daerah dan negeri ini,” kata Zulfahmi.

Zulfahmi Bertemu Zulkifli dan Dapat Hadiah Umroh

Kerja keas serta doa Zulahmi terjawab pada tahun 2017. Menurut dia “rezeki memang tidak pernah salah dan tidak akan diketahui kapan datangnya”. Di peringatan Hari Guru Nasional tahun 2017, Zulfahmi mendapatkan rezeki yang tidak di sangka-sangka dari Ketua MPR RI saat itu, Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) bertandang ke Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam rangka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PAN Provinsi Kepri.

“Seingat saya waktu itu hari Sabtu, Ketua MPR datang, saya dipanggil. Tiba-tiba saya diumumkan oleh Bapak Ketua MPR bahwa dapat hadiah umroh. Katanya atas dedikasi saya dan kerja keras saya sebagai guru, itu hadiah

dari mereka (PAN),” tutur Zulfahmi berkisah.

“Saya langsung mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka (PAN) dan bapak ketua MPR yang sudah berbaik hati memberikan hadiah umroh kepada saya. Ini merupakan cita-cita yang sejak lama, alhamdulillah hari ini saya dapat,” sambungnya.

Zulfahmi pun di berangkatkan pada tanggal 12 November tahun 2018, yang difasilitasi oleh DPW PAN Kepulauan Riau.

Di Tanah Suci pun, Zulfahmi tak lupa dengan siswanya. Sepenggal doa yang menyentuh pun “dipanjatkan” Fahmi saat berada di Tanah Suci untuk anak-anak didiknya.

“Memohon kepada tuhan, agar di beri kemudahan, kesabaran dalam mendidik dan membimbing anak didik saya, dan tercapai apa yg dia cita cita kanya. dan sampaikan lah mereka ketempat ini (Tanah Suci). Saya berdoa Allah menjadikan anak-anak disabilitas anak-anak ahli surga,

berjaya, dan mampu menunjukkan bahwa mereka tidak lemah, mereka lebih kuat dari orang-orang yang kuat,” tuturnya.

Tips Zulfahmi Jauhkan Anak Dari Narkoba

Zulfahmi adalah salah satu dari puluhan ribu guru yang sangat mendukung narkoba dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Namun, fahmi menyadari bahwa hal itu tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Sebagai orang tua dan guru, dia sangat menyadari bahwa dirinya memiliki tanggungjawab yang besar untuk menjauhkan anak-anak, khususnya para siswanya dari jeratan atau jebakan narkoba.

Menurut Fahmi, ABK pun dapat disusupi dengan narkoba dan bahkan dapat dijejek oleh orang-orang dengan narkoba. Oleh karena itu, dia sebagai guru terus memberikan peringatan kepada anak didiknya serta meminta orang tua untuk mengawasi anaknya secara penuh agar narkoba tidak “menjamah” anak-anak tak berdosa tersebut.

Fahmi memiliki tips untuk orang tua yang memiliki ABK atau orang tua pada umumnya agar anak tidak terjerat dengan narkoba.

“Pertama dan yang paling utama adalah dekatkan mereka kepada Tuhannya, kepada Allah. Karena itulah satu-satunya pelindung bagi kita umat manusia. Narkoba itu dosa besar, kehancuran manusia, maka dari itu dekatkan anak pada agama dan Tuhannya agar Allah senantiasa melindungi mereka,” kata Fahmi.

Pengawasan yang ketat oleh orang tua serta memberikan pesan moral kepada anak untuk menjaga diri dari orang-orang asing serta barang-barang asing yang belum dikenalnya

adalah langkah pencegahan yang baik.

“Pengawasan yang ketat bukan berarti ‘memenjarakan’ anak atau terlalu membatasi anak ya,” tuturnya.

Pengawasan ketat itu, sambung Fahmi, dapat dilakukan seperti dengan siapa dia bermain, teman baru dan lingkungan, serta barang pemberian orang yang diterimanya.

Dan yang terakhir adalah melibatkan sang anak dengan kegiatan-kegiatan positif, khususnya kegiatan upaya pencegahan narkoba yang diadakan oleh sekolah, pemerintah atau LSM.

Sepenggal Kisah Mengajar Saat Covid-19

Tanjungpinang adalah salah satu kota yang turut terpapar virus corona jenis baru Covid-19. Seluruh sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Zulfahmi mengatakan bahwa wabah ini merupakan cobaan dan harus di jalani dengan ikhlas. Dia sebagai guru walaupun mengajar anak berkebutuhan khusus dengan orang tua yang tidak awam dengan pendidikan yang diterapkan kepada anak mereka, membuat itu tidak mudah.

“Saya menerapkan sistem pembelajaran luring dan daring kepada siswa saya selama pandemi,” kata Zulfahmi.

Saat pembelajaran yang mudah, Fahmi mengajak anak-anak untuk belajar daring. Namun jika butuh praktek atau pembelajaran secara luring, Zulfahmi menyambangi rumah siswanya.

“Saya ke rumah mereka pakai ojek. Saya ada ojek langganan yang mau mengantarkan saya ke rumah siswa,” kata Fahmi.

Fahmi tidak ingin memberatkan orang tua siswa yang harus menjemput dia ke rumah nya karena dalam kondisi mata yang tidak dapat melihat. Zulfahmi mengaku tidak mau manja atau lemah di hadapan siswanya dan wali murid.

“Selama pandemi saya gunakan ojek kemana-mana. Kadang ada saudara juga yang saya minta tolong mengantarkan saya. Kalau dulu (Sebelum pandemi) saya jalan kaki, karena rumah dekat dengan sekolah. Saya tidak mau menyusahkan wali murid, karena memang saya mengerti juga mereka sedang susah karena pengaruh pandemi ini, harus kerja juga, jadi saya saja yang ke rumah mereka,” cerita Fahmi.

Meskipun di tengah pandemi, Zulfahmi mengaku tetap gembira dalam mengajarkan anak-anak. Bahkan dia mentransfer kebahagiaan tersebut kepada anak-anak didiknya dan memberikan nasihat tentang bagaimana menjaga kesehatan dan mencegah terpapar pandemi di sela-sela senggang saat proses pembelajaran.

Setiap harinya Zulfahmi mengajar satu demi satu siswanya. Dia tidak mau pandemi dijadikan alasan siswanya tidak mendapatkan pembelajaran yang seharusnya telah menjadi hak mereka.

Kepada orang tua, Fahmi terus menguatkan dan memberikan nasihat agar tidak putus asa memberikan pendidikan walaupun disaat susah seperti sekarang ini.

“Jangan lemah, karena semua orang di ciptakan dengan tulang belulang yang kuat. Jangan minder apalagi malu dengan kondisi anak. Mereka akan menjadi ‘kembang api’ yang indah nantinya dan akan menjadi orang yang membanggakan kelak,” tutup Fahmi.



DEDIKASIKAN DIRI UNTUK MEMAJUKAN ANAK-ANAK DI TANAH KELAHIRAN

Menjadi guru merupakan cita-cita mulia yang telah di patrikan oleh seorang pria yang lahir di Pulau Karas, Kecamatan Galang, Kota Batam, Zulfanhadi Abbas. Sejak kecil, Sarjana Ekonomi ini sangat ingin mengabdikan kepada negaranya dengan menjadi seorang pendidik dan pengajar.

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Zul ini bersedia “mengembara” dari pulau satu ke pulau yang lain dengan menjadi guru honorer demi mewujudkan cita-citanya tersebut. Berangkat dari guru honorer, Zul kini telah menjadi seorang kepala sekolah di SMP Negeri 13 Kota Batam.

Namun, untuk mencapai ke level tersebut, Zul mengaku seperti sampan yang terbawa ombak. Dia berkelana dari pulau satu ke pulau yang lain, dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain, hanya demi mededikasikan dirinya untuk membantu pemerintah mencerdaskan anak-anak calon masa depan bangsa.

Zul telah menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 13 Kota Batam tersebut selama 2 tahun, sejak di SK kan pada bulan Desember tahun 2021, dan mulai bertugas Januari 2022. Banyak hal yang terjadi. Zul mengaku, 2 tahun tersebut berisikan berbagai kenangan, pahit dan manis serta berbagai

rintangan yang harus dilewatinya.

Bagaimana tidak, mengajar anak-anak di pulau atau yang akrab di sebut daerah *hinterland* tidaklah mudah. Watak yang keras karena didikan orang tua yang kurang paham dengan literasi pendidikan, sikap dan sifat yang telah mendarah daging, serta keinginan belajar yang minim membuat Zul dan para guru harus memutar otak mencari cara bagaimana mengimplementasikan berbagai kurikulum yang kerap berubah agar anak-anak di sekolah dapat memahami, mengerti, melaksanakan dan mengubah *mindset* mereka.



Berangkat dari Guru Honorer

Zulfanhadi, sebelum merasakan bangku Kepala Sekolah, menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti sekarang ini, dia mengalami berbagai kisah perjuangan yang luar biasa.

Zul memulai karir sebagai guru honorer (guru pembantu) di SMP Negeri 13 Batam selama 2 tahun pada tahun 2002 silam. Kemudian, dia mengikuti tes guru honorer daerah pada tahun 2003, dinyatakan lulus dan mulai bertugas di SMP Negeri 18 Kota Batam yang terletak di Jalan Pelajar, Sembulang, Kota Batam.

Alumni SMP Negeri 1 Tanjungpinang ini merasakan mengajar antar pulau selama kurang lebih 7 tahun.

Menyeberangi lautan untuk mengajar merupakan pekerjaan yang biasa baginya. Tinggi gelombang sudah tidak dihiraukan, makan atau tidak pun bukan menjadi masalah asalkan dia dapat memberikan ilmu kepada anak-anaknya.

“Karena dulu honorer gaji kecil, cuma Rp200 ribu, kadang siang makan, malam tidak. Jauh dari keluarga, tinggal sendiri demi melaksanakan tugas, banyaklah perjuangannya,” ujar Zul.

Menjadi Kepala Sekolah

Meskipun banyak cerita sedih saat menjadi honorer, berjuang selama menjadi guru baru berstatus PNS, akhirnya Zul berada di puncak karirnya

sebagai pengajar, yaitu menjadi Kepala Sekolah. Jabatan tersebut diberikan oleh pemerintah atas kerja keras serta dedikasi yang tinggi dari anak almarhum Abbas (bapak) dan almarhumah Salamah (ibu) ini. Zul ditugaskan di sekolah dimana tempat dirinya pertama kali menjadi seorang guru honorer, yaitu SMP Negeri 13 Kota Batam. Selama dua tahun, pria paruh baya ini bertungkus lumus memutar otak agar “kapal” yang dinahkodainya itu berlayar tetap pada jalurnya.

“Alhamdulillah sekarang sedang di fase ini. Namun, ternyata, tugasnya lebih berat lagi dari pada menjadi seorang pengajar saja. Namun, saya tidak menyerah, saya akan terus memberikan yang terbaik agar murid-murid saya bisa sukses, membanggakan orang tua mereka di masa depan dan menaikkan derajat kampung Karas ini agar menjadi kampung dengan orang-orang yang sukses di Kepulauan Riau, khususnya,” tutur Zul.

Inovasi Tiada Henti

Zulfanhadi, mengaku tidak pernah menganggap sekolah yang dinahkodainya tersebut adalah sekolah kampung. Menurutnya, semua sekolah sama dan memiliki standar yang sama pula. Bahkan, Zul bersama para guru terus melakukan modifikasi sistem pendidikan agar dapat diterima dan memodernisasi anak-anak agar berpikiran luas.

“Anak-anak kita tekankan untuk berpikiran luas. Jangan karena hidup di kampung, maka pikiran hanya sebatas antara pantai dan daratan saja. Kita ingin anak didik di SMP Negeri 13 ini berwawasan luas. Untuk itu kita berupaya memodifikasi berbagai bahan ajar agar dapat dinikmati pembelajarannya oleh mereka,”

tuturnya.

“Anak-anak sangat senang jika pembelajaran itu dimodernisasi, mereka belajar dengan semangat. Kami melakukan upaya-upaya itu, termasuk digitalisasi dan media belajarnya berupa video,” tambahnya.

Zul dan rekan-rekan guru terus berinovasi agar anak-anak kampung ini memiliki watak, sikap serta ilmu mereka setara dengan anak-anak di perkotaan.

“Kami terus berupaya mempraktikkan beragam praktik baik guna mengubah *mindset* anak-anak agar mereka maju dan berkembang. Salah satu yang terbaik adalah melalui Kurikulum Merdeka Belajar,” tuturnya.

Anak ke-7 dari 8 bersaudara ini mengatakan, ia bersama rekan guru terus berinovasi, memasukkan pendidikan karakter dalam setiap kesempatan dan melakukan pendekatan kepada anak-anak melalui jalur religi, agar mereka dapat tetap maju namun tidak meninggalkan pendidikan agama, karena ilmu agama sangat penting bagi kehidupan mereka.

Praktik Baik

Zulfanhadi bersama para guru di SMP Negeri 13 Kota Batam sepakat untuk melakukan pendekatan agama kepada peserta didik mereka. Akidah dan akhlak menjadi hal yang sangat penting bagi anak-anak menurut Zul.

Bukantanpa alasan. Zul mengatakan, hal itu penting dilakukan mengingat anak-anak di perkampungan saat ini telah terkontaminasi dengan berbagai budaya, khususnya budaya negatif dari luar melalui gawai.

Media sosial yang menjadi masalah utama karena tanpa bimbingan orang tua serta tanpa literasi yang benar, sehingga para pelajar diberikan kebebasan untuk membuka apa saja, melihat apa saja di gawainya.

“Akidah dan akhlak sangat penting, kami melakukan pendekatan dari sana. Karena anak perkampungan yang jauh dari perkotaan, ketika mereka telah bertemu dengan hal-hal baru, dan menurut mereka keren, maka hal itu langsung dipraktikkan di kehidupan nyata. Saya tidak perlu beri tahu, namun narkoba, minuman keras,

perjudian online, telah menjadi wabah yang sangat besar di perkampungan,” kata Zul bercerita.

“Maka dari itu, kami ingin siswa siswi kami dapat dipagari dengan akidah dan akhlak, bukan ditinggalkan, karena tentu itu tidak bisa. Tapi kami para guru lebih kepada literasinya, memberikan pendidikan bagaimana mereka menyaring konten-konten yang tidak baik, bagaimana mereka bisa memilih mana yang baik untuk mereka dan mana yang tidak, dan itu semua ada terkandung dalam pembelajaran agama,” tutur Zul lagi.

Keterbatasan, Yasinan di Lorong Sekolah

Cerita tentang sarana dan prasarana, fasilitas di perkampungan memang dirasakan jauh tertinggal dibandingkan dengan perkotaan. Dan hal ini telah terjadi sejak dulu kala. Hal ini pun menjadi keluhan Zulfanhadi kepada pemerintah.

Pendekatan agama tentunya membutuhkan ruang yang baik, bersih dan memadai. Karena disana adalah tempat untuk melakukan ibadah. Namun, sampai tahun 2024 ini, SMP Negeri 13 Kota Batam belum memiliki mushalla untuk tempat beribadah.

“Saya membuat program Jumat yasinan. Namun karena tidak memiliki prasarannya, yaitu Mushalla, maka kami tetap membaca Yasin, namun di lorong sekolah antar kelas. Alhamdulillah, walaupun tempatnya tidak memadai, namun kegiatan ini dapat dikerjakan setiap minggunya,” tutur Zul.

Untuk itu, Zul sangat berharap pemerintah dapat membangun Mushalla di sekolah mereka. Hal sebagai wujud peduli dan praktik baik, agar para siswa dan siswi juga dapat meneruskan praktik baik tersebut.



STOP KRIMINALISASI GURU DAN PENDIDIK



Ibu Supriyani guru honorer yang bertugas di SDN 4 Baito 3

Fenomena kriminalisasi terhadap guru dan pendidik menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia. Guru dan pendidik yang berjuang mendidik murid-muridnya justru dituduh melakukan kejahatan.

Selain dihadapkan dengan persoalan ketidakpastian nasib para guru dan pendidik terkait kesejahteraan, masalah lain juga dihadapi oleh pahlawan tanpa tanda jasa ini dengan fenomena kriminalisasi. Sikap orang tua yang memanjakan anak berujung pada proses hukum kepada guru yang dianggap mereka telah melakukan kejahatan kepada anak-anaknya.

Ada saja oknum orang tua yang tidak memahami bahwa apa yang dilakukan oleh guru dan pendidik merupakan proses dari mendidik anak-anak mereka agar menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan proses pendidikan yang dilakukan juga

masih sesuai dengan koridor dan tidak bertentangan dengan norma dan aturan.

Kasus fenomena kriminalisasi terhadap guru dan pendidik di Indonesia terjadi di banyak daerah. Sebut saja kasus Pak Sambudi seorang guru yang bertugas mengajar di SMP Raden Rahmat, Balongbendo, Sidoarjo. Dia mencubit muridnya berinisial SS karena tidak melaksanakan kegiatan shalat berjamaah.

Akibat cubitan tersebut SS menderita luka memar. Tidak terima atas perbuatan yang dilakukan Pak Sambudi, orang tua murid yang merupakan anggota TNI membawa masalah ini ke ranah hukum dengan melaporkan Pak Sambudi ke Polsek Balongbendo, Sidoarjo.

Kasus yang sama juga dialami oleh Ibu Supriyani guru honorer yang bertugas di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Pada April 2024 orang

tua murid melaporkan Supriyani atas tuduhan melakukan penganiayaan. Berdasarkan keterangan orang tua murid yang merupakan anggota polisi, Aipa Dibowo laporan diajukan setelah melihat anaknya mengalami luka memar di paha anaknya.

Kasus ini mencapai titik baru pada 16 Oktober 2024, ketika Supriyani resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe dan ditempatkan di Lapas Perempuan Kendari. Namun, kasus ini menuai kontroversi, mulai dari dugaan pelanggaran kode etik, hingga adanya isu permintaan uang damai Rp 50 juta yang diminta orang tua murid.

Kasus guru Supriyani mendapat perhatian besar publik dan para pejabat tinggi negara. Syukurlah akhirnya kasus ini menemukan jalan keadilan, guru Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim melalui persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin, 25 November 2024.

Dua contoh kasus di atas menunjukkan bahwa tugas guru sebagai pendidik memiliki tantangan yang berat. Berniat mendidik siswa-siswanya agar menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab malah bisa berujung bui.

Mendikdasmen Jamin Perlindungan Guru

Fenomena kriminalisasi guru dan pendidik menjadi tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Sehingga perlu ada langkah-langkah nyata untuk melindungi para



Pak Sambudi SMP Raden Rahmat (kanan)

guru dan pendidik dalam menjalankan tugasnya.

Pentingnya masalah tersebut maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memasukan jaminan perlindungan guru menjadi program prioritas. Hal ini diungkapkan Mendikdasmen Prof. Dr. Abdul Mu'ti pada upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024 di Jakarta, Senin (25/11).

Pemerintah memiliki program prioritas tidak hanya meningkatkan kualitas kompetensi guru, dan kesejahteraan guru, tapi guru-guru di Indonesia juga harus mendapatkan kepastian keamanannya dalam menjalankan tugas mulianya. Menurutny pihaknya akan berusaha menjamin keamanan para guru agar dapat bekerja dengan tenang dan terbebas dari segala bentuk intimidasi dan tindak kekerasan dari pihak manapun

“Terkait dengan perlindungan guru, Kemendikdasmen akan menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Polri

yang didalamnya memuat kesepakatan agar masalah-masalah kekerasan dalam pendidikan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan sehingga guru tidak menjadi terpidana,” tegasnya.

Pada kesempatan yang lain Mendikdasmen meminta kepada guru-guru Indonesia agar tidak khawatir dan takut menegur siswa-siswanya jika melakukan perbuatan yang buruk.

Pastinya, dalam menegur caranya disesuaikan dengan zamannya.

“Mendisiplinkan itu penting, tapi cara mendisiplinkan murid juga tidak kalah pentingnya. Cara mendisiplinkan tahun 50 tidak sama dengan cara mendisiplinkan 2025,” tegas Mendikdasmen seperti dikutip detik.com (2/11).

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa jaminan hak guru telah dilindungi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU tersebut mengatur perlindungan guru saat menjalani tugas. “Kalau secara aturan, secara undang-undang, sebenarnya sudah ada pasal di dalam undang-undang guru dan dosen yang mengatur tentang perlindungan guru. Bahkan juga sudah ada turunannya di dalam Peraturan Menteri yang waktu itu diterbitkan oleh Pak Muhadjir Effendy,” jelasnya.

Maka itu, tegasnya bahwa hukum dan perlindungan terhadap guru sudah jelas. Sehingga untuk kedepan pihaknya berkomitmen akan terus menegakkan Undang-undang tersebut.

Sementara Ketua Persatuan



Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Dr Muhdi solusi untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap guru dalam menjalankan tugas mulia perlu adanya UU Perlindungan guru.

Masifnya kriminalisasi terhadap guru sampai-sampai ini diungkapkan oleh Mendikdasmen dalam peringatan HGN 2024. Dalam pidatonya Prof. Abdul Mu'ti menyampaikan sudah ada kesepakatan dengan Kapolri terkait kasus kekerasan di sekolah. Menurutnya, ini memiliki arti bahwa persoalan kecil di sekolah yang melibatkan guru dan siswa dapat diselesaikan secara "restoratif justice" sehingga tidak perlu sampai dibawa-bawa ke ranah pidana.

"Orang tua dengan sekolah harus berkomunikasi sehingga masalah-masalah yang kecil tidak perlu dibesar-besarkan," harapnya.

Menurutnya belajar dari kasus yang menimpa Supriyani seorang guru asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang harus dihukum penjara karena kesalahan yang kecil, namun orang tua murid sampai menyeret guru ke bui. Kejadian yang dialami guru Supriyani sangat menyakiti dunia pendidikan di Indonesia, guru yang berusaha mendidik muridnya agar menjadi disiplin malah dianggap oleh orang tua siswa telah melakukan kejahatan.

Pendekatan Keadilan Restoratif

Fenomena kriminalisasi terhadap guru dan pendidik menjadi ancaman bagi guru dalam menjalankan tugas mulia. Maka itu, penegak hukum harus melihat bijak dalam memproses masalah tersebut. Apakah kasus yang dialami guru harus dibawa ke ranah pidana.

Menurut Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Albert Aris dalam



melihat kasus ini penegak hukum perlu segera meninggalkan instrumen hukum pidana sebagai sarana pembalasan.

Aris pun mengingatkan soal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berlaku tiga tahun setelah disahkan pada 2023 lalu. "Masyarakat dan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim & advokat) perlu untuk segera meninggalkan paradigma lama (keadilan retributif) yang menggunakan instrumen hukum pidana sebagai sarana pembalasan (lex talionis) dalam menyongsong berlakunya KUHP Baru tahun 2026 nanti," katanya dikutip CNN Indonesia (6/11).



Selanjutnya dia menegaskan bahwa proses hukum terhadap para guru yang melakukan tindakan disiplin kepada muridnya harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Artinya, menurut dia tidak menitikberatkan pada penghukuman dengan mengutamakan proses penyelesaian di luar pengadilan. Dia pun mengingatkan soal asas hukum disipliner yang merupakan alasan penghapus pidana di luar KUHP bagi para guru termasuk orang tua untuk mendisiplinkan murid/anak-anak secara proporsional dan batas-batas kewajaran.

Terkait hal tersebut, dia pun mengapresiasi langkah Polri yang sudah mencoba mengedepankan keadilan restoratif dengan memerhatikan nota kesepahaman (MoU) dengan PB PGRI No 53/XII/2012 dan No. 1003/XX/2012 dalam penanganan perkara dari para guru yang mendisiplinkan murid. "Kita berharap APH lainnya juga memiliki paradigma serupa agar hukum pidana tidak lagi dijadikan sarana pembalasan," harapnya.

PasarSafe POS

SOLUSI LENGKAP UNTUK PENGELOLAAN BISNIS ANDA

Efisienkan operasional bisnis dengan manajemen stok, diskon, transaksi, dan sumber daya manusia. PasarSafe dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai skala bisnis dengan fitur canggih dan mudah digunakan.



Penjualan Hari ini
Rp 63.025.325

Di Kembalikan September
Rp 1.298.000



Terlaris Hari Ini

	Tepung Payung 221000 Terjual	Rp 1.698.000
	Tepung Segitiga Biru 67000 Terjual	Rp 636.500
	Gula pasir 65000 Terjual	Rp 1.114.000
	Colatta Glaze Coklat 5kg 43750 Terjual	Rp 2.615.000



WABAH JUDI ONLINE GROGOTI NEGERI

Judi Online (Judol) seperti wabah yang terus menyebar ke seluruh pelosok negeri di seluruh dunia. Warga Indonesia pun seperti menjadi target utama mengingat jumlahnya mencapai 278 juta jiwa.

Deputi dan Analis Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia Danang Tri Hartono memperkirakan jumlah pemain judi online menembus 11 juta akun yang teridentifikasi berasal dari Indonesia hingga akhir 2024.

Dia mengatakan untuk membuat

memberantas judi online perlu dilihat mata rantai praktik ilegal tersebut dari sisi permintaan dan suplai. Dari sisi permintaan, jumlah pemain terus bertambah dari 3,4 juta pemain pada 2023 menjadi 8,8 juta pemain pada kuartal III/2024.

Adapun hingga kuartal III/2024, total uang yang dihabiskan masyarakat (deposit) di judi online mencapai Rp43 triliun atau naik Rp9 triliun dibandingkan Desember 2023. Danang mengatakan dengan potensi keuntungan besar tersebut tidak heran

jika kemudian banyak pelaku ingin mengeruk untung dari judi online sehingga suplai terus membanjiri RI.

Dari sisi pola, ujar Danang, para pelaku makin pintar dan menyesuaikan dengan kondisi industri.

“Mereka menyesuaikan dengan kondisi antisipasi yang dilakukan pemerintah,” kata Danang.

Pada 2023, transaksi judi online paling banyak melalui perbankan. Beberapa bulan kemudian, trennya berubah melalui uang elektronik dan dompet digital.

Pemerintah telah merilis data terkait lima provinsi dengan jumlah aktor judi online terbanyak, dan Jawa Barat berada di peringkat pertama dengan 535.644 pelaku serta nilai transaksi mencapai Rp3,8 triliun.

DKI Jakarta berada di urutan kedua. Diikuti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Jumlah transaksi judi online di lima provinsi itu sudah melebihi Rp1 triliun. Di tempat ketiga ada Jawa Tengah dengan jumlah pemain 201.963 dan nilai transaksi Rp1,3 triliun.

Jawa Timur menduduki peringkat keempat dengan jumlah pemain 135.227 dan jumlah transaksi Rp1,051 triliun. Disambung Banten dengan jumlah pemain 150.302 dan nominal transaksi capai Rp1,022 triliun.

Pemerintah juga merilis kabupaten/kota yang memiliki penduduk terbanyak memainkan judol. Dimulai dari peringkat pertama yaitu Jakarta Barat dengan jumlah transaksi Rp792 miliar, selanjutnya kota Bogor dengan jumlah transaksi Rp612 miliar. Di tempat ketiga ada kabupaten Bogor dengan jumlah transaksi Rp567 miliar, Jakarta Timur dengan jumlah transaksi Rp480 miliar dan terakhir Jakarta Utara dengan jumlah transaksi Rp430 miliar.

Judol seperti menjadi jalan keluar bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya mereka. Meskipun judol sendiri telah banyak membuat penduduk bangkrut, menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga dan membuat masyarakat semakin susah. Namun, seperti virus, judol terus menyerang manusia satu ke manusia lainnya hanya dengan iming-iming kemenangan.

Banyak catatan kasus yang ditemukan diberbagai pemberitaan, terjadi karena pelakunya terlibat judol.

Mulai dari kasus pencurian, begal, hingga menjadi kurir narkoba lalu hasilnya di “putar” di laman website judi online yang masih dapat terbuka bebas oleh penggunanya.

Perceraian Tinggi

Seperti yang di tuliskan sebelumnya tentang pengaruh judol terhadap perceraian dan penelantaran anak hingga keluarga. Kementerian Agama (Kemenag) seperti dikutip dari lama websitenya, mengatakan bahwa Judi online tak hanya mengeruk ekonomi, tetapi juga menggempur habis-habisan keharmonisan keluarga. Kecanduan akan judi online menciptakan ketegangan dan perselisihan yang berlarut-larut. Tak jarang, masalah ekonomi yang timbul dari kecanduan ini memperparah situasi, mengakibatkan pertengkaran yang di ujung jangkanya bermuara pada perceraian.

Kota Depok menjadi saksi bisu dari fenomena ini. Kasus perceraian di Kota Depok, Jawa Barat, tahun 2024 mengalami peningkatan ketimbang tahun sebelumnya. Pengadilan Agama Depok merilis bahwa 70% dari kasus

perceraian tersebut berakar dari judi online dan pinjaman online.

Hingga penghujung Juni 2024, Pengadilan Agama Depok telah menangani 1.133 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut, 864 kasus bermula dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, serta 153 kasus dipicu oleh masalah ekonomi.

Beralih ke ujung Sabang, sesuai laporan Polda Aceh, sejak bulan Mei hingga Juni, pihaknya telah menangkap sebanyak 172 aktor judi online. Mereka dijerat dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menetapkan ancaman hukuman hingga 12 kali cambuk.

Kapolda Aceh, Irjen Pol Achmad Kartiko mengatakan, “Di Aceh ini, kita ada Qanun Nomor 6 Tahun 2014, di situ ada Pasal 18 tentang Maisir. Para pelaku ini bisa dijerat dengan qanun tersebut, yang memungkinkan mereka dihukum cambuk 12 kali, didenda emas, atau bahkan penjara hingga 12 bulan,” pernyataan ini disampaikan Achmad Kartiko di Mapolda Aceh, Rabu (26/6/2024).

Dalam kurun waktu dua bulan tersebut, terdapat 151 kasus judi online yang tersingkap dengan 172 tersangka ditangkap. Barang bukti yang disita berupa ponsel dan uang tunai senilai Rp42 juta.

Seiring perkembangan teknologi, judi online juga makin canggih di dunia maya, tak jarang sejumlah platform dan janji keuntungan yang berlipat-lipat cukup menggiurkan bagi para aktor judi online. Bisa dikatakan, sebagian besar masyarakat sebenarnya menyadari dampak negatifnya yang mengerikan. Dari gangguan kesehatan mental hingga risiko bunuh diri, judi online membawa ancaman serius yang perlu diwaspadai oleh semua pihak.



Danang Tri Hartono

- Ancaman Serius Bagi Mental dan Sosial

Seiring perkembangan teknologi, judi online juga makin canggih di dunia maya, tak jarang sejumlah platform dan janji keuntungan yang berlipat-lipat cukup menggiurkan bagi para aktor judi online. Bisa dikatakan, sebagian besar masyarakat sebenarnya menyadari dampak negatifnya yang mengerikan. Dari gangguan kesehatan mental hingga risiko bunuh diri, judi online membawa ancaman serius yang perlu diwaspadai oleh semua pihak.

- Mengganggu Kesehatan Mental

Banyak orang yang kecanduan judi online cenderung mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Ini kerap terjadi manakala mereka merasa tidak mampu mengendalikan kebiasaan berjudi. Seiring waktu, tekanan mental ini bisa berdampak buruk pada kualitas hidup seseorang.

- Menguras Finansial Keluarga

Judi online bisa menjadi bencana bagi kondisi finansial seseorang. Meskipun pada awalnya bisa mendapatkan keuntungan besar, namun banyak orang akhirnya menghabiskan banyak uang dalam waktu singkat. Walhasil, keuangan keluarga bisa terpuruk, menimbulkan masalah ekonomi yang serius.

- Memicu Tindakan Kriminal

Kerugian yang dialami dalam berjudi online kerap lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Kehabisan uang dan kecanduan judi online membuat banyak orang meminjam uang dari sana-sini untuk bermain kembali. Jika utang menumpuk dan tidak mampu membayar tagihan, tindakan kriminal seperti mencuri atau menipu bisa menjadi pilihan yang diambil demi mendapatkan uang.

- Resiko Bunuh Diri

Kecanduan judi sangat berkaitan



dengan pikiran dan perilaku bunuh diri. Bahkan, orang yang kecanduan judi dua kali lebih mungkin meninggal dunia karena bunuh diri dibandingkan dengan mereka yang tidak kecanduan. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak psikologis yang ditimbulkan oleh judi online.

Melihat dampak-dampak negatif ini, penting bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap bahaya judi online. Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus meningkatkan kesadaran dan memberi bantuan bagi mereka yang terjebak dalam jeratan judi. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari ancaman judi online.

Judol dan Pinjol Satu Kesatuan Dan Sumber Petaka

Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi, Budi Arie pernah mengatakan bahwa judi online dan pinjaman online merupakan satu

kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dalam menyengsarakan masyarakat di Indonesia.

Budi Arie membeberkan modus kolaborasi antara judi online (Judol) dan pinjaman online (Pinjol) yang membuat rakyat sengsara. Budi menganalogikan hubungan antara judol dan pinjol layaknya kakak beradik. Pasalnya, dua platform ilegal tersebut diduga dimiliki oleh orang yang sama.

“Kalau main judol, dan tahu perlu uang dan kalah, dikejar, ditawarkan pinjol ilegal. Metodenya memang seperti itu. Itu pinjol-pinjol untuk memangsa para pemain judol,” kata Budi di kutip dari berbagai sumber pada September 2024.

Duo Judol dan Pinjol pun dinilai membawa ancaman serius bagi kehidupan bermasyarakat. Diantaranya, kriminalitas yang masih tinggi, peningkatan perceraian, dan tingginya angka bunuh diri.

Pada prakteknya di lapangan, ternyata tidak hanya pinjol yang menjadi sumber dana bagi para pemain judol di Indonesia. “Gali lubang tutup lubang” pun terjadi secara kontinu, untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kembali bermain di situs judol.

Judol yang telah sampai ke pelosok desa dan perkampungan memberikan daerah-daerah yang terkontaminasi dengan para pelaku judol ini menjadi tidak aman dan rawan terjadi kriminalitas. Kasus pencurian paling marak terjadi di berbagai daerah, mulai dari maling tabung gas, hingga masuk ke rumah warga untuk mencuri perhiasan, kenaraan bermotor dan uang untuk “modal” bermain judi online.

Upaya Pemerintah

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang sekarang dipimpin oleh menegaskan tetap melanjutkan Program Pemberantasan Judi Online dan melakukan percepatan digitalisasi di Indonesia.

“Pak Presiden menginstruksikan untuk terus memberantas judi online serta pinjaman online ilegal. Ini menjadi salah satu prioritas utama kami di Kementerian Komunikasi dan Digital,” jelasnya dalam Serah Terima Jabatan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi kepada Menteri Komdigi di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Oktober yang lalu.

Meutya mengatakan Kementerian Komdigi akan terus agresif memberantas judi online yang kerap memakan korban dari rakyat miskin. Bahkan, dia akan memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menutup situs perjudian online yang melanggar hukum.

“Dua isu krusial ini akan terus jadi



perhatian utama ke depannya. Saya bertekad akan melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan dan berpotensi membahayakan,” ujarnya.

Menteri Komdigi menilai perjudian daring sangat meresahkan masyarakat. Bahkan berpotensi menjadi masalah sosial yang merusak moral generasi muda.

“Dan perlu segera ditangani. Perang terhadap judi online pastinya kita teruskan sama-sama. Nggak boleh kendor ya,” tandasnya.

Meutya Tidak Main-Main

Menteri Komdigi jelas sangat tegas dengan pernyataannya tersebut. Bagaimana tidak, baru 10 hari berstatus sebagai menteri di kementerian tersebut, Meutya telah menutup sekitar 187 ribu situs judi online yang selama ini telah menggerogoti uang masyarakat Indonesia.

Mantan jurnalis televisi itu menyebut ia berharap bisa menutup lebih dari 1,8 juta sampai 200 juta situs judol.

“Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen untuk mendukung penuh arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo

Subianto dalam memberantas segala bentuk aktivitas ilegal, termasuk judi online,” kata Meutya Hafid dalam pernyataan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Komdigi di bawah kepemimpinan Meutya juga mengungkap dugaan keterlibatan pegawainya sebagai backingan situs-situs judi online.

Dengan tegas Meutya Hafid juga akan memecat pegawai Komdigi yang terlibat judi online. Setidaknya ada sekitar 11 orang pegawainya yang dipecat karena diduga menjadi *backing* bos situs judol. Ia juga akan menambah tenaga pengawas operator di ruang digital.

“Jadi, kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online demi memberi perlindungan kepada rakyat agar aman di ruang digital adalah komitmen kami sesuai arahan presiden. Kami mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Kemenkomdigi mematuhi pakta tersebut,” tegasnya.

Tingkatkan Literasi Digital

Pemerintah terus memperkuat upaya mencegah praktik judi online



yang makin mengancam masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia bergerak bersama untuk meningkatkan kesadaran atas bahaya judi online melalui kampanye literasi digital.

Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan edukasi masyarakat, terutama di tingkat akar rumput ditujukan agar tidak mudah terjerat ilusi keuntungan judi online. Menurutnya, literasi digital menjadi solusi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online.

“Upaya itu akan dilakukan secara masif melalui berbagai media, termasuk pertemuan langsung, sosialisasi, dan edukasi berbasis komunitas,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (28/11/2024).

Meutya Hafid menekankan arti penting edukasi sebagai langkah preventif dan antisipatif, dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang luas dari berbagai wilayah untuk menyampaikan pesan-pesan literasi digital secara langsung kepada masyarakat.

Sebagai langkah konkret,

Kemenko Pembangunan Manusia dan dan Kementerian Komdigi akan menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan program-program edukasi digital, khususnya di desa-desa.

“Kita harus membuat masyarakat sadar bahwa judi online bukan tentang keberuntungan, melainkan jebakan yang merusak. Dengan edukasi yang baik, kita berharap dapat mengurangi bahkan menghilangkan kecanduan terhadap praktik ini,” katanya.

Menurut Menko Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar, judi online tidak hanya menciptakan korban, tetapi juga menambah beban sosial dan ekonomi negara.

“Judi online adalah penipuan yang harus kita lawan dengan kesadaran penuh. Seluruh perangkat yang kita miliki akan kita gerakkan, mulai dari pendamping desa, pendamping PKH, hingga kader penggerak pembangunan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan terhindar dari bencana sosial akibat kecanduan judi online.

“Literasi digital dipandang sebagai

cara paling efektif untuk menanamkan pemahaman bahwa judi online hanya menimbulkan kerugian sosial dan finansial,” ucap Muhaimin Iskandar.

Tiga Prioritas

Pemerintah menetapkan tiga prioritas dalam pemberantasan judi online. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan mengatakan langkah prioritas tersebut dilakukan merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dalam koordinasi Kementerian Koordinator Polkam.

“Dari hasil rapat desk pada hari ini, ada tiga hal prioritas yang akan ditindaklanjuti segera,” tegasnya dalam Konferensi Pers Capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring dan Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

Budi Gunawan merinci langkah prioritas meliputi, pertama kerja sama dengan platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Kedua, penegakan hukum dan penelusuran aliran uang judi online, termasuk koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. Ketiga, memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya, akibat judi online.

“Slot atau judi online itu adalah penipuan. Masyarakat selama ini ditipu oleh para operator judi online, diberi harapan bisa menang dalam permainan judi online padahal sudah di-setting agar masyarakat pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya,” jelasnya.

Menurut Menkopolkam,

persoalan judi online saat ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian karena perputaran uang judi online yang ada di Indonesia telah mencapai kurang lebih Rp900 Triliun di tahun 2024.

Sementara itu, pemain judi online mencapai kurang lebih 8,8 juta orang dengan mayoritas dari kelas menengah ke bawah. Menko Budi Gunawan menyebutkan ada 97.000 anggota TNI dan Polri, dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. Kemudian 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun.

“Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Pemerintah akan terus melakukan pencegahan dan pemblokiran terhadap berbagai situs judi online. Menurut Menkopolkam, Desk Pemberantasan Perjudian Daring telah dan terus melakukan penindakan dan penegakan hukum untuk menekan praktik judi online.

“Memotong dan memblokir situs-situs judi online. Termasuk penelusuran dan pemblokiran aliran dana serta melakukan kampanye dan edukasi publik untuk pencegahan judi online,” tandasnya.

Mengenai capaian Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data, Menkopolkam Budi Gunawan menjelaskan dua fokus yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Badan Siber dan Sandi Negara.

“Pertama melakukan penguatan keamanan website milik pemerintah termasuk Pemda dan lembaga pendidikan. Kedua melakukan akselerasi penuntasan pemulihan atau



recovery terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), baik dari sisi infrastruktur maupun pemulihan data untuk mendukung pelayanan publik yang berbasis digital sebagaimana arahan Bapak Presiden,” tuturnya.

Perintah Sang Jenderal

Presiden Prabowo Subianto tegas meminta judi online untuk diberantas. Selain judi online, Prabowo juga meminta korupsi diberantas. Arahan itu disampaikan langsung oleh Prabowo saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024).

Prabowo mengungkapkan bahwa pemberantasan judi online adalah salah satu tantangan berat pemerintah Indonesia yang membutuhkan dukungan penuh para penegak hukum.

Ia menyebut judi online, obat terlarang, penyelundupan, penyelewengan, dan korupsi sebagai ancaman paling berat di Indonesia.

“Ini harus ditopang penegakan hukum yang tidak ragu-ragu saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Badan Intelijen Negara. Fokus ancaman berat kita

judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi,” katanya.

Prabowo juga menegaskan agar para jajaran penegak hukum termasuk intelijen untuk serius memberantas judi online di Indonesia dan memerintahkan Jaksa Agung, Kapolri, BPKP hingga BIN bersamasama menghadapi ancaman judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan dan korupsi.

“Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang baik, bukti kuat, ini bisa dimitigasi semua,” kata Presiden.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sepanjang semester I-2024 nilai transaksi judi online di Indonesia telah mencapai Rp100 triliun. Sedangkan pada laporan terakhir Januari-Juli 2024 mencapai Rp174,5 triliun dengan 117 juta transaksi.

Peningkatan tertinggi terjadi pada 2020 ke 2021. Dari Rp 15,7 triliun ke Rp 57,9 triliun, yakni melonjak Rp 267%.

Selain itu lonjakan 2019 ke 2020 juga cukup tinggi melonjak 155%. Angkanya dari Rp 15,7 triliun menjadi Rp 57,9 triliun.



AKHIRNYA TERPILIH, JELAS TIDAK ADA KATA PUTUS ASA DI KAMUS SANG JENDERAL

Prabowo Subianto merupakan anak dari ekonom Sumitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar. Lahir pada 17 Oktober 1951, pendidikan awalnya ditempuh di luar negeri akibat keterlibatan ayahnya dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) untuk menentang Presiden Sukarno. Usai Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto, Prabowo dan keluarganya kembali ke Indonesia.

Sekembalinya di Indonesia, Prabowo menyelesaikan pendidikannya di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Magelang pada tahun 1974 dan memulai karier militernya di TNI Angkatan Darat berpangkat Letnan Dua.

Dua dekade pemilihan presiden di Indonesia telah di laui oleh mantan perwira militer dengan segudang pengalaman, Prabowo Subianto.

Keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara ini mempersunting Siti Hediati Hariyadi yang merupakan putri dari Presiden Soeharto dan Tien Soeharto, Mei tahun 1983. Prabowo dan Siti Hediati dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Ragowo Hediprasetyo atau Didiet. Akan tetapi pernikahan mereka tidak berjalan sampai tua. Tak lama setelah Orde Baru tumbang, keduanya berpisah pada tahun 1998. Anaknya, Didiet, tumbuh di Boston,

Amerika Serikat dan memilih profesi sebagai seorang desainer yang berbasis di Paris, Prancis.

Karier militernya mulai bersinar ketika ia ditugaskan sebagai Komandan Pleton Para Komando Grup I Kopassandha (kini Kopassus) dalam operasi di Timor Timur 1976.

Saat usianya 26 tahun, Prabowo menjadi salah satu Komandan Pleton termuda dalam operasi. Beliau memiliki peran yang besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap **Nicolau dos Reis Lobato**, yang merupakan pemimpin Fretilin yang saat **Operasi Seroja** menjabat sebagai Perdana Menteri. Tahun 1985, Prabowo menjadi wakil komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328.

Tahun 1991, Prabowo menjabat sebagai Kepala staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung.

Tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan Khusus yang kini diberi nama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Prabowo diangkat menjadi Komandan Grup 3/Sandi Yudha, yaitu salah satu Komando kontra-insurgensi Kopassus. Seterusnya Prabowo menjabat sebagai wakil komandan komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agum Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo.

Desember tahun 1995, Prabowo diangkat sebagai komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Salah satu tugas pertamanya adalah operasi pembebasan sandera Mapenduma. Tanggal 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya.

Prabowo membawahi sekitar 11 ribu pasukan cadangan ABRI. Prabowo meminta Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto agar diizinkan untuk menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta untuk membantu meredam kerusuhan pada Mei 1998. Meskipun pada akhirnya permintaan tersebut ditolak oleh Wiranto, Prabowo diduga menerbangkan ratusan orang yang telah dilatih oleh unit Kopassus di pengawasannya Timor Leste dari Dili menuju Yogyakarta, dan kemudian menuju Jakarta dengan menggunakan kereta api. Pada tanggal 14 Mei, Prabowo bertemu dengan beberapa penggerak reformasi seperti Adnan Buyung Nasution dan Bambang Widjojanto untuk mendiskusikan

situasi yang tengah memanas.

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan digantikan oleh Habibie yang langsung dilantik pada hari yang sama. Siang harinya Prabowo menemui Habibie dan memintanya agar menunjuk Prabowo sebagai Panglima ABRI menggantikan posisi Wiranto. Tetapi Habibie memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai panglima Kostrad.

Prabowo menemui Soeharto setelah diberhentikan dari jabatannya, akan tetapi ayah mertuanya Prabowo itu tidak mendukungnya. Akhirnya Prabowo mendapatkan penugasan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung, menggantikan Letnan Jenderal Arie J. Kumaat. Pada tanggal 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo bersama 6 orang letnan jenderal lainnya, yaitu: Fachrul Razi (Wakil Ketua), Djamari Chaniago (sekretaris), Arie J. Kumaat, Agum Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara.

Dewan ini memeriksa Prabowo dalam 7 butir tuduhan; salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi kewenangannya, tetapi menjadi wewenang Pangab, tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf, pengendalian dan pengawasan, dan sering ke luar negeri tanpa izin dari Kasad ataupun Pangab.

Selama persidangan berlangsung, Prabowo mengklaim dirinya sebagai seorang tawanan perang yang dilindungi oleh **Konvensi Jenewa** dan kerap menggunakan haknya untuk

tidak bicara, sehingga membuat frustrasi para anggota dewan yang sudah harus memakai rompi anti peluru. Prabowo diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

DKP memutuskan bahwa Prabowo bersalah dan melakukan tindak pidana ketidakpatuhan (Pasal 103 KUHP Militer); memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain (pasal 55 (1) ke-2 KUHP Militer dan Pasal 333 KUHP), dan penculikan (Pasal 55 (1) ke-2 dan Pasal 328 KUHP). Pemberhentian Prabowo dari dinas militer terjadinya kontroversi saat pemilihan umum 2009, apabila politisi Gerindra Fadli Zon membantah bahwa Prabowo dipecat, melainkan “diberhentikan dengan hormat”.

Setelah Prabowo meninggalkan karir militer, beliau memilih mengikuti karir adiknya menjadi pengusaha. Dalam dunia bisnis Prabowo memiliki dan memimpin 27 perusahaan di negara Indonesia dan juga di luar negeri. Prabowo menjadi presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energy yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pulp, dan juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan.

Karirnya dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo juga membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai Rp. 1,8 triliun. Nama Kiani Kertas diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara.



Kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai dua puluh tujuh perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha yang dimiliki Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit dan batubara.

Pada tahun 2011, dilaporkan jika PT Kertas Nusantara memiliki 161 kreditor yang terdiri dari 136 kreditor konkuren, 18 kreditor istimewa dan 7 kreditor separatis. Berdasarkan verifikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pada saat itu total hutang Kertas Nusantara mencapai Rp 14,31 triliun. Pada tanggal 9 Juni tahun 2011, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan kepada PT Kertas Nusantara agar membayar hutang sebesar Rp. 142 miliar kepada PT Multi Alphabet sebagai salah satu kreditor dalam waktu empat puluh lima hari, apabila tidak maka Kertas Nusantara terancam dinyatakan bangkrut. Pada saat tanggal 22 Juli 2011, PT Kertas Nusantara selamat dari ancaman kebangkrutan setelah 89% kreditor setuju dalam memberikan perpanjangan waktu untuk pembayaran hutang.

Pada 20 Januari tahun 2015, PT Kertas Nusantara kembali diterpa

masalah karena sekitar 600 orang karyawan PT Kertas Nusantara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur melakukan unjuk rasa menuntut gaji yang belum dibayarkan selama 5 bulan lamanya. Namun, berita ini dibantah langsung oleh Indra Alam, Ia merasa tidak pernah memberi pernyataan bahwa dirinya mengajak buruh untuk melakukan demonstrasi di Bundaran HI dan memboikot Prabowo dalam pemilu. Pihak manajemen PT Kertas Nusantara juga telah mengkonfirmasi jika masalah hutang gaji telah diselesaikan sejak bulan Maret 2014. Direktur PT Kertas Nusantara Winson Pola tidak pernah meminta maaf serta menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan karena pabrik yang tidak beroperasi dengan kapasitas penuh pada pertengahan tahun 2013.

Awal Mula Prabowo Berpolitik

Karir politik dari Prabowo Subianto dimulai saat dirinya akan mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden Indonesia dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar tahun 2004. Meskipun lolos, pada akhirnya Prabowo kalah suara oleh Wiranto.

Bersama sang adik, Hashim

Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon dan mantan Deputy V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalang Muchdi Purwoprandjono serta sederet nama lainnya, pada tanggal 6 Februari tahun 2008 mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Pada partai Gerindra, Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Partai Gerindra meraih 4.646.406 suara (4,46%) dan menempatkan dua puluh enam orang wakilnya di DPR RI pada Pemilu Legislatif Indonesia pada tahun 2009.

Pada tanggal 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu tahun 2009. Tetapi setelah adanya proses tawar menawar yang tidak mudah, Prabowo akhirnya bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri.

Saat itu, Prabowo dan Megawati harus berhadapan dengan pasangan yang cukup kuat dan di gadang-gadangkan akan memenangkan Pilpres tersebut.

Hasil dari hitung cepat dari lembaga Survei Indonesia, Lingkaran survei Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, CIRUS, Lembaga Riset Informasi, dan Quick Count Metro TV, memprediksi pasangan Megawati-Prabowo kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Hasil perhitungan Manual KPU yang diumumkan pada tanggal 25 Juli 2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat.

Pada pemilihan calon presiden tahun 2014, Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan akan mengusung

Prabowo sebagai bakal calon presiden Indonesia. Prabowo menyatakan siap untuk dicalonkan sebagai presiden meskipun beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas yang dimiliki oleh Prabowo tertinggi apabila dibandingkan dengan calon-calon presiden yang lain. Bahkan tidak sedikit pengamat politik yang meyakini kalau langkah dari Prabowo akan terganjal elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya yang sangat rendah.

Berpasangan dengan Hatta Rajasa, Pilpres 2014 menjadi kekalahan kedua bagi Prabowo. Joko Widodo bersama Jusuf Kalla menjadi pasangan yang dipilih masyarakat Indonesia untuk memimpin Tanah Air hingga tahun 2019. Namun, kekalahan kali ini tipis, jika di bandingkan kekalahannya saat bertarung melawan SBY-Budiono di pentas yang serupa.

Kemudian, kekalahan ketiganya dalam Pilpres 2019. Prabowo didampingi Sandiaga Uno sebagai Cawapresnya, Prabowo bertanding dengan lawan yang sama untuk kedua kalinya, yakni Jokowi yang pada saat itu berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Saat itu, Prabowo harus menelan kekalahan kembali dengan mendapat 44,50% suara, sedangkan Jokowi-Ma'ruf meraih 55,50% suara.

Jalan Terakhir, Pertarungan Terakhir

Pada pemilihan presiden tahun 2024, merupakan jalan terakhir dan pertarungan terakhir bagi sang Jenderal untuk memimpin Indonesia. Ambisinya mengalahkan segalanya. Tegas, dengan maju kembali menjadi calon presiden pada Pilpres 2024, Prabowo menyatakan bahwa tidak ada kata putus asa di dakam catatan hidupnya.

Prabowo benar-benar menunjukkan ketangguhannya seperti lainnya

dia di medan pertempuran dulu. Kemenangan tidak datang dengan cepat, namun Prabowo bertekad bahwa suatu hari dia harus menjadi pemenangnya.

Menggandeng putra mantan presiden, Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Prabowo mendapatkan dukungan 100 persen dari Jokowi dan seluruh pendukung yang masih setia kebersamaannya meski begitu banyak tekanan dan desakan yang terjadi menjelang habis masa tugasnya.

Tak perlu menunggu waktu lama untuk saling menjalin kimisteri politik, Prabowo dan Gibran langsung klop dengan visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Prabowo-Gibran didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan visi yang diwujudkan dalam 8 misi Asta Cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat.

KIM yang merupakan gabungan dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Garuda dan PSI mengantar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024, ke kantor KPU, Rabu (25/10/2023) pukul 11.20 WIB.

Di tengah prosesi itu, analisis politik mengatakan pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo dalam bursa Pilpres 2024 bagaikan "buah simalakama" dalam mendulang suara pemilih.

Di satu sisi, keberadaan Gibran akan mendongkrak elektabilitas Prabowo dengan "efek Jokowi", tapi efek ini bisa berbalik menjadi "momok negatif" terutama di kalangan pemilih muda.

Sebab, Gibran muncul lantaran adanya dugaan "rekayasa hukum", dan dianggap belum cukup matang

secara politik untuk sebuah jabatan sekelas wakil presiden. Di sisi lain, tim Prabowo Subianto meyakini pemilihan Gibran Rakabuming Raka justru akan memberikan sentimen positif.

Namun, ternyata spekulasi tersebut terjawab dengan terpilihnya Prabowo-Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalahkan Anies-Muhaimin dengan raihan 96.214.691 suara atau sekitar 58,59 persen dari total suara sah nasional, serta memenuhi 20 persen suara di 38 provinsi Indonesia.

Dilantik Jadi Presiden

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terlantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

Pelantikan ini juga dibuka oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Prabowo dan Gibran kemudian mengucapkan sumpah sebagai presiden dan wakil presiden. Prabowo berjanji untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan adil, sementara Gibran menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajibannya sebagai wakil presiden.

Setelah menandatangani berita acara pelantikan, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta Prabowo dan Gibran melakukan pertukaran tempat duduk. Acara selanjutnya yaitu pidato presiden ke-8, Prabowo Subianto, menghadap anggota DPR RI, DPD RI, pejabat undangan, serta tamu dari negara-negara sahabat. Dalam pidatonya, ia mengangkat berbagai isu, termasuk korupsi, kemiskinan, swasembada pangan dan energi, hilirisasi komoditas, serta masalah Palestina.

Pesta Rakyat Menyambut Presiden Indonesia

Acara pelantikan akan teriringi dengan pesta rakyat di Jakarta, mencakup kawasan Senayan, FX Sudirman, hingga Monumen Nasional (Monas), di mana masyarakat dapat menikmati berbagai pertunjukan untuk menyambut presiden dan wakil presiden baru. Sebanyak 13 panggung telah tersedia untuk acara ini.

Sebaran 13 titik lokasi panggung sebagai berikut:

1. Titik1 Panggung Sumatera: Depan Gedung BRI
2. Titik2 Panggung Kalimantan: Depan Mid Plaza
3. Titik3 Panggung Sulawesi: Depan Gedung BNI Tower
4. Titik4 Panggung Nusantara: Depan Gedung Plaza Indonesia (Bundaran HI)
5. Titik5 Panggung Jawa: Depan Gedung Sarinah
6. Titik6 Panggung Papua: Bundaran Patung Kuda
7. Titik7 Panggung Merah Putih: Taman Pandang Istana Merdeka
8. Titik8 Panggung Rakyat: Depan Hotel Mandarin Oriental
9. Titik9 Panggung Rakyat: Depan Darma Intiland
10. Titik10 Panggung Rakyat: Depan Gedung Jaya
11. Titik11 Panggung Rakyat: Area Chillax
12. Titik12 Panggung Rakyat: Pintu 6 Gelora Bung Karno
13. Titik13 Panggung Rakyat: Depan FX Sudirman

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa panggung rakyat akan berlangsung dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, menggantikan kegiatan car free day (CFD) yang dibatalkan.



Setelah pelantikan, Prabowo dan Gibran juga menuju Istana Merdeka untuk serah terima jabatan dengan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Usai prosesi, Prabowo bersama beberapa menteri mengantar Jokowi ke Bandara Halim Perdanakusuma untuk kembali ke Solo, kampung halamannya, bersamaan dengan atraksi pesawat militer. Jokowi mengungkapkan bahwa ia juga menyerahkan “seutuhnya impian, harapan, dan cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia” kepada Prabowo, yang harapannya akan menghadapi berbagai tantangan besar dalam pemerintahan mendatang.

Mengenal Asta Cita

Prabowo-Gibran mengusung 8 misi atau Asta Cita yang berisikan tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi. Ada juga soal pemantapan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan hingga ekonomi kreatif.

Prabowo-Gibran juga berjanji memperkuat pembangunan SDM, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi demi negeri, meningkatkan lapangan kerja hingga soal reformasi politik, hukum dan birokrasi.

Berikut Asta Cita Prabowo-Gibran:

- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia

(HAM).

- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

17 Program Prioritas Prabowo

Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah menyusun 17 program prioritas guna menyongsong Indonesia maju dan mewujudkan Indonesia emas 2045. Mulai dari swasembada beras hingga penguatan UMKM akan dilakukan. Berikut 17 program Prabowo-Gibran:

1. Swasembada Pangan, Energi, dan Air

Prabowo menekankan pentingnya kemandirian dalam produksi pangan, dengan target memperluas lahan panen hingga 4 juta hektare pada 2029. Tata kelola air yang baik juga ditekankan, untuk memastikan ketersediaan air saat musim kemarau dan mengurangi risiko bencana saat musim hujan. Di bidang energi, mereka yakin Indonesia dapat menjadi pemasok utama energi hijau dunia melalui pengembangan biodiesel, bioavtur, dan energi terbarukan.

2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara

Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen memperkuat sistem penerimaan negara, sejalan dengan amanat Pasal 23A UUD 1945, guna mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi

Reformasi politik akan difokuskan pada pemberantasan politik uang dan peningkatan akses politik yang adil. Di bidang hukum, mereka akan menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan kepastian hukum. Reformasi birokrasi dilakukan dengan memperkuat digitalisasi dan sistem satu data terpadu.

4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Korupsi dipandang sebagai penghambat pembangunan, sehingga pemerintahan ini akan fokus pada upaya pemulihan keuangan negara dan pemberantasan korupsi yang menyeluruh.

5. Pemberantasan Kemiskinan

Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama, dan pengurangan kemiskinan relatif hingga di bawah 6% pada akhir masa jabatan.

6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Mereka akan memperkuat langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan menyeluruh, termasuk meningkatkan kesadaran dari tingkat keluarga.

7. Pelayanan Kesehatan untuk Semua

Program BPJS Kesehatan akan diperkuat dengan dukungan penyediaan obat yang memadai untuk seluruh rakyat.

8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi

Dana riset dan inovasi akan ditingkatkan hingga 2% dari PDB, disertai kebijakan yang mendukung investasi di bidang pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi.

9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara

Keamanan nasional diprioritaskan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan memperkuat hubungan internasional yang sehat.

10. Kesetaraan Gender dan Perlindungan Kelompok Rentan

Pemerintah akan memperkuat kebijakan yang melindungi hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.

11. Pelestarian Lingkungan Hidup

Prabowo-Gibran akan mempercepat upaya pencapaian target net zero emission dan pengurangan jejak karbon, serta mempromosikan penggunaan teknologi bioplastik.

Ketersediaan Pupuk dan Benih bagi Petani

Ketersediaan dan akses pupuk, benih, dan pestisida untuk petani akan dijamin guna mendukung swasembada pangan.

12. Rumah Murah dan Sanitasi bagi Masyarakat

Pemerintahan ini akan membangun atau merenovasi 40 rumah per desa/kelurahan per tahun, dengan target tiga juta rumah dalam masa jabatan.

13. Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM

Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM akan menjadi prioritas, termasuk melalui program kredit usaha untuk sektor pertanian, perikanan, dan startup milenial. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga akan diteruskan.

14. Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim

Hilirisasi nikel dan sumber daya lainnya akan dilanjutkan untuk membuka lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

15. Kerukunan Antarumat Beragama dan Kebebasan Beribadah

Pemerintahan akan memastikan kerukunan antarumat beragama dan kebebasan beribadah, serta memperhatikan perawatan rumah ibadah.

16. Pelestarian Seni Budaya dan Peningkatan Ekonomi Kreatif

Pelestarian seni budaya, penguatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga menjadi bagian penting dari agenda nasional mereka, dengan dukungan dana abadi kebudayaan.



PILKADA JAKARTA DAN ANIES *EFFECT*

Pilkada Jakarta tidak hanya sekadar pertarungan pengaruh antara Prabowo- Jokowi vs Anies Baswedan. Tapi, Pilkada Jakarta wujud rasa kekecewaan masyarakat atas proses demokrasi yang tidak sehat.

Proses pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah di seluruh Indonesia telah digelar pada Rabu, 27 November 2024. Dan sejumlah lembaga survei melalui hitung cepatnya atau *quick count* telah mengumumkan siapa-siapa yang menjadi pemenang dalam pertarungan memperebutkan kursi pemimpin daerah dari gubernur hingga bupati/ walikota.

Berdasarkan hasil *quick count* dari sejumlah lembaga survei, koalisi gemuk yang didukung oleh kekuatan Prabowo dan Jokowi memenangkan pertarungan Pilkada 2024 dengan menguasai wilayah di seluruh pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Namun, kekuatan Jokowi dan Prabowo gagal untuk menaklukkan wilayah DKI Jakarta dengan kekalahan yang dialami oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang tidak mampu menandingi kekuatan dari pasangan Pramono-Rano.

Pramono-Rano, pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta 2024 sangat perkasa dengan perolehan suara yang tertinggi

dibanding dua pasangan calon yang lain, Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma-Kun. Keperkasaan pasangan Pramono-Rano ini dapat dilihat dari hasil hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei calon yang diusung PDI Perjuangan ini memperoleh suara 50 persen lebih. Yang berarti bisa jadi Pilkada Jakarta akan berlangsung satu putaran.

Misalnya hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Pramono-Rano diperingkat pertama dengan perolehan suara 50,10 persen, disusul Ridwan Kamil-Suswono 39,29 persen, dan Dharma-Kun 10,61 persen. Hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Charta Politica juga

sama menempatkan pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini perkasa di peringkat pertama dengan perolehan suara 50,15 persen, disusul Ridwan Kamil-Suswono 39,25 persen dan Dharma -Kun 10,61 persen.

Kekalahan pasangan ini jauh-jauh hari sebelum pencoblosan telah diprediksi akan mengalami kekalahan. Sebab dilihat dari hasil survei pasangan Ridwan Kamil-Suswono tingkat elektabilitas mereka stagnan dan bahkan mengalami penurunan. Berbeda dengan elektabilitas pasangan Pramono-Rano yang terus merangkak naik. Dan diperkuat di akhir-akhir masa kampanye mendapatkan dukungan dari mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan.

Seperti hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan bahwa elektabilitas paslon Ridwan Kamil-Suswono hanya ada diangka 39,1 persen, tertinggal dengan paslon Pramono-Rano yang tingkat elektabilitas mencapai 46 persen.

Dan prediksi hasil survei diatas tidak jauh dari hasil hitung cepat Pilkada Jakarta, yang menempatkan pasangan Pramono-Rano diposisi teratas. Bahkan dengan kemenangan yang cukup mengejutkan dengan perolehan suara lebih dari 50 persen.

Mesin Partai Tidak Optimal

Mengamati proses jalannya pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 ini sangat menarik, terutama saat menentukan pasangan calon yang akan dijagokan. Yang paling menjadi pusat perhatian oleh berbagai kalangan adalah drama penjegalan terhadap Anies Baswedan.

Setelah dinyatakan kalah dalam pertarungan Pilpres 2024 lalu, Anies Baswedan kembali mendapatkan



dukungan dari beberapa partai politik untuk kembali bertarung pada Pilkada Jakarta. Dukungan datang dari Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan, pada saat itu PKS mendeklarasikan akan mengusung duet Anies Baswedan-Shohibul Iman (AMAN). Dengan modal dukungan tersebut dipastikan Anies akan mendapatkan tiket untuk bertarung kembali menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta.

Namun, dukungan tersebut tiba-tiba berubah, sejumlah partai politik yang awalnya mendukung Anies ramai-ramai meninggalkannya. Dan memilih bergabung dengan koalisi yang dibentuk oleh kekuatan Prabowo yang dinamakan KIM PLUS. Dan titik temu dari koalisi gemuk ini memunculkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang merupakan kader dari Partai Golkar dan PKS.

Keputusan PKS bergabung dengan KIM Plus dan meninggalkan Anies pada saat itu sangat mengejutkan. Sebab, publik menilai PKS dan Anies memiliki kedekatan dan memiliki garis perjuangan yang sama. Alasan PKS meninggalkan Anies seperti

disampaikan oleh Juru Bicara PKS Muhammad Khalid duet AMAN berakhir karena hingga batas waktu yang ditentukan Anies tidak bisa mengajak partai politik lain untuk bersepakat mengusung pasangan AMAN.

Khalid mengatakan berdasarkan kesepakatan awal, bila hingga batas waktu Anies tak kunjung mendapatkan cukup perahu untuk maju di Pilkada maka dukungan PKS otomatis berakhir. “Sejak masa tenggat habis 4 Agustus, sampai detik ini pun belum ada SK rekomendasi dari partai lain untuk Mas Anies. Jadi PKS memilih untuk menyiapkan rencana opsi kedua,” jelasnya.

Pasangan Ridwan Kamil-Suswono diusung oleh 12 partai politik yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, Partai NasDem, PKB, PSI, Partai Demokrat, PAN, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo dan PPP. Koalisi gemuk yang dibangun ternyata tidak berkerja optimal. Mesin politik dari masing-masing partai pengusung tidak dijalankan dengan baik, sehingga perjuangan untuk memenangkan pasangan RK-Suswono dijalankan dengan setengah hati. Alhasil,

pasangan RIDO berdasarkan hitung cepat lembaga survei menempati urutan kedua.

Kekalahan RK-Suswono ini salah satu penyebabnya adalah mesin-mesin partai pengusung tidak bekerja optimal, mereka hanya sekadar memberikan tiket dukungan yang tidak dibarengi dengan kerja-kerja politik yang nyata agar masyarakat Jakarta menjatuhkan pilihannya ke pasangan RK-Suswono.

Pakar komunikasi politik dari LSPR, Prof. Lely Arrianie dalam talkshow GenzMemilih bertajuk *Siapa Unggul di Pilgub 2024?* Rabu (27/11) mengatakan dukungan koalisi yang besar bukan jaminan menjadi pemenang. Menurutnya untuk memastikan kemenangan tersebut bagaimana kemampuan partai-partai tersebut mengkonversi dukungan tersebut menjadi suara pemilih. Maka itu, perlu kerja nyata dengan menjalankan mesin-mesin partai secara optimal. “Karena tadi logikanya kalau misalnya dia didukung oleh 12 partai, semuanya bergerak, harusnya dia sudah bisa 58 persen,” ujarnya.

Dugaan tidak optimalnya mesin partai untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono dibenarkan oleh Ketua DPP Partai

Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menurutnya kinerja mesin partai politik pendukung pasangan RIDO kurang optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan logistik yang dimiliki partai politik. “Kami percaya partai pengusung bagus-bagus semua, tapi kemarin nampunya belum optimal,” ujarnya di Jakarta, Jumat (29/11).

Melihat hasil hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, dia masih berharap agar pelaksanaan Pilkada Jakarta bisa berlanjut dua putaran. Tapi jika nanti, keputusan KPU menetapkan Pilkada Jakarta berlangsung satu kali putusan harus dihormati, sebab ini adalah pilihan dari warga Jakarta.

“saya, secara pribadi berharap dua putaran. Kalau diputuskan satu putaran kita harus hormati putusan warga,” ujarnya.

Namun, isu tidak optimalnya mesin partai pengusung pasangan RIDO dibantah secara tegas Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria. Menurutnya seluruh partai pengusung sudah solid bergerak untuk memenangkan pasangan RIDO.

“Partai pengusung dari paslon nomor satu solid dan kompak berjuang memenangkan pasangan RIDO,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor DPD Golkar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Dia menegaskan selama proses menuju pemilihan suara semua partai pengusung pasangan RIDO bekerja secara maksimal dengan turun ke masyarakat guna memastikan kemenangan akan diraih. “Semua bekerja, partai politik anggota KIM Plus bekerja untuk menangkan pasangan RIDO,” tegasnya.

Riza kembali menegaskan jika

ada yang menyatakan mesin partai pengusung pasangan RIDO tidak bekerja optimal itu penilaian yang tidak benar. Sebab, setiap hari, mesin partai anggota KIM Plus tidak pernah berhenti bergerak.

“Tak hanya di kantor ini, kita evaluasi dan rapat, tapi juga di lapangan. Seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai tingkat RT/RW. Seluruh partai, ormas, dan grup bekerja,” jelasnya.

Pengaruh Anies Masih Kuat

Pilkada Jakarta 2024 menjadi pertarungan pengaruh antara Prabowo-Jokowi vs Anies Rasyid Baswedan. Mereka adalah dua kekuatan yang bersebrangan dari Pilpres dan berlanjut hingga Pilkada. Bahkan, gagalnya Anies mendapatkan tiket untuk bertarung di Pilkada Jakarta ada cawe-cawe dari Jokowi.

Jokowi diduga menjadi kekuatan besar yang menekan partai-partai politik seperti PKB, NasDem dan PKS agar tidak mengusung Anies pada Pilkada 2024. Padahal, ketiga partai tersebut awalnya bersepakat akan mengusung Anies. Saat PDI Perjuangan akan mengusung Anies pun, pihak istana pada saat diduga menghalangi, dan sebagai jalan keluarnya PDI Perjuangan memajukan nama Pramono Anung. Padahal, jika melihat tingkat elektabilitasnya Pramono sangat kecil dibanding, Anies atau Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Keputusan PDI Perjuangan saat ini dinilai nekat, karena calon yang dihadapi saat itu adalah Ridwan Kamil yang tingkat elektabilitas sebagai calon Gubernur Jakarta terbilang tinggi.

Kenekatan PDI Perjuangan ini tidak bisa dipisahkan dari sikap Jokowi. Pasalnya Presiden Jokowi terlihat tidak mempersoalkan jika partai



Lely Arrianie

banteng ini mengusung Pramono Anung. Dan benar, majunya Pramono mendapatkan restu langsung dari istana, hal tersebut langsung disampaikan Pramono sendiri, bahwa Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi memberikan restu kepadanya untuk bertarung pada Pilkada Jakarta 2024.

Pramono mengatakan telah meminta izin kepada Presiden Jokowi sebanyak dua kali. Izin pertama Jokowi mengatakan “mas tidak banyak yang dapat kesempatan ini, jadi maju,” ujar Pramono menirukan apa yang disampaikan Jokowi. Besok harinya, dia pun kembali meminta izin ke presiden karena permintaan partai, dan Jokowi pun kembali memberikan restu, “maju saja,” kata Pram kepada awak media di KPUD Jakarta.

Gagalnya Anies masuk dalam pertarungan Pilkada Jakarta 2024 membuka peluang bagi Ridwan Kamil untuk dengan mudah memenangkan pertarungan tersebut. Ditambah dengan dukungan politik yang sangat kuat dengan koalisi gemuknya, serta dukungan dari penguasa yakni dari Presiden Prabowo, serta dukungan dari mantan presiden RI ke-7, Jokowi.

Namun yang terjadi malah sebaliknya, tingkat elektabilitas Ridwan Kamil yang perpasangan dengan Suswono tak kunjung melesat tinggi, bahkan terlihat stagnan. Justru, yang tidak pernah diprediksi pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Pramono-Rano terus mengejar dan menyalip pesaingnya, yakni pasangan RIDO.

Hal tersebut bisa dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam survei terakhirnya menunjukkan bahwa pasangan Pramono-Rano semakin dicintai rakyat, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat elektabilitas yang terus naik



hingga diangka 46 persen. Sebaliknya, pasangan RIDO stagnan dan cenderung merun dengan tingkat elektabilitas diangka 39,1 persen.

Turunnya tingkat elektabilitas pasangan RIDO menjadi perhatian Jokowi. Untuk kembali menaikan elektabilitas pasangan RIDO, Jokowi hingga turun gunung. Dari Solo ke Jakarta dengan mengumpulkan para relawan untuk kembali bekerja sekuat tenaga agar pasangan yang tersebut bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024.

Presiden ke-7 RI ini meminta kepada relawan untuk segera bergerak untuk misi pemanangan. Hal itu Jokowi sampaikan dalam acara bersama RK dan para relawan di Jakarta Pusat, Senin (18/11). Di hadapan para relawan memastikan mendukung mantan Gubernur Jawa Barat karena memiliki rekam jejak yang jelas. Dan

memiliki kapasitas sebagai pemimpin yang tepat untuk Jakarta, karena RK memiliki pengalaman sebagai Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat. “Secara rekam jejak punya, secara ilmu punya, kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi?” kata Jokowi.

Maka itu, Jokowi meminta kepada relawan RIDO berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan pasangan RIDO di Pilkada Jakarta 2024. Gerakan yang masif dari para relawan inilah menurut Jokowi akan membawa kemenangan. Dia mencontohkan bahwa kemenangan di Pilpres 2024 berkat kerja masif dari relawan.

Membaca pengaruh Jokowi yang tidak mampu mendongkrak elektabilitas pasangan RIDO, maka memaksa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto turun gunung. Langkah untuk memenangkan pasangan RIDO, Prabowo langsung

mengeluarkan surat resmi yang isinya meminta agar warga Jakarta untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.

Isi dari surat resmi yang dikeluarkan Prabowo pada intinya meyakinkan warga Jakarta bahwa pasangan RIDO adalah sosok yang tepat memimpin Jakarta untuk lima tahun kedepan. *“Saudaraku, Anda adalah ujung tombak bangsa dan negara sekarang, apa yang terjadi di Jakarta akan mempengaruhi seluruh Indonesia. Saya yakin bahwa saudara kita, pasangan H M RIDWAN KAMIL-H SUSWONO [RIDO], adalah dua putera Indonesia yang terbaik,”* demikian isi sebagian suratnya.

Menurut pengamat politik Rocky Gerung keputusan Presiden Prabowo untuk turun tangan di detik-detik terakhir masa kampanye mencerminkan kepanikan dalam kubu pendukung Ridwan Kamil.

Rocky mengkritik langkah Presiden Prabowo yang seolah dipaksakan. *“Kesannya ini seperti keadaan darurat. Beliau pulang dari luar negeri, mempercepat tugasnya hanya untuk membuat surat dukungan ini,”* ujar Rocky dalam channel Youtubenya dikutip Selasa 26 November 2024. Menurut Rocky, langkah yang dilakukan Prabowo sedang memperlihatkan adanya tekanan besar untuk memastikan kemenangan Ridwan Kamil-Suswono.

Bagaimana tidak panik, Anies Baswedan yang memiliki basis massa yang besar memutuskan untuk mendukung pasangan Pramono-Rano. Dukungan tersebut Anies sampaikan pada kegiatan apel siaga dan rapat akbar warga kawal TPS di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan.

Pada kampanye tersebut, Anies mengungkapkan deklarasi dukungannya terhadap pasangan yang diusung PDI Perjuangan. untuk menang dalam Pilkada Jakarta 2024.

Anies juga menyampaikan, Pramono-Rano telah berkomitmen melanjutkan dan menuntaskan program-program gubernur terdahulu. Anies pun berharap, jika paslon yang diusung PDIP ini terpilih bisa melanjutkan programnya tersebut.

“Mudah-mudahan keberlanjutan program-program di Jakarta akan bisa berjalan baik di bawah kepemimpinan Mas Pram besok,” ujar Anies.

Dukungan Anies kepada Pramono-Rano ternyata lebih memiliki pengaruh dibanding dukungan Prabowo dan Jokowi kepada pasangan RIDO. Hal tersebut telah terjawab melalui hasil hitung cepat yang dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei yang menyatakan bahwa pasangan Pramono-Rano menjadi pemenang. Bahkan, kemenangan pasangan yang diusung PDI Perjuangan cukup mengejutkan, pasalnya Pilkada Jakarta diprediksi satu putaran.

Kuatnya pengaruh Anies dalam kemenangan yang diraih oleh pasangan Pramono-Rano itu diakui oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali

Sera. Menurutnya keunggulan suara pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini karena efek dukungan dari sosok Anies Baswedan. *“Bahwa Anies punya efek? It’s a fact. Tapi PKS sebagai partai harus maju dan tumbuh ke depan. Tidak harus bergantung pada satu orang,”* katanya kepada awak media di Gedung Parlemen Senayan, Kamis (28/11).

Kekalahan pasangan RIDO pada Pilkada Jakarta 2024 menjadi tamparan keras bagi Prabowo dan Jokowi. Pasalnya meskipun mereka telah gurun ternyata warga Jakarta tidak bisa diarahkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh ke dua tokoh ini di wilayah Jakarta tidak begitu besar. Berbeda dengan Anies, kemenangan Pramono-Rano menyakinkan Anies bahwa dirinya masih ada di hati warga Jakarta. Secara politik ini bisa menjadi kekuatan Anies untuk bangkit dan kembali bertarung pada Pilpres 2029 nanti.

Gerakan Anak Abah berhasil?

Soal Pilkada Jakarta 2024 tidak



hanya dilihat siapa pemenangnya. Tapi juga perlu dicermati seberapa besar tingkat partisipasi warga dalam memilih pesta demokrasi daerah tersebut.

Berdasarkan tingkat partisipasi warga pada Pilkada Jakarta 2024 tergolong rendah. Pasalnya kelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput sangat tinggi. Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, ada 8.214.007 orang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebar di 14.835 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Realita pascapenghitungan yang dilakukan oleh KPU Jakarta, angka partisipasi memilih hanya 53,05 persen. Artinya, persentase golput di Jakarta sebanyak 46,95 persen atau setara dengan 3,8 juta jiwa. Angka ini menjadi persentase tertinggi sepanjang sejarah golput di Jakarta.

Rendahnya partisipasi warga Jakarta dalam menggunakan hak pilihnya bisa jadi karena mereka memandang bahwa tidak ada calon yang mereka akan pilih. Atau bisa jadi gerakan Golput yang tinggi wujud rasa kekecewaan mereka atas proses demokrasi di Jakarta yang tidak berjalan sehat yang berujung pada gagalnya Anies Baswedan menjadi calon gubernur yang turut bertarung pada Pilkada Jakarta 2024.

Seperti yang ditunjukkan sejumlah lembaga survei tingkat keterpilihan Anies untuk kembali memimpin Jakarta sangat tinggi. Seperti hasil survei Indikator Politik Indonesia Anies menempati peringkat tertinggi sebagai bakal calon gubernur, disusul Ahok kemudian Ridwan Kamil. Dalam simulasi semi terbuka 40 nama calon, elektabilitas Anies teratas dengan angka 41,7 persen, disusul Ahok (27 persen) lalu Ridwan Kamil (15,4



persen).

Gagalnya Anies mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta 2028 memunculkan gerakan Anak Abah memilih untuk golput pada Pilkada DKI Jakarta dengan mengajak para pendukung Anies untuk mencoblos ketiga pasangan calon.

Menurut pakar Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati munculnya narasi gerakan 'anak abah' coblos tiga paslon adalah bentuk ekspresi politik dari para pendukung Anies Baswedan. Menurutnya, meskipun narasi itu berasal dari pendukung Anies, wacana tersebut kemungkinan besar tidak secara khusus ditujukan atau mengarah pada paslon tertentu dalam konteks politik Pilgub Jakarta.

Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa ekspresi politik itu cenderung bersifat umum dan tidak secara langsung mendukung atau menyerang paslon lain secara spesifik. "Saya pikir narasi itu lebih pada ekspresi politik para pendukung Anies Baswedan yang mungkin tidak mengarah pada paslon

tertentu," ujarnya dikutip *Katadata.co.id*

Tingginya Golput Pilkada Jakarta 2024 merupakan angka Golput tertinggi sepanjang sejarah Pilkada Jakarta. Ini bisa dikaitkan dengan keberhasilan gerakan Anak Abah yang merasa kecewa tokoh yang mereka cintai tidak mengikuti kontestasi Pilkada karena adanya penjejalan yang dilakukan oleh kekuasaan yang besar. Demokrasi akan berjalan dengan murni jika upaya-upaya penjejalan putra putra terbaik daerah tidak lagi terulang lagi. Pilkada ada proses mencari pemimpin daerah yang terbaik dalam rangka untuk memajukan daerah mereka masing-masing.

Maka itu, berikan kesempatan yang luas kepada putra putra daerah untuk bertarung dalam pesta demokrasi tersebut. Semoga tidak terjadi pengkondisian yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan tertentu, sehingga partai politik yang memiliki kader yang kompeten gagal untuk menjadi calon kepala daerah. Bahkan pengkondisian tersebut akhirnya melahirkan calon-calon tunggal.



DESAKAN DUNIA HENTIKAN GENOSIDA DI PALESTINA

Setiap manusia memiliki hak untuk kebebasannya, baik dalam beragama, berbangsa dan bernegara, setiap manusia juga berhak atas kehidupan yang layak, aman, tentram dan damai, dan setiap manusia juga berhak untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Tetapi hal itu tidak dapat dirasakan oleh semua manusia, mereka kehilangan semua hak yang seharusnya mereka dapatkan. Konflik yang terjadi hingga menyasar ke orang-orang yang tidak berdosa pun ikut menjadi korban.

Anak-anak kehilangan masa kecil

yang seharusnya mereka hidup dengan segala kebahagiaan didalamnya, mereka kehilangan keluarga, tempat tinggal, tempat bermain dan segala hal yang direnggut karena peperangan demi peperangan, pertempuran demi pertempuran yang menimpa mereka.

Begitulah kondisi orang-orang Palestina khususnya wilayah Gaza yang digempur terus-menerus oleh Zionis Israel pada saat ini, mereka yang seharusnya dapat tersenyum melihat langit biru, dipatahkan oleh debu reruntuhan bangunan yang hancur akibat ledakan rudal, langit malam yang seharusnya penuh bintang-

bintang, sekarang dipenuhi oleh rudal-rudal yang beterbangan siap menghantam mereka.

Berangkat dari kesengsaraan masyarakat Palestina tersebut, pada awal tahun 2024, Afrika Selatan menggugat Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) dengan tuduhan Israel melakukan genosida di Gaza, Palestina.

Meski tidak menghentikan perang dan hanya berujung perintah agar Israel tidak melakukan genosida, sidang ini merupakan proses pengadilan pertama Israel dengan tuduhan genosida. Hingga awal Juli

2024 tercatat hampir 40 ribu jiwa tewas akibat serangan Israel ke Palestina.

Dalam KBBI, genosida didefinisikan sebagai pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Secara etimologis genosida berasal dari bahasa Yunani *geno*, yang berarti ras atau suku, dan *cide* (*sida*), dari bahasa Latin yang berarti pembantaian.

Istilah genosida pertama kali digagas oleh pengacara Yahudi dari Polandia bernama Raphael Lemkin pada tahun 1944. Lemkin menggambarkan genosida sebagai rencana yang terkoordinasi disertai aksi yang bertujuan memusnahkan kelompok-kelompok masyarakat secara nasional.

Kata genosida pertama kali digunakan dalam dokumen tertulis pada dakwaan kepada pimpinan Nazi atas kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahun 1945, di Nuremberg, Jerman. Pencantuman kata genosida dalam dakwaan tersebut bukan merupakan istilah hukum melainkan hanya sebagai istilah deskriptif.

Perhatian dunia terhadap kejahatan genosida berawal dari Holocaust, istilah untuk menyebut aksi pembantaian Nazi terhadap 6 juta orang Yahudi Eropa, dan orang-orang yang dianggap tidak layak di Jerman seperti seniman, pendidik, orang Romawi, komunis, homoseksual, hingga orang yang cacat secara mental dan fisik. Holocaust juga disebut “Shoah”, kata Ibrani yang berarti malapetaka.

Rangkaian Holocaust dimulai ketika Adolf Hitler dan Partai Nazi memimpin Jerman pada Januari 1933 dan bertekad membuat semua orang tunduk pada Jerman sebagai ras superior. Pembantaian kaum Yahudi Eropa secara masif dan terstruktur terjadi pada kurun 1941-1945.

Holocaust berakhir pada Mei 1945 ketika Kubu Sekutu mengalahkan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.

Pembantaian kaum Yahudi oleh Nazi berdasarkan antisemitisme atau prasangka buruk. Nazi menuduh orang Yahudi sebagai biang kekalahan Jerman di Perang Dunia I (1914-1918). Mereka dianggap sebagai penyebab masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya Jerman. Ide Nazi ini diterima oleh masyarakat Jerman lantaran kekecewaan terhadap Pemerintahan Weimar (1918-1933). Rakyat Jerman juga masih terluka akibat kekalahan perang dan ekonomi yang rapuh.

Diskriminasi terhadap kaum Yahudi Eropa merupakan antisemitisme lama yang diangkat kembali. Pada abad pertengahan antara tahun 500-1400, muncul kepercayaan di penganut Kristen yang menyebut kaum Yahudi bertanggung jawab terhadap kematian Yesus. Prasangka ini berlanjut hingga abad ke-19.

Antisemitisme terhadap kaum yahudi meluas tak hanya persoalan agama. Kaum Yahudi terkucil dari masyarakat Eropa dan dianggap sebagai biang keladi penyakit sosial, politik, dan ekonomi. Kebencian terhadap kaum Yahudi semakin dibenarkan oleh teori ras, dan Darwinisme Sosial yang dimanfaatkan oleh Nazi untuk propaganda mereka.

Pada 9 Desember 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Konvensi ini menetapkan genosida sebagai suatu kejahatan internasional, dan negara-negara yang turut menandatangani dituntut untuk mencegah dan menghukum kejahatan ini. Larangan genosida ini tertuang dalam Pasal 1 Konvensi Genosida 1948 yang menyatakan, genosida dilarang

untuk dilakukan baik dalam waktu perang maupun dalam masa damai.

Dalam poin-poin kesepakatan Konvensi Genosida 1948, definisi genosida dipertegas sebagai tindakan apa pun yang dilakukan untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama. Aksi ini meliputi antara lain membantai kelompok, menyebabkan kerusakan fisik dan mental serius kepada anggota kelompok, hingga secara paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain.

Dalam perkembangannya, pengertian genosida tertuang dalam statuta International Criminal Court (ICC) dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 8 UU Pengadilan HAM, definisi genosida serupa dengan yang tertuang dalam Konvensi Genosida 1948.

Meski sama-sama kejahatan yang menghabiskan nyawa manusia, genosida berbeda dengan kejahatan terhadap manusia biasa. Genosida merupakan kejahatan yang menyasar pada kelompok seperti bangsa, ras, etnis, maupun agama, sementara kejahatan terhadap manusia biasa hanya menyasar kepada warga negara atau penduduk sipil.

Secara hukum, kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap manusia biasa. Kejahatan genosida menyasar pada kelompok seperti bangsa, ras, etnis, maupun agama, sementara kejahatan terhadap manusia biasa tertuju pada warga negara dan penduduk sipil.

Sejarah Singkat Israel

Setelah kekalahan Jerman, Sekutu memulangkan jutaan orang ke negara asal mereka, tetapi banyak

penyintas Holocaust yang menolak kembali. Selain kehilangan keluarga dan harta benda, para penyintas harus menghadapi trauma berat dan antisemitisme di kampung halaman. Para penyintas juga menghadapi aksi kekerasan, salah satunya kasus pembantaian 42 orang penyintas Holocaust dalam kerusuhan antisemit di Kielce, Polandia, Juli 1946.

Penyintas yang enggan kembali ke kampung halaman memilih menuju wilayah Eropa yang telah dibebaskan sekutu. Namun, impian mereka sulit terwujud, pembatasan imigrasi terjadi di banyak negara termasuk wilayah Mandat Palestina yang berada di bawah kendali Inggris. Dampaknya, banyak penyintas Holocaust ditampung di kamp pengungsi terlantar. Puncaknya pada tahun 1947 terdapat 250.000 pengungsi terlantar Yahudi.

Nasib para penyintas Yahudi yang terlantar menimbulkan perdebatan antara Inggris dan Amerika Serikat. Pada 1945, perwakilan Amerika Serikat untuk Komite Antarpemerintah untuk Pengungsi, Earl G. Harrison, memberikan laporan investigasi yang menyebut perlakuan tidak pantas terhadap para pengungsi terlantar Yahudi. Menurutnya para pengungsi ingin pergi ke wilayah Mandat Palestina.

Dari hasil laporan Harrison muncul petisi yang berujung desakan Presiden AS, Harry S. Truman kepada Inggris untuk mengizinkan 100.000 Pengungsi Telantar Yahudi bermigrasi ke wilayah Mandat Palestina. Perdana Menteri Inggris, Clement Attlee, dengan tegas menolak dan memperingatkan Truman tentang ancaman serius terhadap hubungan Inggris-AS bila pemerintah AS mendukung imigrasi Yahudi ke wilayah Mandat Palestina.

Dalam situasi yang serba tidak pasti



di antara pengungsi, gerakan Zionisme modern berkembang. Nama “Zion” berasal dari Alkitab Ibrani sebagai nama untuk Israel. Gerakan politik ini mendukung pembentukan negara Yahudi otonom di Israel. Menurut Zionisme, wilayah Mandat Palestina merupakan milik orang Yahudi selama lebih dari 4.000 tahun sesuai agama Yahudi dan Alkitab Ibrani.

Setelah kekalahan Jerman, Sekutu memulangkan jutaan orang ke negara asal mereka, tetapi banyak penyintas Holocaust yang menolak kembali. Selain kehilangan keluarga dan harta benda, para penyintas harus menghadapi trauma berat dan antisemitisme di kampung halaman. Para penyintas juga menghadapi aksi kekerasan, salah satunya kasus pembantaian 42 orang penyintas Holocaust dalam kerusuhan antisemit di Kielce, Polandia, Juli 1946.

Penyintas yang enggan kembali ke kampung halaman memilih menuju wilayah Eropa yang telah dibebaskan sekutu. Namun, impian mereka sulit terwujud, pembatasan imigrasi terjadi

di banyak negara termasuk wilayah Mandat Palestina yang berada di bawah kendali Inggris. Dampaknya, banyak penyintas Holocaust ditampung di kamp pengungsi terlantar. Puncaknya pada tahun 1947 terdapat 250.000 pengungsi terlantar Yahudi.

Nasib para penyintas Yahudi yang terlantar menimbulkan perdebatan antara Inggris dan Amerika Serikat. Pada 1945, perwakilan Amerika Serikat untuk Komite Antarpemerintah untuk Pengungsi, Earl G. Harrison, memberikan laporan investigasi yang menyebut perlakuan tidak pantas terhadap para pengungsi terlantar Yahudi. Menurutnya para pengungsi ingin pergi ke wilayah Mandat Palestina.

Dari hasil laporan Harrison muncul petisi yang berujung desakan Presiden AS, Harry S. Truman kepada Inggris untuk mengizinkan 100.000 Pengungsi Telantar Yahudi bermigrasi ke wilayah Mandat Palestina. Perdana Menteri Inggris, Clement Attlee, dengan tegas menolak dan memperingatkan Truman tentang ancaman serius



terhadap hubungan Inggris-AS bila pemerintah AS mendukung imigrasi Yahudi ke wilayah Mandat Palestina.

Dalam situasi yang serba tidak pasti di antara pengungsu, gerakan Zionisme modern berkembang. Nama “Zion” berasal dari Alkitab Ibrani sebagai nama untuk Israel. Gerakan politik ini mendukung pembentukan negara Yahudi otonom di Israel. Menurut Zionisme, wilayah Mandat Palestina merupakan milik orang Yahudi selama lebih dari 4.000 tahun sesuai agama Yahudi dan Alkitab Ibrani.

Warga Palestina Mulai Terusir

Pada peristiwa 15 Mei 1948, sedikitnya 750.000 orang Palestina terusir dari tempat tinggalnya. Rumah ratusan ribu warga Palestina diserang, dirusak, dan dijarah milisi Israel. Kelompok milisi Yahudi dipersenjatai senapan mesin hingga mortir yang menghancurkan ratusan desa orang-orang Arab.

Perang besar terjadi lagi pada tahun 1967. Arab kembali mengalami kekalahan dan menyebabkan wilayah Israel semakin luas. Dalam perang yang berlangsung enam hari, Israel menguasai wilayah Arab mencakup Semenanjung Sinai (Mesir), Dataran Tinggi Golan (Suriah), Tepi Barat, Jerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Sejak saat itu, bangsa Arab mulai realistis.

Pemimpin Palestina Yasser Arafat mendeklarasikan negara Palestina secara sepihak pada 15 November 1988. Saat itu terjadi peristiwa Intifada yakni perlawanan rakyat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Intifada berlangsung dua kali yakni Intifada I (1987-1991), dan Intifada II (2000-2005). Sejak dideklarasikan, sebanyak 145 negara dari 193 anggota PBB telah mengakui negara Palestina.

Berbagai upaya damai telah dilakukan, tetapi konflik terus terjadi. Human Rights Watch (HRW) mencatat, sejak 2007, Pemerintah Israel secara

sistematis telah menindas warga Palestina di Gaza. Menurut catatan Al Jazeera, serangan Israel ke Palestina sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan sekitar 38.345 orang, sebanyak 88.295 luka-luka, dan lebih dari 10.000 orang hilang (11/7/2024).

Pengalaman traumatis Perang Dunia II tidak lantas menjadikan bangsa Israel lebih manusiawi. Kekejaman Holocaust justru diadopsi Israel untuk menindas Palestina yang telah mendiami wilayah Israel-Palestina selama 1.200 tahun. Catatan sejarah menyebutkan, Bangsa Yahudi pernah eksis di tanah Israel-Palestina hanya selama 200 tahun.

Setahun Genosida Israel di Gaza Sejak Oktober 2023

Sejak serangan militer Israel meletus pada 7 Oktober 2023, tragedi kemanusiaan yang mengerikan terus berlangsung di Palestina. Hingga kini, setidaknya lebih dari 42 ribu orang

Palestina meninggal akibat serangan intens Israel yang terus berlangsung selama setahun terakhir.

Mengutip laporan Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), jumlah korban tewas Palestina menembus angka 42.334, dengan mayoritas korban berasal dari Jalur Gaza. Sebanyak 41.615 korban jiwa berada di Jalur Gaza dan 719 korban jiwa lainnya di Tepi Barat. Dari jumlah tersebut, 16.891 adalah anak-anak, yang menjadi salah satu kelompok paling rentan dalam konflik yang berkepanjangan ini. Selain itu, 11.458 wanita turut menjadi korban, dan lebih dari 10.000 orang masih hilang.

Serangan-serangan brutal yang dilakukan pihak Israel tersebut telah merusak infrastruktur pendidikan di Palestina, di mana 122 gedung sekolah dan perguruan tinggi hancur total, sementara 334 lainnya rusak sebagian.

Krisis sanitasi di Gaza telah menyebabkan peningkatan penyakit, terutama di kalangan anak-anak,

yang tinggal di lingkungan yang tidak layak. UNICEF, bersama dengan organisasi kemanusiaan lainnya, berupaya memperbaiki infrastruktur penting seperti stasiun pemompaan limbah, meski tantangan besar masih menghadang.

Sementara itu, Juru bicara PBB untuk wilayah Palestina, Jonathan Crickx, mengungkapkan, nasib anak-anak Palestina yang terpaksa menderita sebab situasi ini.

“Mereka tidak diizinkan menjalani kehidupan normal seperti anak-anak pada umumnya. Tidak ada pendidikan, permainan, atau kegembiraan. Bahkan, anak-anak berusia lima atau enam tahun harus mencari makanan untuk keluarga mereka,” ujarnya.

PBB Akui Israel Lakukan Genosida

Agresi militer Israel terhadap Palestina terus terjadi. Terbaru, PBB melalui sebuah komite khusus yang didirikan melaporkan bahwa metode peperangan Israel di Jalur Gaza sesuai

dengan ciri-ciri genosida.

Menurut laporan komite khusus tersebut yang dirilis pertengahan November 2024 kemarin mengatakan bahwa korban jiwa massal dan kondisi mengancam nyawa yang terjadi di Gaza dilakukan secara sengaja oleh militer Israel.

Pernyataan itu muncul bersamaan dengan laporan dari Human Rights Watch (HRW) yang menuduh pemindahan paksa warga Gaza oleh Israel sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kendati demikian, Israel menolak klaim HRW tersebut, dengan menyatakan bahwa upaya mereka hanya difokuskan untuk membongkar kemampuan teror Hamas, bukan terhadap penduduk Gaza.

Ini menjadi kali pertama PBB menyatakan perang Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 44.000 jiwa memenuhi kriteria sebagai genosida. Sebelumnya, lembaga-lembaga PBB jarang menggunakan istilah genosida untuk menyebut tindakan Israel tersebut.

Kemerdekaan Palestina

Kemerdekaan Palestina sesungguhnya sudah diproklamirkan oleh pemimpin PLO Yasser Arafat pada 15 November 1988 dalam sidang khusus Dewan Nasional Palestina di Algiers, Algeria. Ketika itu Arafat mendeklarasikan kemerdekaan bangsanya dengan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Negara Palestina.

Sejak Juni 2024, sudah 146 dari 193 negara anggota PBB mengakui kemerdekaan Palestina dan jumlah itu merupakan 75% dari negara-negara anggota PBB. Tiga negara terakhir yang mengakui kemerdekaan Palestina adalah Spanyol, Norwegia, dan Irlandia,





meskipun Amerika Serikat, Kanada, dan Israel tidak mengakuinya.

Bukti bahwa Negara Palestina sudah merdeka adalah hadirnya Kedutaan Besar Palestina di 83 dari 146 negara yang telah mengakui kemerdekaan Negara Palestina, termasuk Indonesia—tempat Palestina membuka kedutaan besarnya pada tahun 1990.

Pengakuan kemerdekaan Palestina oleh 146 negara dimaksud dipahami sebagai Negara Palestina yang terdiri dari Tepi Barat dan Gaza. Akan tetapi usai pemilihan legislatif pada 2006, pada 2007 Hamas mendirikan pemerintahannya sendiri di Gaza, terpisah dari pemerintahan Palestine Authority (PA) di Tepi Barat yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.

Sejak 2007 pemerintahan Hamas di Gaza dipimpin secara politik dari Qatar oleh Ismail Haniyeh yang sudah terbunuh pada 31 Juli 2024, sementara pasukan Hamas di Gaza dipimpin oleh Yahya Sinwar yang terbunuh pada 17

Oktober 2024.

Di PBB, komunitas internasional mengakui PLO sebagai “Non-member Observer” dan sebagai perwakilan rakyat Palestina sejak 1974; kemudian pada 1988 PBB mengakuinya sebagai Otoritas Palestina. Pada 2012 Sidang Umum PBB meningkatkan status Palestina menjadi “Non-member Observer State” atau negara peninjau non-anggota PBB. Dan sejak Juni 2024 sebanyak 146 anggota PBB sudah mengakui Palestina sebagai Negara Palestina yang merdeka secara politis.

Kenyataan itu mengindikasikan bahwa yang diperjuangkan komunitas internasional saat ini adalah Negara Palestina yang merdeka bukan hanya secara politis, tetapi merdeka dalam segala aspeknya, tanpa penindasan, tanpa terancam stabilitasnya, agar dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

Pemerintah Indonesia Terus Suarakan Kebebasan Palestina

Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan. Dengan berpegang pada prinsip anti penjajahan, anti penindasan, dan solidaritas global, Indonesia terus memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di tengah situasi yang makin memburuk akibat konflik.

“Kita punya prinsip kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina,” ucap Presiden Prabowo pada pidato pertamanya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo telah aktif mengirimkan sejumlah bantuan kemanusiaan

ke Palestina. Menurutnya, saat ini Indonesia telah mengirimkan sejumlah tenaga medis yang turut membantu di wilayah Gaza dan Rafah.

“Hari ini kita punya medis yang bekerja di Gaza, di Rafah, dengan risiko yang sangat tinggi. Dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerjasama di Rafah, di Gaza, bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab,” katanya.

Presiden Prabowo pun menyampaikan bahwa Indonesia siap mengirimkan bantuan tambahan serta mengevakuasi para korban perang, termasuk anak-anak yang mengalami trauma.

Prabowo juga menegaskan sikap Indonesia dalam politik luar negeri yang bebas aktif dan nonblok, serta menjalin persahabatan dengan semua negara tanpa ikut serta dalam aliansi militer manapun. Prinsip ini dijalankan dengan tujuan agar terjalin hubungan persahabatan yang erat dengan negara sahabat di kancah internasional.

“Kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara. Sudah berkali-kali saya canangkan Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik. *We want to be the good neighbor*,” katanya.

Pidato ini mempertegas posisi Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dan kemanusiaan. Ini sekaligus menegaskan kembali kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif.

Di lain kesempatan, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian untuk mengatasi genosida di Palestina jika dibutuhkan. Hal ini dikatakan Prabowo saat melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Hotel Hilton Rio de Janeiro Copacabana, Brasil.

“Jika ada kemungkinan gencatan senjata dan kebutuhan akan pasukan penjaga perdamaian yang diamanatkan secara internasional, kami siap menyediakan pasukan tersebut,” kata Prabowo dalam pertemuan tersebut, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/11/2024).

Prabowo menyatakan, Indonesia berkomitmen untuk mendukung seluruh usaha PBB dalam menjaga stabilitas dan perdamaian.

DPR Dukung Boikot Produk Israel

Anggota DPR RI Sukamta menyampaikan bahwa dunia harus bersatu dalam menghentikan genosida di Palestina yang dilakukan oleh pasukan Zionis Israel.

“Kita tidak bisa hanya diam. Dunia harus bersatu untuk menuntut keadilan dan menghentikan genosida ini. PBB harus memimpin upaya diplomatik yang lebih kuat untuk mencapai perdamaian dan memberikan perlindungan kepada rakyat Palestina,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta.

Hal tersebut dia sampaikan sejalan dengan peringatan satu tahun penyerbuan Israel yang mengakibatkan genosida Palestina di Jalur Gaza.

Ia pun menyampaikan konflik tersebut telah menelan banyak korban jiwa, terutama di kalangan warga sipil, serta menghancurkan infrastruktur dasar di Gaza yang semakin memperparah kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.

“Setahun telah berlalu, namun penderitaan rakyat Palestina belum berakhir. Lebih dari 60.000 warga Palestina, termasuk wanita dan

anak-anak yang telah menjadi korban kebiadaban yang tak berperikemanusiaan. Penghancuran rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan harus dipertanggungjawabkan,” kata dia menjelaskan.

Sukamta menegaskan pula bahwa tindakan Israel itu merupakan pelanggaran hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang yang layak diinvestigasi oleh Mahkamah Pidana Internasional. Selain itu, kata dia menambahkan, Amnesty International dan Human Rights Watch juga telah mengecam keras serangan yang menargetkan warga sipil serta infrastruktur sipil di Gaza itu.

Berikutnya, Sukamta mengapresiasi peningkatan dukungan global terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Dalam setahun terakhir, kita melihat perubahan signifikan dalam opini dunia. Dukungan untuk kemerdekaan Palestina terus tumbuh, terutama di Eropa, yang kini semakin menyadari pentingnya penegakan hak asasi manusia di Palestina,” ucapnya, mengacu pada laporan dari Brookings Institution (2024) dan Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR).

Lalu, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2019-2024 itu juga mendukung penuh gerakan boikot terhadap Israel, sebagai bentuk solidaritas internasional untuk melawan tindakan keji Israel.

Sukamta juga menekankan akan terus memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina dan mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif dalam upaya internasional untuk menyelesaikan krisis itu.



GABUNG BRICS, INDONESIA MELANGKAH MAJU

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan komitmen Indonesia untuk menjadi anggota kelompok ekonomi BRICS sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi nasional. Kepala negara menyampaikan ini saat menghadiri Indonesia-Brazil Business Forum, yang digelar di Copacabana

Palace, Rio de Janeiro, Brasil, pada Ahad, 17 November 2024.

Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap peran Brasil sebagai salah satu anggota kunci BRICS. Dalam forum tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk menghadiri KTT BRICS di

Kazan, hanya sehari setelah kabinetnya dilantik.

“Indonesia ingin bergabung dengan Brasil dan negara anggota BRICS lainnya,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden.

Sebelum terlalu panjang, mari kita terangkan dulu tentang BRICS.



BRICS dan Relevansinya di Dunia Global

Pada 2001, ekonom Goldman Sachs, Jim O'Neill, menggunakan singkatan BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) dalam laporan yang memprediksi empat negara itu bakal menjadi kekuatan ekonomi utama pada tahun 2050.

Brasil, Rusia, India, dan China kemudian mengadakan KTT pertama mereka di Yekaterinburg, Rusia pada tahun 2009.

Afrika Selatan bergabung dengan BRIC pada tahun 2010 dan mulai berpartisipasi secara penuh dalam KTT pada tahun 2011—sehingga namanya berubah menjadi BRICS.

BBC News melaporkan pada 2013 bahwa ekonom O'Neill—“penemu” istilah BRIC—tidak menyetujui bergabungnya Afrika Selatan dari segi kemampuan ekonomi. Meskipun begitu, keberadaan Afrika Selatan menjadi representasi dari wilayah Afrika.

Walaupun pertemuan awal BRIC lebih untuk menyoroti kesempatan investasi, BRICS kemudian berubah

menjadi blok geopolitik dengan tujuan memperkuat negara-negara berkembang.

Seiring waktu, BRICS telah berkembang menjadi platform utama bagi negara-negara berkembang untuk mempengaruhi kebijakan global dan melawan dominasi ekonomi barat.

Kelebihan BRICS

- **Pengaruh Global:** Dengan gabungan lima negara besar, BRICS memiliki potensi signifikan dalam menentukan arah perkembangan global. Masing-masing anggotanya memiliki sumber daya alam yang luas dan populasi yang besar, sehingga mereka bisa menjadi pemain penting di bidang ekonomi dan geopolitik.
- **Diversifikasi Ekonomi:** Anggota-anggota BRICS memiliki industri yang sangat beragam, mulai dari pertanian hingga manufaktur, teknologi canggih, dan sektor jasa. Ini memberikan kesempatan bagi para investor untuk membagi risiko dan meningkatkan efisiensi operasional.
- **Kolaborasi Teknologis:** Kerja sama teknologi antara anggota BRICS telah menciptakan proyek-proyek besar-besaran seperti pembangunan infrastruktur, penelitian ilmiah, dan pengembangan sistem digital. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknologi masing-masing negara tetapi juga memfasilitasi integrasi regional.
- **Bank Pembangunan Baru (New Development Bank):** Salah satu hasil kerja sama BRICS adalah pembentukan bank multilateral bernama New Development Bank (NDB). NDB dirancang untuk menyediakan dana pinjaman kepada proyek-proyek infrastruktur di seluruh dunia, termasuk di wilayah Asia-Pasifik dan Amerika Latin.
- **Forum Politik:** Melalui konferensi tahunan, lembaga-lembaga resmi, dan rapat-rapat bilateral, BRICS memberikan platform bagi pemimpin-pemimpin negara untuk berdiskusi tentang masalah global dan strategis bersama-sama.



Indonesia Getol Gabung BRICS

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan alasan Indonesia bergabung dalam BRICS. Ia mengatakan tujuan Indonesia bergabung dengan forum ekonomi itu karena sejalan dengan kepentingan nasional.

“Kita itu kan, satu, punya national interest. National interest kita yang pertama dan yang paling penting adalah tentu saja melindungi dan menjaga Tanah Air, tumpah darah bangsa Indonesia. Yang berikutnya adalah memajukan kesejahteraan umum,” kata Menlu Sugiono



kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Sugiono mengatakan, Indonesia butuh meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, memajukan swasembada pangan, dan mewujudkan swasembada energi. Ia berharap forum multilateral seperti BRICS dapat menjadi platform yang akan membantu Indonesia mewujudkan harapan dan cita-cita tersebut.

“Oleh karena itu, kooperasi dan kolaborasi dengan semua negara, dengan semua kelompok, kita harus lakukan,” ujarnya.

Indonesia mengajukan diri untuk bergabung menjadi anggota tetap BRICS saat Menlu Sugiono menghadiri KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada 24 Oktober lalu.

Indonesia setelah itu resmi menjadi negara partner atau mitra BRICS usai menerima undangan dari forum tersebut.

Sugiono pun memaparkan hal-hal terkait akses Indonesia ke pakta ekonomi BRICS dan OECD dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (2/12/2024).

Dalam paparannya, Menlu Sugiono mengungkapkan terkait proses akses ke BRICS terlebih dahulu. Menurutnya, keputusan Indonesia untuk bergabung dalam pakta yang berisi rival Barat seperti China dan Rusia itu merupakan bentuk langkah RI menyeimbangkan polarisasi ekonomi yang ada.

“Ini merupakan upaya untuk mengengage negara-negara BRICS dan melakukan balancing act, menjaga kepentingan negara maju dan berkembang,” ujarnya.

“Selain itu, BRICS juga dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi negara kita dengan anggota di dalamnya,” tambahnya.

Setelah BRICS, Menlu Sugiono kemudian memaparkan proses Indonesia untuk masuk ke lembaga negara-negara maju, OECD, yang disebutnya telah dimulai lebih awal dibandingkan dengan akses ke BRICS.

Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD Mathias Cormann bahkan telah menemui Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.

“Kunjungan Sekjen OECD menemui presiden Prabowo beberapa hari lalu juga merupakan kunjungan yang menguatkan komitmen kita untuk bergabung dengan OECD,” tuturnya.

Menlu Sugiono kemudian menjelaskan bahwa tidak ada yang bertolak belakang antara BRICS dan OECD meski negara-negara di kedua pakta tersebut ada yang memiliki sikap rivalitas antara satu dengan yang lain. Hal ini juga bahkan disampaikan oleh Sekjen OECD.

“Indonesia ingin menjadi sebuah negara yang kuat, sebuah middle power yang berpengaruh dan dihormati negara-negara lain, di mana untuk dihormati, kita harus memperkuat integritas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan, serta tidak bergantung pada negara lain,” tambahnya.

Kendati demikian, masih ada sejumlah kategori keanggotaan yang harus dilalui untuk mendapatkan keanggotaan penuh BRICS. Kategori itu adalah *interested country* (negara yang berminat), *prospective BRICS member state* (calon negara anggota BRICS), *invited BRICS member state* (negara anggota BRICS yang telah mendapatkan undangan), dan *BRICS member state* (anggota tetap BRICS).



MEMBANGUN MASA DEPAN SEPAK BOLA INDONESIA

Sepak bola Indonesia telah mengalami berbagai transformasi dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan adanya program naturalisasi pemain, kepemimpinan Shin Tae-yong

sebagai pelatih, serta peran aktif PSSI dan Erick Thohir. Keempat elemen ini saling berinteraksi untuk menciptakan tim nasional yang lebih kompetitif dan berprestasi di kancah internasional.

Program Naturalisasi PSSI

Program naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI bertujuan untuk memperkuat Timnas Indonesia dengan merekrut pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Di bawah



kepemimpinan Erick Thohir, program ini menjadi lebih selektif dan fokus pada pemain yang memiliki kualitas tinggi dan pengalaman bermain di liga-liga Eropa, terutama di Belanda. Proses naturalisasi melibatkan kerja sama dengan agen dan dukungan dari pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi sebelumnya. Program ini telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan peringkat FIFA Timnas Indonesia.

Naturalisasi pemain bukanlah



konsep baru dalam dunia sepak bola. Banyak negara telah menggunakan strategi ini untuk memperkuat tim nasional mereka. Bagi Indonesia, program ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan dalam pengembangan pemain lokal dan meningkatkan daya saing di kancah internasional. Erick Thohir, sebagai Ketua Umum PSSI, menekankan pentingnya memilih pemain yang tidak hanya memiliki darah Indonesia, tetapi juga memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. "Sekarang mereka harus mencari. Bahkan ada agency di Belanda yang secara khusus bertugas untuk menemukan pemain keturunan Indonesia," ungkap Neal Patersen, seorang pengamat sepak bola dari Belanda.

Proses naturalisasi di era Erick Thohir lebih selektif dibandingkan sebelumnya. PSSI kini fokus pada pemain yang memiliki kualitas tinggi

dan pengalaman bermain di kompetisi elite, seperti liga Belanda. Salah satu contoh sukses adalah Calvin Verdonk, yang telah merayu Mees Hilgers dan Ole Romeny untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Proses ini tidak hanya melibatkan pencarian pemain oleh agen, tetapi juga dukungan dari pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi sebelumnya.

Namun, program ini tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak menilai bahwa strategi ini mengabaikan pengembangan pemain lokal dan hanya mencari jalan pintas untuk meraih prestasi. Meskipun demikian, banyak juga yang memuji langkah ini sebagai strategi cerdas untuk meningkatkan kualitas Timnas. "Sekarang bahkan tak cuma agen. Pemain-pemain yang sudah join di Timnas Indonesia mereka membujuk pemain lainnya," tambah Patersen.

Program naturalisasi telah



memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia. Peringkat FIFA Timnas Indonesia mengalami peningkatan, dan kualitas permainan tim juga semakin membaik. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi naturalisasi dapat menjadi solusi efektif untuk memperkuat tim nasional. Selain itu, program ini juga memberikan kesempatan bagi pemain keturunan Indonesia untuk berkontribusi bagi tanah air mereka.

Shin Tae-yong: Pelatih Visioner

Shin Tae-yong, pelatih asal Korea

Selatan, telah membawa perubahan signifikan dalam strategi dan performa Timnas Indonesia. Dikenal dengan pendekatan taktis yang cermat dan disiplin tinggi, Shin Tae-yong berhasil meningkatkan kualitas permainan tim. Ia juga berperan dalam mengintegrasikan pemain-pemain naturalisasi ke dalam tim, memastikan mereka dapat berkontribusi secara maksimal. “Shin Tae-yong telah membawa semangat baru dan profesionalisme yang tinggi ke dalam tim,” kata seorang pengamat sepak bola.

Shin Tae-yong memiliki visi yang jelas untuk Timnas Indonesia. Ia tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada pengembangan jangka panjang. Shin Tae-yong telah memperkenalkan metode latihan yang lebih modern dan efisien, serta menekankan pentingnya disiplin dan kerja keras. Pendekatan ini telah memberikan hasil yang positif, dengan peningkatan performa tim di berbagai kompetisi internasional.

Selain itu, Shin Tae-yong juga berperan dalam mengembangkan pemain muda. Ia memberikan



kesempatan kepada pemain muda untuk bermain di timnas, sehingga mereka dapat mendapatkan pengalaman berharga dan berkembang menjadi pemain yang lebih baik. “Kami harus mempersiapkan generasi berikutnya. Pemain muda adalah masa depan sepak bola Indonesia,” ujar Shin Tae-yong.

Peran PSSI

PSSI, sebagai badan pengatur sepak bola di Indonesia, memiliki peran penting dalam mendukung program naturalisasi dan kepemimpinan Shin Tae-yong. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan fasilitas latihan, pengembangan pemain muda, dan kerja sama internasional menjadi fokus utama PSSI. “PSSI berkomitmen untuk menciptakan ekosistem sepak bola yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Erick Thohir.

PSSI juga berperan dalam memastikan bahwa program naturalisasi berjalan dengan lancar. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk agen pemain dan klub-klub di luar negeri, untuk menemukan pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Selain itu, PSSI juga berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pemain naturalisasi, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim.

Erick Thohir: Pemimpin Transformasional

Erick Thohir, sebagai Ketua Umum PSSI, telah memainkan peran kunci dalam transformasi sepak bola Indonesia. Dengan latar belakang sebagai pengusaha sukses dan pengalaman dalam mengelola klub-klub sepak bola internasional, Thohir membawa perspektif baru dan inovatif ke dalam PSSI. Ia juga berperan

aktif dalam mendukung program naturalisasi dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil PSSI selaras dengan tujuan jangka panjang untuk meningkatkan prestasi Timnas Indonesia.

Erick Thohir memiliki visi yang jelas untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sepak bola di semua level, mulai dari pemain muda hingga timnas senior. Thohir juga berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan sepak bola di Indonesia, dengan memperkenalkan standar-standar internasional dalam berbagai aspek, termasuk manajemen klub, pelatihan, dan pengembangan pemain.

Selain itu, Thohir juga berperan dalam meningkatkan kerjasama internasional. Ia menjalin hubungan dengan berbagai federasi sepak bola di seluruh dunia, serta mengundang pelatih dan pemain asing untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan pemain dan pelatih di Indonesia. “Kami ingin belajar dari yang terbaik, dan kami percaya bahwa kerjasama internasional adalah kunci untuk mencapai itu,” ujar Thohir.

Kolaborasi antara program naturalisasi, kepemimpinan Shin Tae-yong, peran PSSI, dan visi Erick Thohir telah membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih profesional dan strategis, diharapkan Timnas Indonesia dapat meraih prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Transformasi ini tidak hanya memberikan harapan baru bagi para penggemar sepak bola di Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan komitmen, masa depan sepak bola Indonesia dapat menjadi lebih cerah.

MENYAMBUT INDONESIA EMAS DENGAN GURU BERKUALITAS



Mewujudkan Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berpengaruh di mata dunia bukan lah mimpi. Hal itu sangat mungkin, jika dilalui dengan proses dan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Tentunya langkah yang paling utama adalah bagaimana secara serius mempersiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Untuk mempersiapkan SDM unggul tidak bisa terlepas dari peran guru-guru yang berkualitas. Mereka lah yang akan menentukan nasib Indonesia ke depan.

Indonesia akan memasuki usia emas yakni di tahun 2045. Menuju Indonesia Emas pemerintah telah mempersiapkan visi besar yakni menjadikan Indonesia menjadi negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi besar, berkeadilan sosial serta berdaya saing tinggi di kancah global.

Visi besar sulit tercapai tanpa dibarengi dengan mempersiapkan SDM unggul yang lahir dari rahim bangsa ini.

Guru berkualitas menjadi kunci

Melihat kondisi kualitas pendidikan di Indonesia perlu usaha ekstra keras untuk mengejar ketertinggalannya. Tidak usah terlalu jauh membandingkan kualitas pendidikan Indonesia dengan negara-negara maju, seperti Jepang atau Amerika Serikat; dibanding dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia, Indonesia masih tertinggal.

Berdasarkan data survei yang dirilis oleh CEOWORLD Magazine 2024 menjelaskan bahwa sistem pendidikan paling maju di wilayah Asia Tenggara ditempati oleh Singapura, kemudian disusul oleh Thailand dan Malaysia. Indonesia puas menempati peringkat keempat. (*detik.com*). Survei yang dilakukan dari Januari- Maret 2024 yang diikuti 196.300 responden ini disusun dengan membandingkan 93 negara dalam dua kategori utama yaitu kualitas dan peluang.

Indeks kualitas meliputi kriteria sistem pendidikan publik, kemampuan siswa untuk berkuliah, jumlah institusi penelitian, pendanaan dan sumbangan universitas, hingga kampus yang memiliki peringkat dunia. Sedangkan indeks peluang berkaitan dengan kriteria angka literasi orang dewasa, tingkat kelulusan SD, SMP dan SMA, hingga besaran anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah.

Jika berkaca pada data-data yang menjelaskan terkait kualitas pendidikan Indonesia dibanding dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara hasilnya tidak jauh berbeda. Namun, apa yang terjadi soal pendidikan Indonesia saat ini tidak

membuat kita patah semangat, harus menjadi spirit yang kuat untuk menjadikan Indonesia semakin cerah.

Maka itu, untuk mengejar ketertinggalan tersebut kuncinya adalah bagaimana pemerintah mempersiapkan guru-guru yang berkualitas. Sebab, peran guru dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak bisa tunda-tunda lagi.

Upaya-upaya untuk mempersiapkan guru berkualitas sudah dilakukan sejak 10 tahun terakhir. Pemerintah bekerja keras untuk mempersiapkan lahirnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas ditambah dengan pembangun infrastruktur-infrastruktur dalam rangka upaya menjadikan Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang kuat.

Sebut saja dalam meningkatkan kualitas guru, khususnya di masa periode ke-2 pemerintahan Jokowi, Kementerian Pendidikan meluncurkan program yakni Merdeka Mengajar. Program tersebut memiliki tujuan untuk memberdayakan guru agar mereka dapat memberikan pendidikan yang lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Bagi penulis ini merupakan terobosan yang patut diapresiasi, sebab program ini bisa menjadi jalan keluar dari tantangan yang selama ini dihadapi dunia pendidikan Indonesia yang masih kurang fleksibel dan terkesan kaku.

Selain itu, Kementerian Pendidikan juga berupaya meningkatkan kesejahteraan guru serta meningkatkan kapasitas kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebab, peningkatan kualitas SDM Indonesia tidak ada jalan lain, yakni melalui proses pendidikan yang berkualitas juga. Tanpa itu sangat mustahil untuk melahirkan manusia-manusia Indonesia yang cerdas dan memiliki karakter Pancasila untuk menerbangkan Indonesia melambung tinggi menjadi negara pemenang.

Guru mencintai profesinya

Mewujudkan pembelajaran yang bermakna seperti pesan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti tidak hadir begitu saja, tapi bagaimana para guru Indonesia mampu

menjalankan profesinya sebagai pengajar hadir dari hati (ikhlas). Keikhlasan inilah yang akan membawa perubahan penting dalam guru bersikap.

Dari keikhlasan ini, guru dalam menjalankan tugasnya akan sepenuh hati sehingga akan terpancar dari sikap yang tulus dan penuh cinta kepada para murid-muridnya. Perasaan "cinta" inilah akan diwujudkan bagaimana dia mengajar. Guru tidak hanya berhenti sekadar menjalankan tugasnya sebagai pengajar, akan tetapi bagaimana dalam mengajar akan memberikan nilai lebih, yakni tidak sebatas berbagi ilmu pengetahuan / *transfer of knowledge*, akan tetapi mampu mencetak siswa yang memiliki karakter yang baik.

Mencetak karakter bukan sekadar kata-kata, tapi peran guru itu muncul dalam personifikasi perbuatan atau tingkah laku dari sang guru atau dalam bahasa yang lebih sederhana guru menjadi suri tauladan yang baik bagi peserta didiknya.

Guru yang mencintai murid tidak hanya mencerdaskan, tapi guru yang mampu menyadarkan muridnya untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Penanaman karakter inilah penting untuk diwujudkan sehingga kedepan lahir anak-anak yang memiliki kepedulian yang besar terhadap kehidupan sosial dengan karya-karya yang membantu sesama. Bukan manusia Indonesia egois yang mementingkan dirinya sendiri.

Indonesia kedepan butuh manusia-manusia yang terdidik dan tercerahkan. Terdidik dengan keilmuannya, tercerahkan yang berarti dengan ilmunya menjadi obor penerang yang memberikan sinar penerang bagi kehidupan manusia di sekitarnya. Generasi seperti inilah yang mampu membawa Indonesia berjaya. sehingga Indonesia benar-benar Emas, bukan Indonesia cemas yang kerap dilontar oleh netizen Indonesia.

Selamat Hari Guru Nasional, semoga spirit mencerdaskan anak bangsa senantiasa terpancar oleh guru-guru Indonesia. Guru adalah harapan membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan siap bersaing di kancah global.

**Oleh: Amir Fiqi, Guru SMA Muhammadiyah 4
Kota Tangerang**



HOME SWEET LOAN, PERJUANGAN GENERASI SANDWICH

“Home Sweet Loan” bercerita tentang perjuangan Kaluna, seorang wanita muda yang berusaha membeli rumah sambil merawat keluarganya.

Film ini menggambarkan kenyataan finansial yang dihadapi banyak kaum muda saat ini, mulai dari menabung hingga mengajukan kredit pemilikan rumah. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang plot film **“Home Sweet Loan”**.

“Home Sweet Loan” mengisahkan Kaluna, seorang wanita muda yang

bekerja di bank dengan gaji yang cukup untuk hidup sehari-hari. Kaluna memimpikan memiliki rumahnya sendiri di Jakarta, tetapi dia menghadapi berbagai hambatan finansial.

Dia tinggal bersama keluarga besarnya yang terdiri dari orang tua dan dua saudara kandung beserta keluarga mereka di satu rumah yang tidak luas. Bersama tiga sahabatnya - Tanisha, Kamamiya, dan Danan - Kaluna berjuang untuk menemukan

rumah yang terjangkau di pinggiran Jakarta.

Mereka bersedia mengurangi pengeluaran dan mencari pekerjaan tambahan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Namun, Kaluna menghadapi dilema ketika kondisi keuangan keluarganya memburuk dan mereka memerlukan bantuannya.

Dia harus memutuskan antara mengejar mimpi pribadinya atau membantu keluarganya yang terjebak masalah hutang. Film ini

menggambarkan tantangan generasi sandwich dalam menghadapi tekanan finansial dan keluarga.

Perjuangan Kaluna sebagai Generasi Sandwich

Dalam sinopsis “Home Sweet Loan,” Kaluna memaparkan kisah nyata tantangan generasi sandwich di Indonesia. Sebagai anak termuda dengan penghasilan Rp6 juta per bulan, ia bertanggung jawab atas kebutuhan keluarganya yang besar, termasuk orang tua dan saudara-saudaranya.

Dengan kerja keras, kesediaan untuk lembur, dan penerapan gaya hidup yang hemat, ia berusaha mewujudkan mimpi memiliki rumah sendiri. Namun, beban finansial dan tanggung jawab keluarga terpaksa membuatnya menggunakan tabungan ketika saudaranya terbelit hutang dari pinjaman online.

Keadaan ini menggambarkan situasi yang dihadapi banyak pemuda di Indonesia, yang terjepit antara kewajiban keluarga dan pencapaian impian mereka sendiri. Meski dihadapkan pada berbagai rintangan.

Perjuangan Kaluna menyoroti pentingnya disiplin finansial dan ketabahan dalam mengatasi tantangan sebagai bagian dari generasi sandwich.

Pesan Inspiratif untuk Generasi Muda

“Home Sweet Loan” menyuguhkan pelajaran berharga bagi generasi muda, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan penyeimbangan antara impian serta tanggung jawab keluarga.

Kaluna membuktikan bahwa dengan disiplin dan kerja keras, menabung dalam jumlah besar adalah mungkin, meskipun dengan gaji yang terbatas. Dalam waktu 7 tahun, ia berhasil menabung Rp 330 juta dengan menyisihkan Rp 4 juta setiap bulan.

Bagi generasi muda, sangat penting untuk mulai menabung sedini mungkin dan menetapkan tujuan finansial yang jelas. Film ini juga menekankan bahwa kadang kita harus berkorban untuk keluarga.

Namun, jangan pernah meninggalkan impian pribadi. Temukan keseimbangan antara mendukung keluarga dan merealisasikan cita-cita.



Pesan lain yang terkandung adalah pentingnya support system yang solid. Dukungan dari teman dan pasangan sangat berharga dalam mengatasi tantangan hidup. Jangan segan untuk meminta bantuan atau membagi beban saat merasa terbebani.

“Home Sweet Loan” menampilkan tantangan finansial yang dihadapi oleh generasi sandwich di Indonesia. Kisah Kaluna menunjukkan bagaimana seorang anak muda berusaha menyeimbangkan antara impian pribadi dan tanggung jawab keluarga.

Dari perjalanan Kaluna, kita diajak untuk memahami pentingnya disiplin finansial, kerja keras, dan dukungan dari orang-orang terdekat dalam menghadapi tekanan hidup.

Inti pesan film ini adalah, meskipun dihadapkan pada banyak hambatan, kita masih dapat mengejar mimpi dengan tekad yang kuat dan perencanaan yang matang. Yang terpenting adalah untuk selalu bersyukur dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan.

PERSEPSI GENERASI Z TENTANG PEKERJAAN: INOVATIF ATAU PROBLEMATIS?

Setiap generasi memiliki perspektif yang unik, yang seringkali memicu perubahan di berbagai sektor. Dengan masuknya Generasi Z, atau yang akrab disebut Gen Z, ke dalam dunia profesional, perubahan dalam lingkungan kerja menjadi hal yang tak terhindarkan, meskipun ini sering kali menimbulkan konflik dengan pandangan generasi sebelumnya. Pertanyaannya, apakah perbedaan ini menjadi masalah atau justru membawa inovasi ke dalam dunia kerja?

Perubahan signifikan yang dibawa oleh Gen Z ke dalam dunia kerja adalah preferensi mereka terhadap keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Berbeda dengan generasi sebelumnya seperti Baby Boomers dan Gen X yang menganggap kerja keras, jam kerja yang panjang, dan dedikasi penuh sebagai indikator komitmen, Gen Z melihat nilai-nilai tersebut sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Mereka lebih memprioritaskan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Studi Deloitte tahun 2023 menunjukkan bahwa 70% karyawan Gen Z menyatakan bahwa fleksibilitas kerja merupakan faktor penting dalam memilih tempat kerja. Mereka menginginkan kebebasan untuk bekerja dari mana saja dan menolak ide bekerja hanya untuk memenuhi jam kantor. Pandangan ini seringkali dianggap sebagai kurangnya komitmen oleh generasi yang lebih tua, namun Gen Z cenderung lebih produktif ketika

diberikan fleksibilitas yang sesuai dengan gaya hidup mereka.

Gen Z juga lebih peduli dengan isu-isu sosial. Mereka mencari pekerjaan yang tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Laporan The Workforce Institute tahun 2023 mengungkapkan bahwa 64% Gen Z lebih memilih untuk bekerja di perusahaan dengan misi sosial yang jelas dan kuat.

Untuk generasi lain, preferensi ini mungkin terlihat naif atau tidak realistis. Biasanya, mereka memandang pekerjaan sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan dan stabilitas finansial. Namun, bagi Gen Z, pekerjaan tidak hanya tentang uang, tetapi juga kontribusi mereka terhadap perubahan sosial yang lebih besar. Hal ini sering membuat generasi sebelumnya menganggap Gen Z terlalu idealis dan tidak praktis.

Gen Z tumbuh bersama teknologi dan internet sejak kecil. Mereka cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan sering menjadi yang pertama mengadopsi alat atau platform baru.

Dalam konteks pekerjaan, kemampuan ini bisa menjadi keuntungan besar bagi perusahaan, karena Gen Z dapat mendorong inovasi dan modernisasi. Namun, generasi yang lebih tua sering merasa tersaingi atau kesulitan beradaptasi dengan kecepatan ini. Beberapa berpikir bahwa Gen Z tidak sabar atau tidak

menghargai metode kerja tradisional, padahal mereka hanya terbiasa dengan kecepatan dan efisiensi teknologi.

Stereotip yang sering ditujukan kepada Gen Z adalah keinginan mereka untuk cepat naik jabatan. Pandangan ini sering dianggap negatif oleh atasan dari generasi sebelumnya, yang lebih terbiasa dengan struktur hierarki kerja dan promosi berdasarkan waktu dan pengalaman.

Bagi Gen Z, percepatan karier sering dikaitkan dengan kontribusi yang mereka rasa layak diakui, bukan berdasarkan lama bekerja di perusahaan. Penelitian LinkedIn menunjukkan 61% Gen Z merasa siap dipromosikan dalam dua tahun pertama bekerja, berbanding 43% dari generasi sebelumnya. Mereka lebih menghargai hasil nyata dan inovasi daripada lama bekerja di perusahaan yang sama.

Pada dasarnya, perbedaan pandangan Gen Z di tempat kerja bukan masalah, melainkan tantangan yang membutuhkan pemahaman lebih dalam. Lingkungan kerja yang dinamis ini mengharuskan adaptasi dari semua generasi, tua maupun muda. Alih-alih melihat perbedaan ini sebagai penghalang, kita harus mulai memikirkan bagaimana nilai-nilai dan perspektif baru bisa membawa inovasi dan kemajuan dalam dunia kerja.

Seperti kata pepatah, “perubahan itu pasti.” Mungkin saja, cara pandang Gen Z terhadap pekerjaan adalah bagian dari evolusi yang kita butuhkan.

Mengingat Gen Z kini sudah memasuki dunia profesional, perubahan di bidang pekerjaan pun jadi hal yang tak bisa dihindari, meski seringkali memicu benturan dengan cara pandang generasi sebelumnya.

Apakah perbedaan ini adalah masalah, ataukah sebenarnya membawa pembaruan bagi dunia kerja?

“Work-Life Balance” yang Jadi Budaya

Generasi sebelumnya, cenderung memandang kerja keras, jam kerja panjang, dan dedikasi total sebagai tanda komitmen. Namun, bagi Gen Z, nilai-nilai ini dianggap ‘kolot’. Mereka lebih mementingkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Berorientasi pada Dampak Sosial

Bagi generasi sebelumnya terbiasa melihat pekerjaan sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan dan stabilitas finansial. Bagi Gen Z, pekerjaan tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi pada perubahan sosial yang lebih besar.

Digital Native

Dalam konteks pekerjaan, ini bisa menjadi keuntungan besar bagi perusahaan, karena Gen Z mampu mendorong inovasi dan modernisasi. Namun, generasi yang lebih tua sering kali merasa tersaingi atau kesulitan beradaptasi dengan kecepatan ini.

Baru Fresh Graduate, Sudah mau Jadi ‘CEO’

Bagi Gen Z, kecepatan karier seringkali berkaitan dengan kontribusi yang mereka rasakan layak mendapat pengakuan, bukan sekadar lamanya waktu yang dihabiskan di perusahaan.

Tantangan atau Kesempatan?

Pada akhirnya, perbedaan cara pandang Gen Z di tempat kerja bukanlah masalah, melainkan tantangan yang harus dihadapi dengan pemahaman yang lebih luas. Dunia kerja yang terus berubah ini memerlukan adaptasi dari semua generasi.



Say hello to wondr by BNI

Jadiin maumu
dengan banking app
baru dari BNI.

